



KURSUS
KITA

LAPORAN KINERJA

2024

DIREKTORAT KURSUS DAN PELATIHAN



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Direktorat Kursus dan Pelatihan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 dengan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Kursus dan Pelatihan tahun 2024. Direktorat Kursus dan Pelatihan pada tahun 2024 menetapkan 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan. Secara umum Direktorat Kursus dan Pelatihan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya efisiensi anggaran, perubahan struktur organisasi dan tata kelola sehingga menyebabkan adanya perubahan format dan jadwal kegiatan dari jadwal semula. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Direktorat Kursus dan Pelatihan pada tahun 2024. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Direktorat Kursus dan Pelatihan pada tahun 2024.

Jakarta, 31 Januari 2025



Nahdiana
Direktur

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Ikhtisar Eksekutif

Bab 1 Pendahuluan 8

Gambaran Umum
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Dasar Hukum
Isu Strategis

Bab 2 Perencanaan Kinerja 14

Visi, Misi dan Tujuan Organisasi

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja 23

Capaian Kinerja
realisasi Anggaran
Inovasi dan Program Kolaboratif

Bab 4 Penutup 91

Kesimpulan
Upaya yang dilakukan

Lampiran



IkhtisarEksekutif

Laporan kinerja Direktorat Kursus dan Pelatihan 2024 menyajikan tingkat pencapaian 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III. Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut.



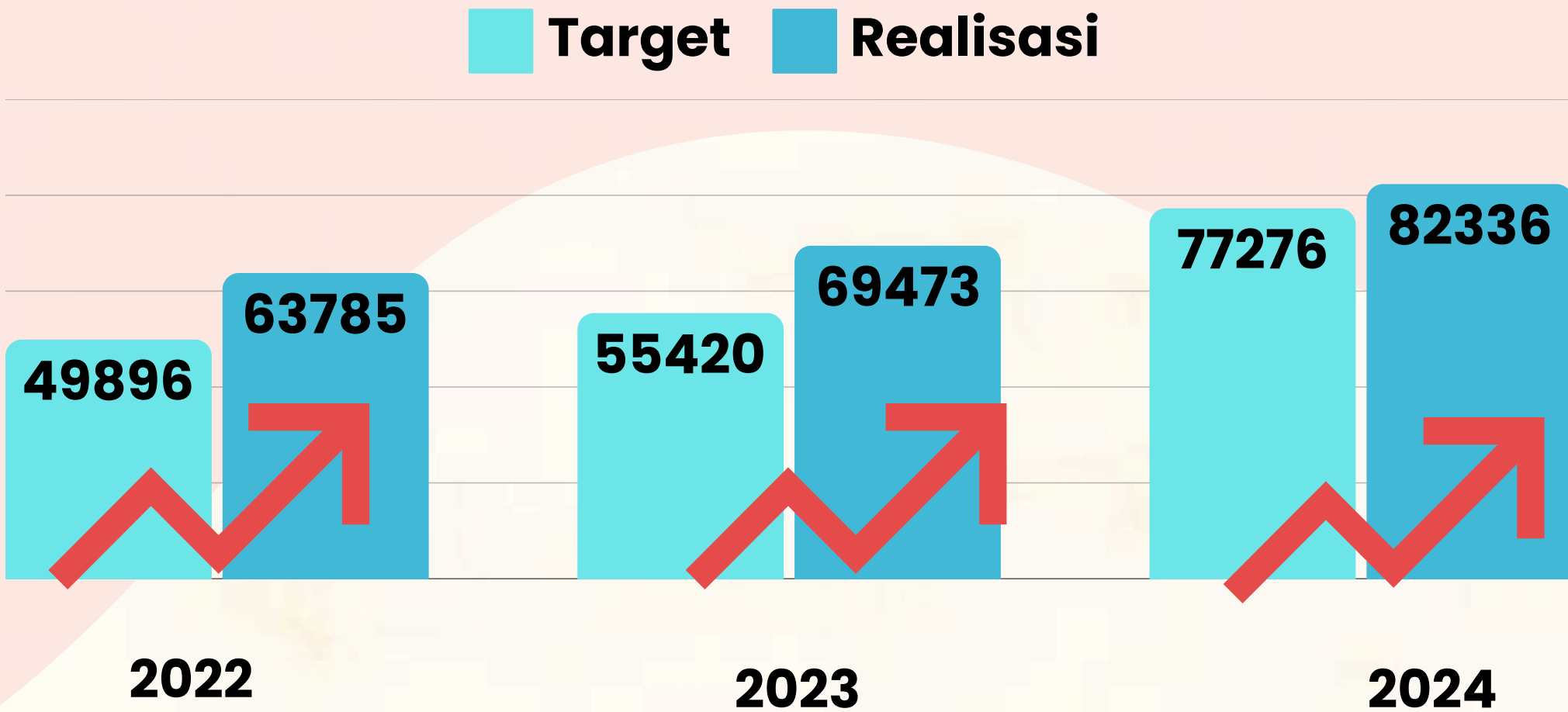
Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

Capaian Kinerja 2024



Perbandingan Realisasi

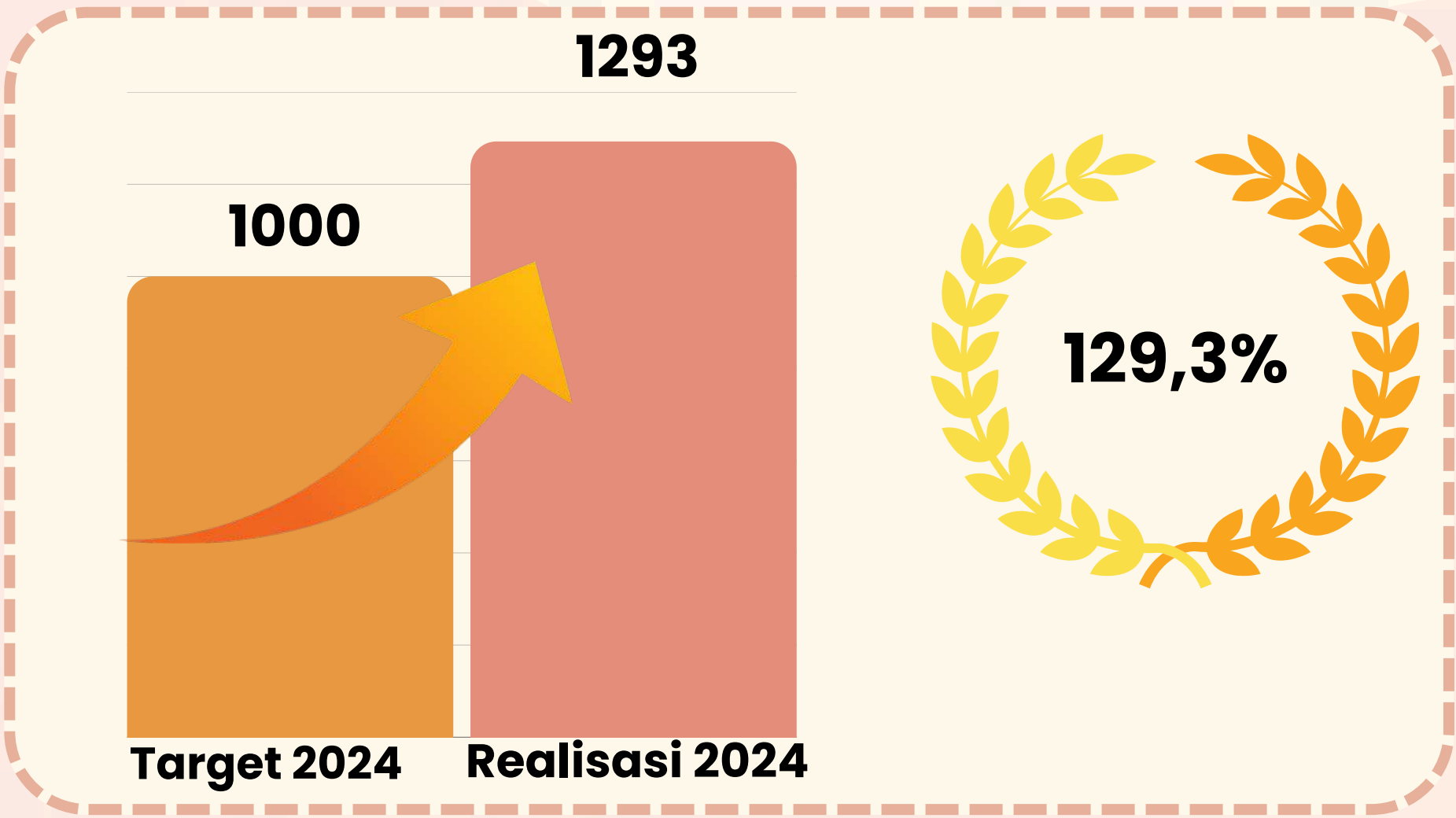




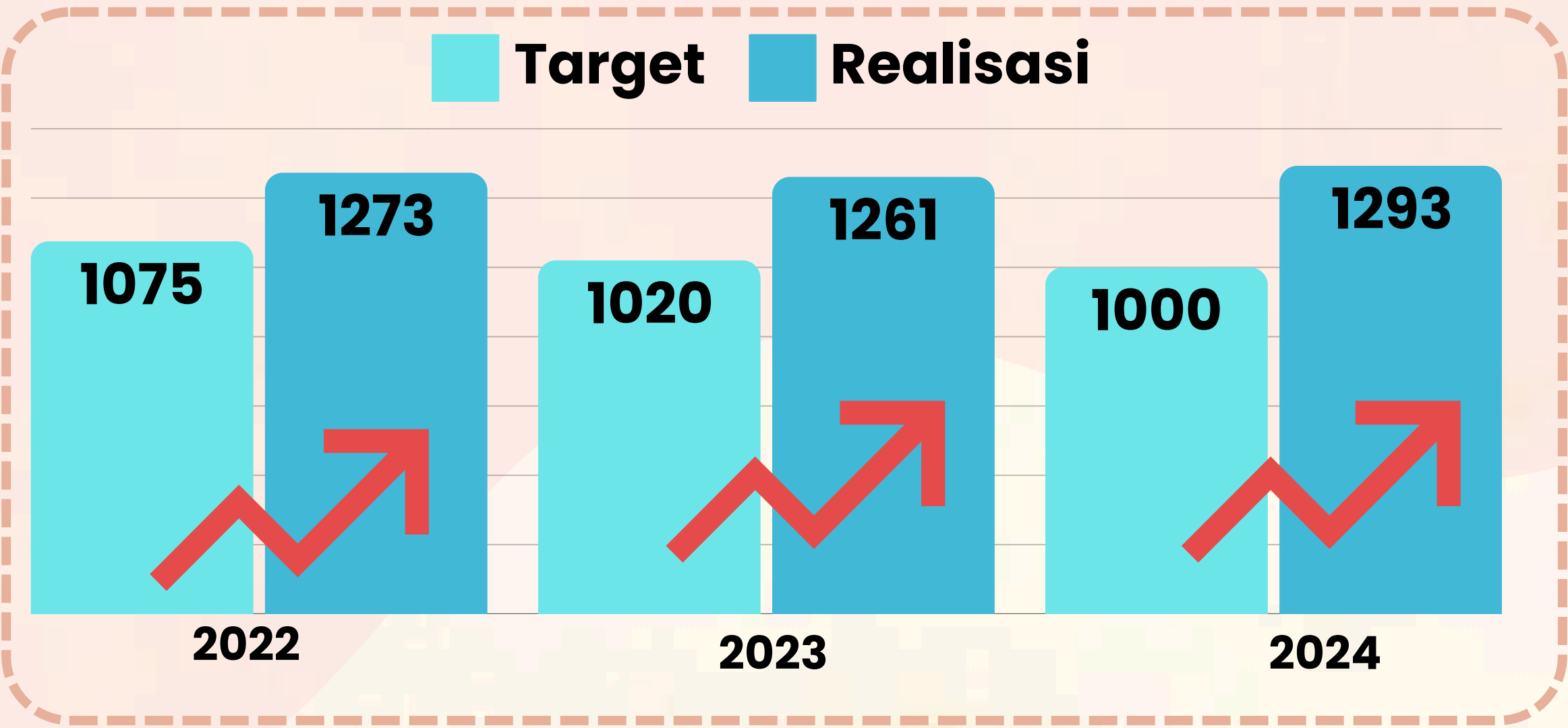
Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

Capaian Kinerja



Perbandingan Realisasi

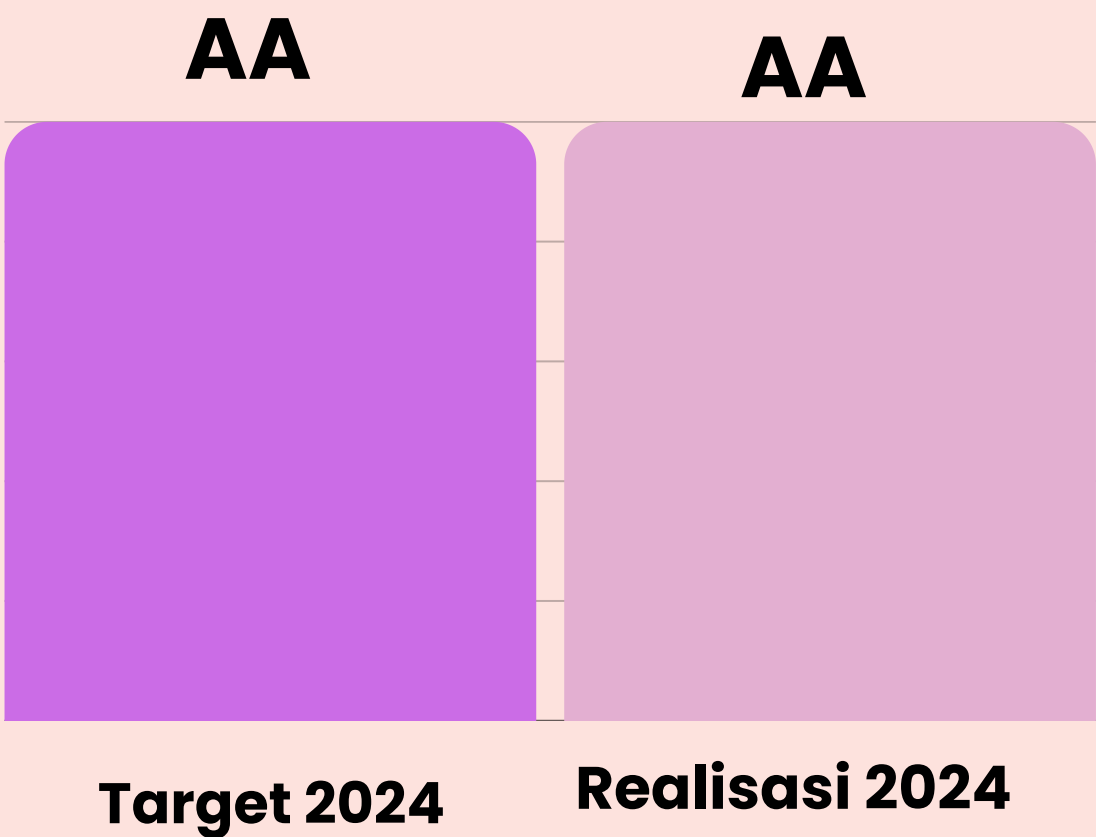




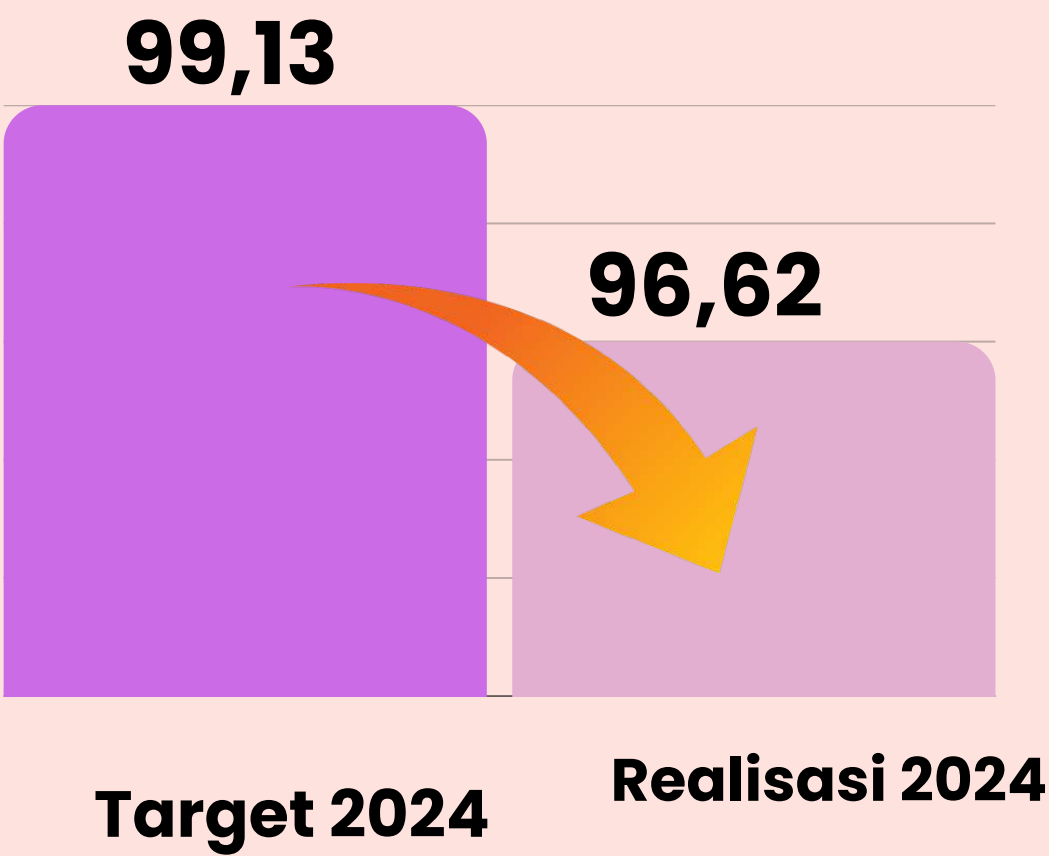
Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan

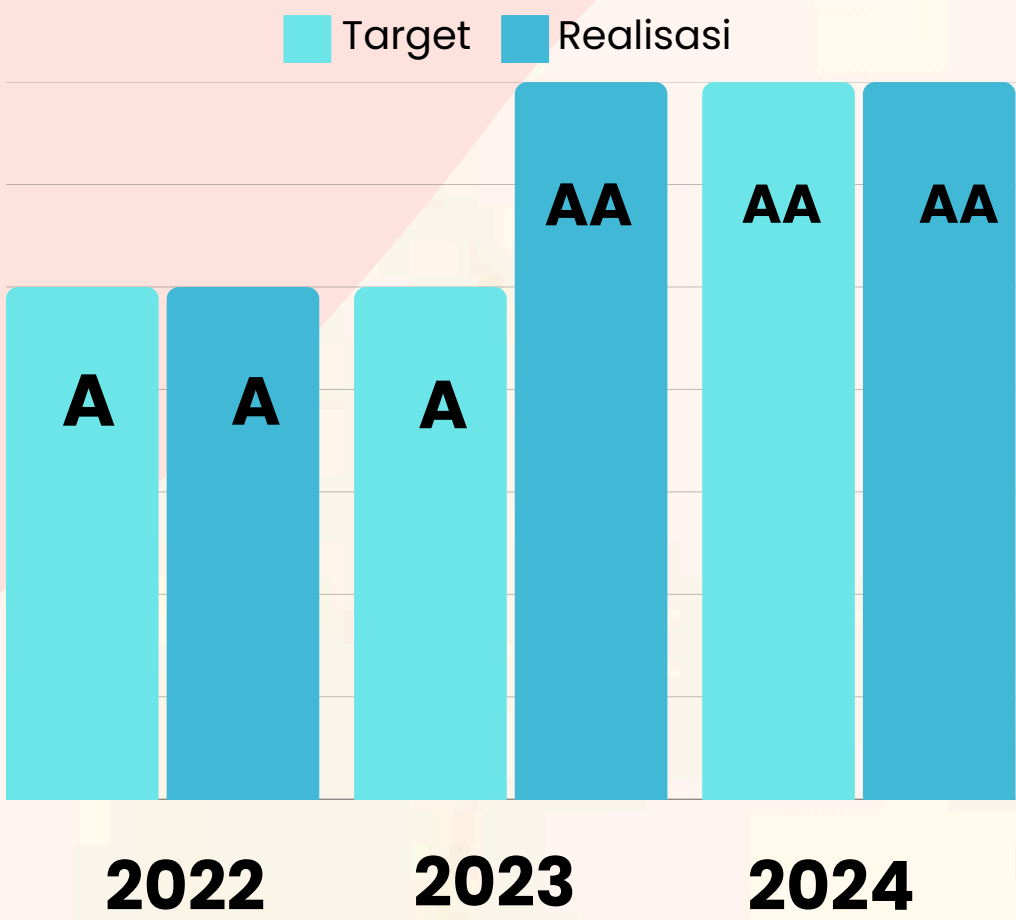
Predikat SAKIP



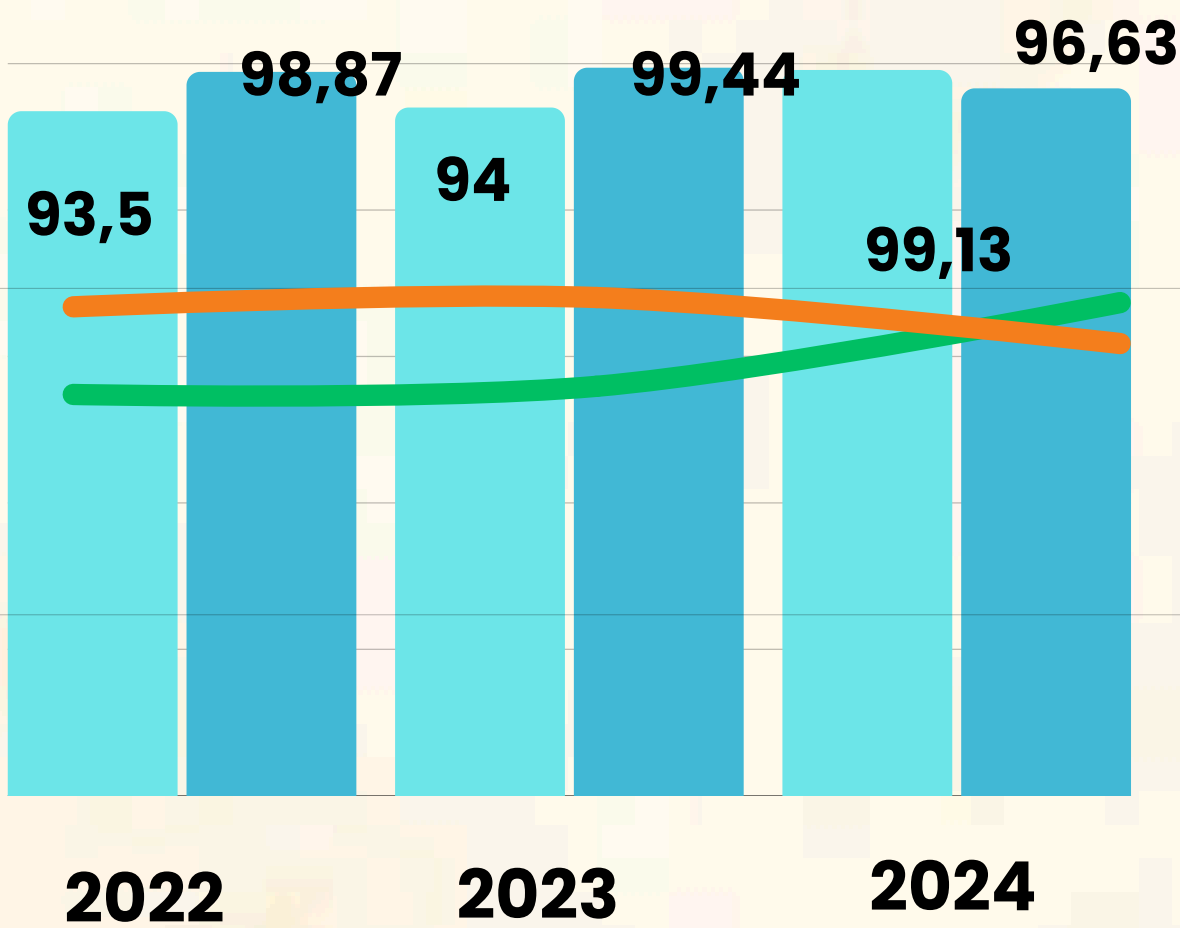
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan



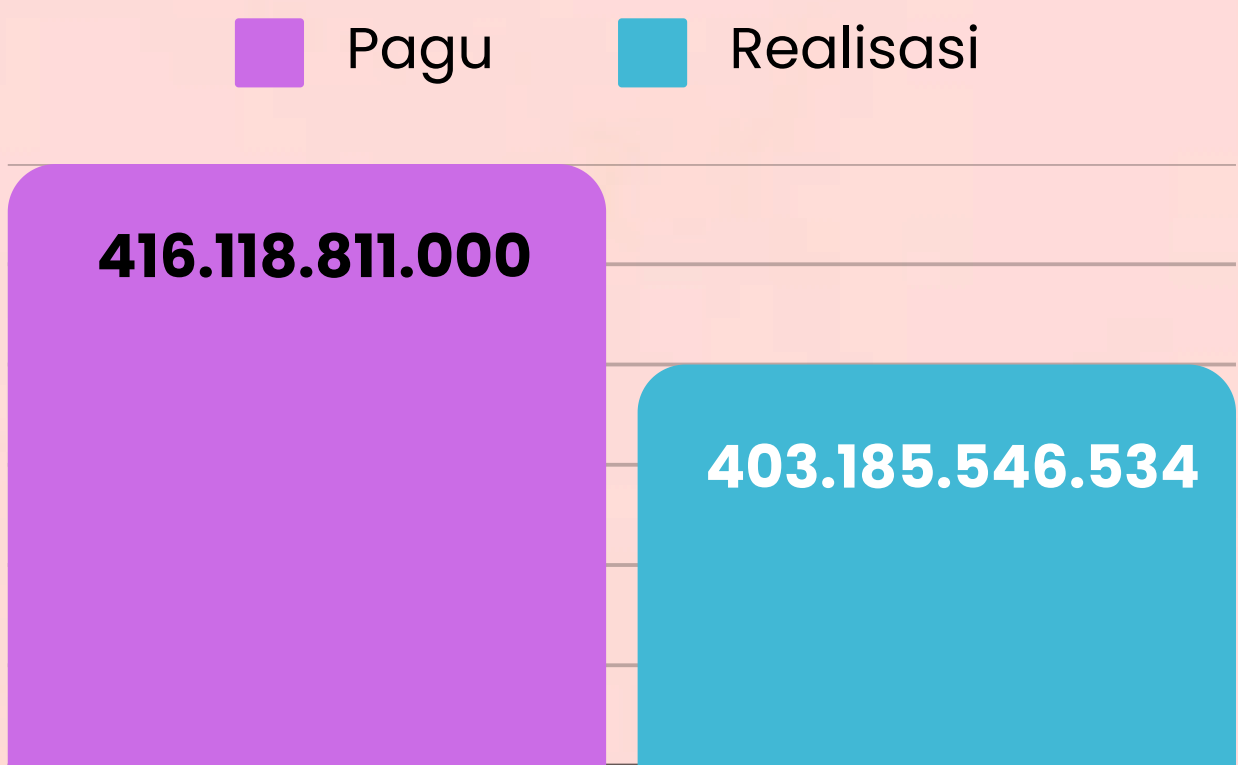
Perbandingan Realisasi



Perbandingan Realisasi



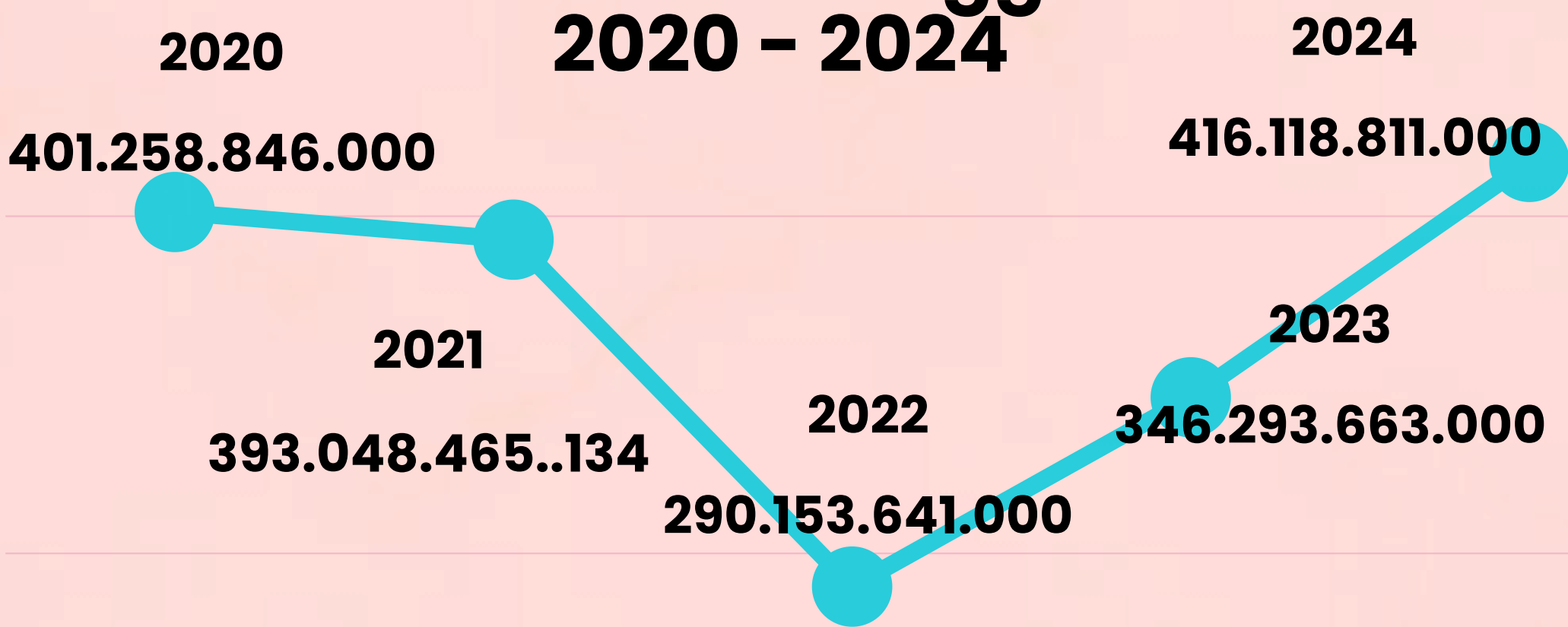
Penyerapan Anggaran 2024



Persentase Kinerja Anggaran



Tren Alokasi Anggaran 2020 - 2024



Berdasarkan dari grafik/tabel di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2020 hingga 2024 mengalami penurunan di tahun 2022 yang disebabkan karena adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kemendikbudristek. Meskipun demikian, dua program prioritas PKK dan PKW yang ada di direktorat kursus dan pelatihan tetap mengalami peningkatan sasaran.





Kendala / Permasalahan



Komitmen Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan lembaga kursus dan pelatihan serta pendampingan program kursus dan pelatihan di wilayahnya masih belum optimal.



Pendampingan rintisan usaha kepada para lulusan program PKW masih belum melibatkan seluruh mitra seperti Dudika, permodalan dan mitra pemasaran.



Pelaksanaan uji kompetensi belum memiliki mekanisme pemantauan/supervisi untuk melihat dampak pelaksanaan program di industri



Implementasi program rekognisi pembelajaran lampau kerjasama LKP dengan perguruan tinggi vokasi masih belum terlaksana maksimal disebabkan jenis keterampilan yang tersedia di LKP masih belum selaras dengan kurikulum di perguruan tinggi



Terdapat peretasan sistem informasi e-banper yaitu peserta didik yang terdaftar sebagai peserta didik program PKK dan PKW masih berstatus aktif pada aplikasi DAPODIK.





Upaya yang dilakukan



Melakukan identifikasi wilayah kabupaten kota se Indonesia terkait penganggaran untuk pembinaan program kursus dan pelatihan di daerah dan ditindaklanjuti dalam program *Task Force* Padanan Anggaran



Dilakukan penyusunan standar mekanisme pelaksanaan pendampingan rintisan usaha



Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program uji kompetensi



Dilaksanakan sosialisasi program Rekognisi Pembelajaran Lampau kepada perguruan tinggi di Indonesia



Penyusunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk seluruh program layanan direktorat kursus dan pelatihan

BAB 1

PENDAHULUAN

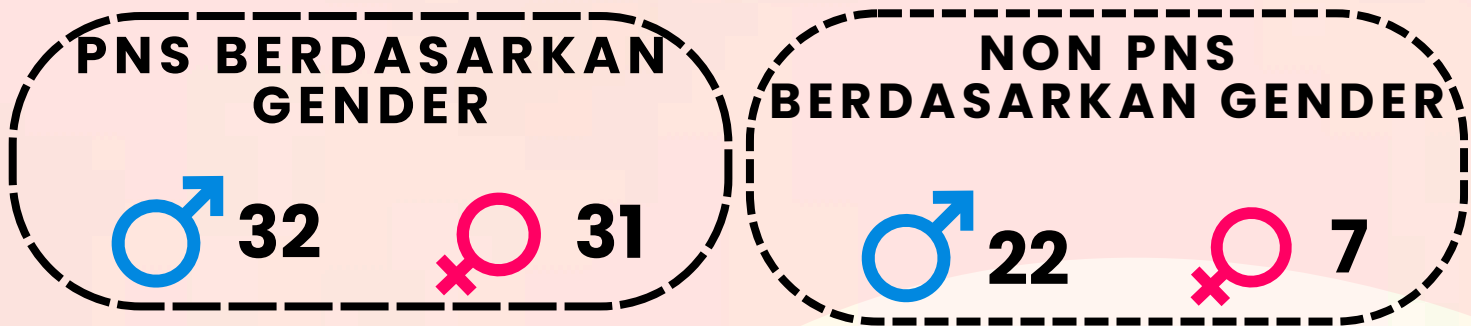




GAMBARAN UMUM

Direktorat Kursus dan Pelatihan merupakan satuan kerja di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Direktorat Kursus dan Pelatihan pertama kali dibentuk pada April 2006 lewat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. Direktorat Kursus dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Direktur (Eselon II). Sejak awal mula didirikan hingga sekarang, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah mengalami 7 (Tujuh) kali pergantian pimpinan. Sejak Bulan Februari 2024, Direktorat Kursus dan Pelatihan dipimpin oleh Nahdiana. Adapun wilayah kerja Direktorat Kursus dan Pelatihan melingkupi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DATA SDM



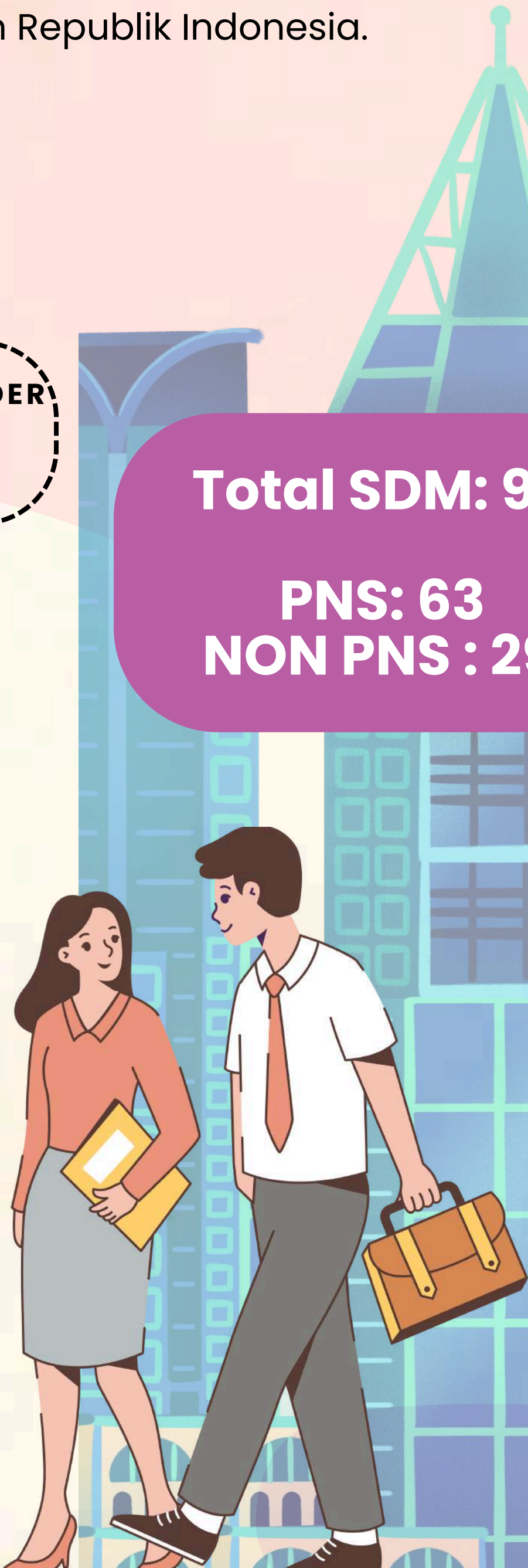
Total SDM: 92

PNS: 63

NON PNS : 29

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

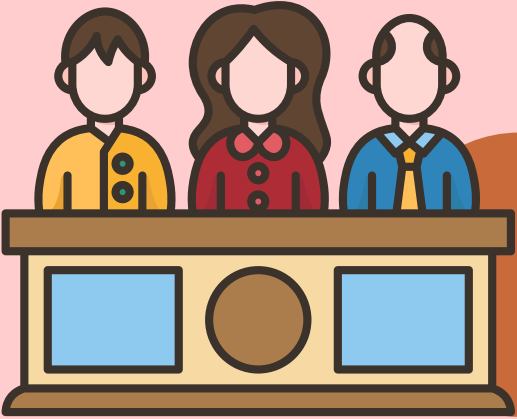
No	Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah Non PNS
1	S3	6	-
2	S2	13	-
3	S1	34	13
4	D IV	1	2
5	D III	3	3
6	SMA/SMK/SMEA/STM/MA	5	10
7	SMP	1	1
	Jumlah	63	29





DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020–2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang
11. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor tahun Tentang Organisasi dan Tata Kerja untuk UPT daerah; .



TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

TUGAS

**“Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja”
(Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021)**

FUNGSI

- Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
- Perumusan standar di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
- Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan & pelatihan kerja
- Fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
- Penyiapan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan keterampilan & pelatihan kerja pada kursus & pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing/lembaga asing
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat

STRUKTUR ORGANISASI

Direktur
Nahdiana

Kasubag TU
Atik Riyanti

**Kelompok
Jabatan
Fungsional**

PNS
18

Non PNS
15

**Pokja
Pengembangan
Pembelajaran dan
Ujikom**

PNS
12

Non PNS
2

**Pokja
Pengembangan
Kelembagaan dan
Peserta Didik**

PNS
10

Non PNS
5

**Pokja
Pengembangan
Pendidikan Kecakapan
Kerja**

PNS
11

Non PNS
4

**Pokja
Pengembangan
Pendidikan Kecakapan
Wirausaha**

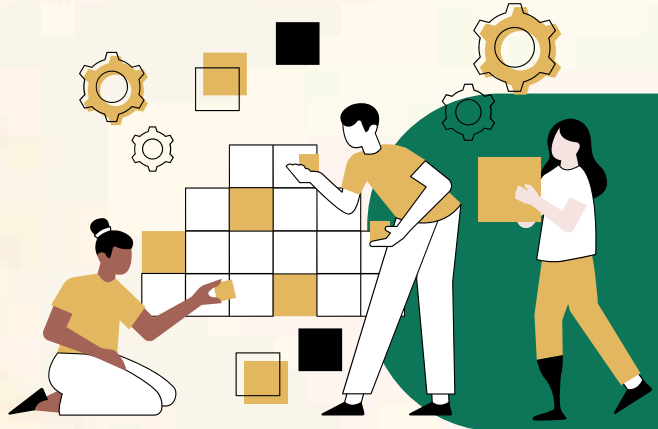
PNS
10

Non PNS
3

Kelompok Jabatan Fungsional

No	Kelompok Jabatan	Jumlah
1	Widyaprada Utama	4
2	Widyaprada Madya	4
3	Widyaprada Muda	5
4	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	1





ISU-ISU STRATEGIS /PERMASALAHAN

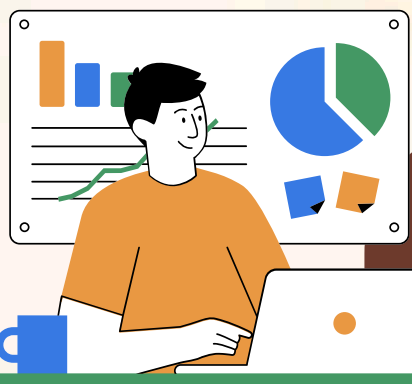
Pemerintah Daerah masih banyak yang belum mengalokasikan anggarannya untuk pembinaan dan pendampingan terhadap program kursus dan pelatihan baik melalui APBD maupun lewat skema padanan anggaran.

Kompetensi Lulusan kursus dan pelatihan belum mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja

Instruktur dan pengelola kursus dan pelatihan masih memerlukan peningkatan kompetensi jenis keterampilan sesuai dengan teknologi terbaru

Lembaga Sertifikat Kompetensi yang melakukan uji kompetensi bagi lulusan kursus dan pelatihan belum terlisensi BNSP sesuai Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi

Perguruan tinggi vokasi yang menerima lulusan lembaga kursus dan pelatihan melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) masih sangat terbatas jumlahnya.



PERAN STRATEGIS

Berperan penting dalam pelaksanaan pembinaan dan pendampingan program kursus dan pelatihan serta peningkatan kualitas manusia usia 15 – 21 tahun di Indonesia. Untuk itu perlu berkoordinasi dengan dinas pendidikan di seluruh Indonesia dalam skema padanan anggaran kursus dan pelatihan dengan APBD.

Berperan penting dalam peningkatan kompetensi lulusan kursus dan pelatihan agar memiliki daya saing di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja

Berperan penting dalam peningkatan kompetensi lulusan melalui fasilitasi peningkatan kompetensi instruktur dan pengelola kursus dan pelatihan terhadap teknologi terbaru

Berperan penting dalam peningkatan layanan pelaksanaan uji kompetensi bagi lulusan kursus dan pelatihan yang berlisensi BNSP sesuai dengan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi

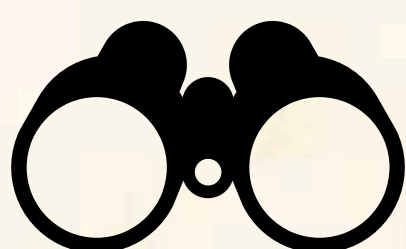
Berperan penting dalam memfasilitasi lulusan kursus dan pelatihan yang akan memasuki jenjang pendidikan tinggi melalui program Rekognisi pembelajaran lampau

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



RENCANA STRATEGIS



VISI

“Membangun rakyat Indonesia menjadi pembelajar seumur hidup, yang unggul, terus berkembang, terampil, mandiri, berkarakter, profesional, dan berdaya saing”

**Renstra Periode Tahun 2020 – 2024*



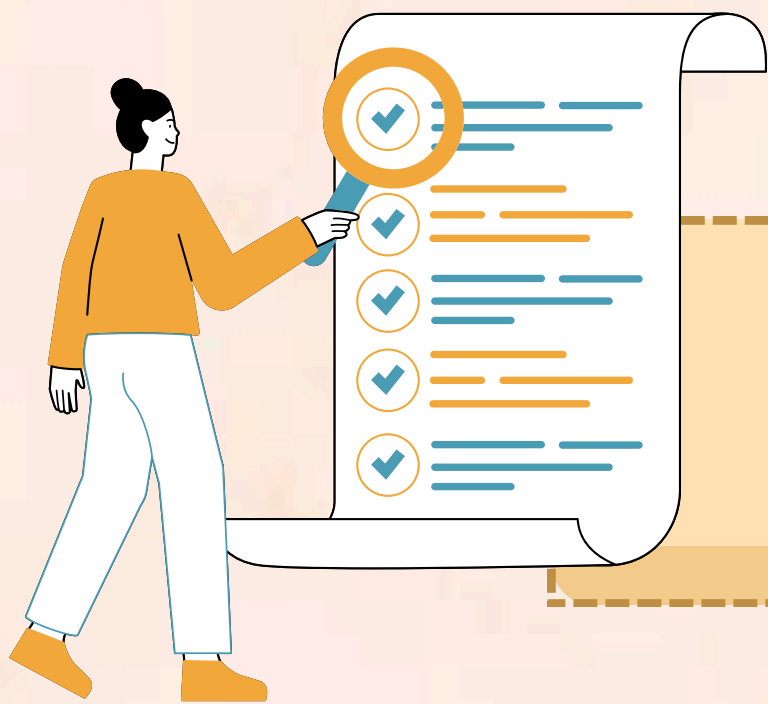
MISI

- Meningkatkan akses layanan kursus dan pelatihan bagi peserta didik dari anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS), menganggur dan berasal dari keluarga kurang mampu
- Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kursus dan pelatihan yang kreatif dan berkarakter
- Meningkatkan layanan lembaga kursus dan pelatihan yang berkualitas
- Mewujudkan tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan yang transparan dan akuntabel

TUJUAN

- Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan DUDIKA
- Penguatan kapasitas dan kapabilitas Lembaga Kursus dan Pelatihan sesuai dengan kebutuhan DUDIKA
- Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus & Pelatihan





PROGRAM PRIORITAS 2020 – 2024

Pada periode tahun 2020-2024, Direktorat Kursus dan Pelatihan memiliki tiga program yang menjadi prioritas nasional. Adapun ketiga program itu adalah sebagai berikut:

No	Nama Program Prioritas	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Alokasi (000)	Target	Alokasi (000)	Target	Alokasi (000)	Target	Alokasi (000)	Target	Alokasi (000)
1	Pendidikan Kecakapan Kerja	52400	241.157.594	50000	200.286.056	30000	131.486.430	31790	278.692.390	51939	227.489.230
2	Pendidikan Kecakapan Wirausaha	16676	106.545.130	16676	88.757.420	19896	124.471.866	23630	295.703.108	23637	147.635.963
3	Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri	974	10.838.042	789	26.307.604	1075	10.842.225	1794	59.683.038	2430	13.247.114

(Sumber: Renstra Direktorat Kursus dan Pelatihan 2020 – 2024)

Rencana Kerja dan Anggaran

Sebagai pengguna anggaran Direktorat Kursus dan Pelatihan , menyusun rencana kerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berikut tabel dan tren alokasi anggaran 2020-2024 ,

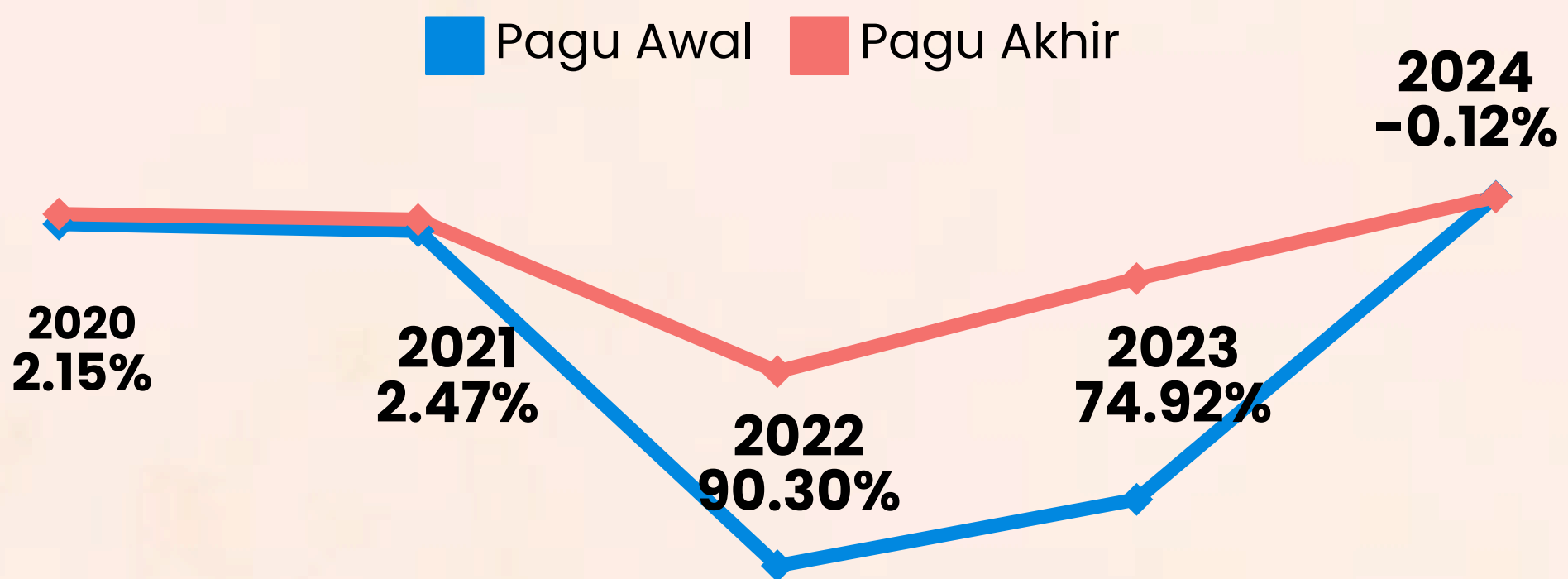
Alokasi Anggaran Direktorat Kursus dan Pelatihan 2020– 2024

(Dalam Jutaan)

	2020	2021	2022	2023	2024
Pagu Awal	392,985	387,121	100,819	157,552	416,610
Pagu Akhir	401,529	396,796	266,801	346,294	416,119
Gap	2.15%	2.47%	90.30%	74.92%	-0.12%

(Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Kursus dan Pelatihan 2020 – 2023)

Tren Alokasi Anggaran 2020 – 2024



sumber: Olahan data LAKIN 2020 – 2023

Tren Alokasi Anggaran Direktorat Kursus dan Pelatihan menunjukkan :

- Baik dari pagu awal maupun pagu akhir adanya kstabilan alokasi anggaran di tahun 2020 dan 2021, dimana garis tren alokasi menunjukkan gap yang tidak terlalu signifikan. Akan tetapi di tahun 2022 pengalokasian anggaran menurun drastis, akan tetapi mulai meningkat kembali di tahun 2022 terus hingga akhir tahun 2024.
- Penurunan alokasi angaran di tahun 2021 dari sebesar Rp.391,958,311,500 menjadi Rp. 183,809,465,500 disebabkan adanya pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia termasuk wilayah Indonesia. Kondisi tersebut merupakan *force majeure* yang menyebabkan terjadinya perubahan peta anggaran, sehingga sebagian besar anggaran direalokasi untuk penanganan dampak pandemi Covid 19.
- Meskipun demikian di tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan kembali anggaran dari Rp. 251,922,608,000 di tahun 2023 dan Rp. 416,364,159,500 di tahun 2024 menunjukkan kondisi negara yang sudah mulai pulih dari pandemi Covid 19, sehingga dana penanganan pandemic sudah bisa dikembalikan lagi untuk membiayai program-program prioritas pemerintah.



- Dilihat dari grafik di atas adanya kesenjangan yang cukup signifikan dari pengalokasian anggaran antara pagu awal dan pagu akhir. Kesenjangan tertinggi terjadi di tahun 2023 yakni sebesar 90,30%. Kesenjangan tersebut menunjukkan adanya pengalokasian anggaran yang sangat miinim di awal tahun, akan tetapi di akhir tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan tersebut merupakan bentuk responsifitas dan keseriusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam menangani merosotnya kondisi perekonomian Indonesia di masa pandemi covid 19. Kementerian Keuangan selanjutnya memberikan penambahan dana realokasi untuk dana bantuan program PKK dan PKW yang berdampak langsung di masyarakat melalui mekanisme BA BUN.
- Mekanisme realokasi dana bantuan melalui BA BUN sudah dilaksanakan sejak tahun 2020, akan tetapi disebabkan kondisi perekonomian Indonesia masih cukup baik di tahun 2020, meskipun terjadi efisiensi dan pemblokiran di tahun 2020 dan 2021, kesenjangan/gap antara pagu awal dan pagu akhir di tahun-tahun tersebut tidak terlalu signifikan.

Rencana Kerja Tahun 2024

B01- Rev. DIPA Ke-1

Kode	Nama Satker / Program / Kegiatan / Output / Sub Output / Komponen / Sub Komponen / Akun / Item	Alokasi	Blokir
690442	DIREKTORAT KURSUS DAN PELATIHAN	416.609.508.000	364.337.062.000
18	DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI	416.609.508.000	364.337.062.000
18.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	388.372.307.000	363.199.662.000
4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	388.372.307.000	363.199.662.000
4278.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	13.247.114.000	630.000.000
4278.QDB.001	Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri	13.247.114.000	630.000.000
4278.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	375.125.193.000	362.569.662.000
4278.QDC.U01	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	227.489.230.000	220.744.362.000
4278.QDC.U02	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	147.635.963.000	141.825.300.000
18.WA	Program Dukungan Manajemen	28.237.201.000	1.137.400.000
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	28.237.201.000	1.137.400.000
4261.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	28.237.201.000	1.137.400.000
4261.EBA.962	Layanan Umum	7.742.032.000	355.400.000
4261.EBA.994	Layanan Perkantoran	20.495.169.000	782.000.000

Sumber: simkeu 2024

B18- Rev. DIPA Ke-18

Kode	Nama Satker / Program / Kegiatan / Output / Sub Output / Komponen / Sub Komponen / Akun / Item	Alokasi	Blokir
690442	DIREKTORAT KURSUS DAN PELATIHAN	416.118.811.000	12.592.328.000
18	DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI	416.118.811.000	12.592.328.000
18.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	388.372.307.000	12.226.784.000
4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	388.372.307.000	12.226.784.000
4278.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	13.247.114.000	724.804.000
4278.QDB.001	Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri	13.247.114.000	724.804.000
4278.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	375.125.193.000	11.501.980.000
4278.QDC.U01	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	227.489.230.000	591.535.000
4278.QDC.U02	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	147.635.963.000	10.910.445.000
18.WA	Program Dukungan Manajemen	27.746.504.000	365.544.000
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	27.746.504.000	365.544.000
4261.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	27.746.504.000	365.544.000
4261.EBA.956	Layanan BMN	10.000.000	0
4261.EBA.962	Layanan Umum	7.732.032.000	78.200.000
4261.EBA.994	Layanan Perkantoran	20.004.472.000	287.344.000

Sumber: simkeu 2024

Awal Tahun 2024, Direktorat Kursus dan Pelatihan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 416.609.508.000 dengan blokir sebesar Rp. 364.337.062.000. Sepanjang tahun 2024 disebabkan adanya perubahan struktur kepemimpinan di Indonesia, maka terjadi sebanyak 18 kali revisi DIPA dan 13 kali revisi POK. Di akhir tahun 2024 Direktorat Kursus dan Pelatihan melaksanakan program dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 416.118.811.000 dengan blokir sebesar Rp.12.592.328.000. Pengalokasian anggaran sebagian besar adalah kepada pelaksanaan program bantuan pemerintah untuk kursus dan pelatihan yakni program Pendidikan Kecakapan Kerja dan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha.

PERJANJIAN KINERJA
2020 – 2024



Sesuai dengan , menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut.

PERJANJIAN KINERJA
2020–2021

Sasaran Kegiatan	IKK	Satuan	Target Renstra		Target PK	
			2020	2021	2020	2021
Meningkatnya Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Berstandar Industri	Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	Orang	100	200	100	100
	Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	Orang	200	200	200	100
	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri	Lembaga	100	100	100	200
Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB	Predikat	BB	BB	-	-
	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran (NKA) atas pelaksanaan RKA/KL satker minimal 93	Nilai	93	93	-	-

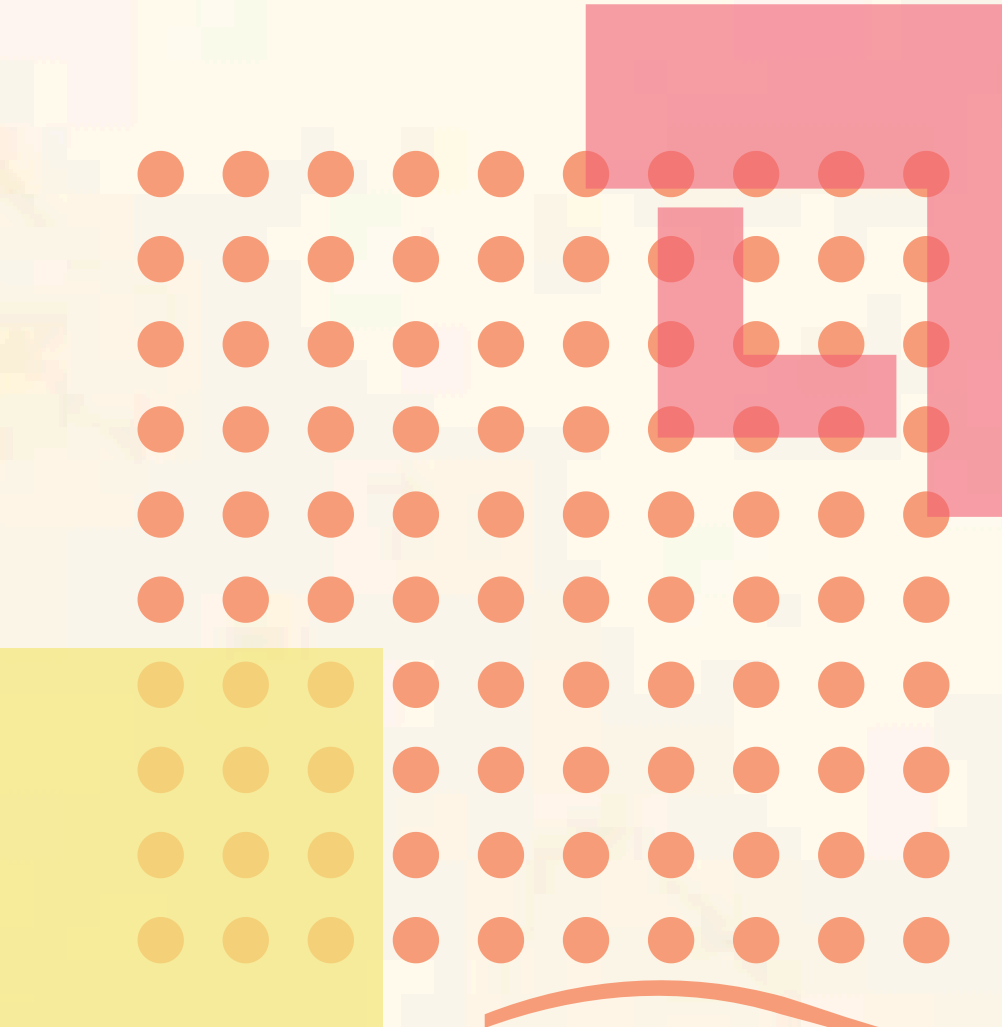
Pada tahun 2022, ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kinerja Rencana 14 Kebudayaan Tahun 2020–2024. Adanya perubahan tersebut turut mengubah target kinerja Direktorat Kursus dan Pelatihan sehingga matriks perjanjian kinerja tahun 2020–2021 di atas tidak bisa dibandingkan dengan perjanjian kinerja tahun 2022–2024. Dalam perubahannya, Direktorat Kursus dan Pelatihan menetapkan tiga sasaran dan empat indikator kinerja kegiatan yang dijelaskan secara rinci melalui tabel di bawah ini:

PERJANJIAN KINERJA
2022-2024

Sasaran Kegiatan	IKK	Satuan	Target Renstra			Target PK		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	IKK 1.1 Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan	Orang	17164	85000	100000	17164	19700	77276
Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	IKK 2.1 Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	Lembaga	1075	1794	2430	1075	1000	1000
Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	3.1 Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan		A	A	A	A	A	A
	IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan		93,5	93,5	93,5	93,5	94	94

sumber: Olahan data LAKIN 2020 - 2023

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2024. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui reviu rencana strategis.



Perjanjian Kinerja Awal
Tahun 2024

Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	77276
[2.0] Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[2.1] Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	1000
[3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[3.1] Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	AA
[3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	99.13

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 28.237.201.000,-
2.	4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Rp. 388.372.307.000,-
Total Anggaran			Rp. 416.609.508.000,-

sumber: dok. perjanjian kinerja spasikita

Perjanjian Kinerja Revisi
Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	Orang	77276
[SK 2] Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	Lembaga	1000
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	Predikat	AA
	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	Nilai	99.13

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp 27.746.504.000
2	4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Rp 388.372.307.000
Total Anggaran			Rp 416.118.811.000

sumber: dok. perjanjian kinerja spasikita

Pada tahun 2024 , melakukan penyesuaian target/anggaran pada Perjanjian Kinerja melalui revisi Perjanjian Kinerja tahun . Hal tersebut dikarenakan adanya blokir *Automatic Adjustment* dan blokir reguler direktorat jenderal pendidikan vokasi.

Penyesuaian alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja dari anggaran sebesar Rp. menjadi Rp. 416.118.811.000

BAB 2

AKUNTABILITAS KINERJA





Akuntabilitas Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024 , Direktorat Kursus dan Pelatihan menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2024 . Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	IKK	Satuan	Target Renstra	Realisasi	%
Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	IKK 1.1 Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan	Orang	77276	82336	106,54%
Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	IKK 2.1 Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	Orang	1000	1293	129,3%
Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	3.1 Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	Lembaga	A	AA	100
	IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	Predikat	94		-

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia kerja. Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yaitu suatu layanan pendidikan dalam bentuk kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang menjadikan bekal untuk berwirausaha dan merintis berdirinya usaha mandiri yang di bimbing oleh mitra usaha. Lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha adalah lulusan PKK atau PKW yang bekerja atau berwirausaha setelah 1 tahun kelulusan dari satuan kursus dan pelatihan yang ber-NPSN yang diselenggarakan minimal 100 jam pelajaran. Kursus dan pelatihan dimaksud adalah jenis keterampilan vokasi yang berbasis dunia kerja. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Berwirausaha adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif. Berwirausaha yang dimaksud pada indikator ini adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Sasaran Kinerja 1



Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

IKK 1.1 Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha.

Anak tidak sekolah (ATS) dikategorikan sebagai anak usia 6 – 21 tahun yang tidak bersekolah karena alasan ekonomi, sosial dan kesehatan. Selain itu anak tidak sekolah juga dikategorikan sebagai anak yang pernah sekolah dan berhenti di tengah proses belajarnya (putus sekolah) disebabkan oleh berbagai alasan baik sosial ekonomi maupun kesehatan. Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia kerja. Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yaitu suatu layanan pendidikan dalam bentuk kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang menjadikan bekal untuk berwirausaha dan merintis berdirinya usaha mandiri yang di bimbing oleh mitra usaha. Kriteria Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah yang layak mendapatkan PKK berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 02 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan Kerja, adalah Anak usia sekolah tidak sekolah (ATS), usia antara 17 s.d. 25 tahun yang masih menganggur, diutamakan dari keluarga tidak mampu atau pernah menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Sedangkan kriteria Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah yang layak mendapatkan PKW berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 01 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha, adalah Anak usia sekolah tidak sekolah (ATS), usia antara 15 s.d. 25 tahun yang masih menganggur, diutamakan dari keluarga tidak mampu atau pernah menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Metode Penghitungan:

I = Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha

Satuan : Orang

Tipe Penghitungan : Nonkumulatif

Unit Pelaksana : Direktorat Kursus dan Pelatihan

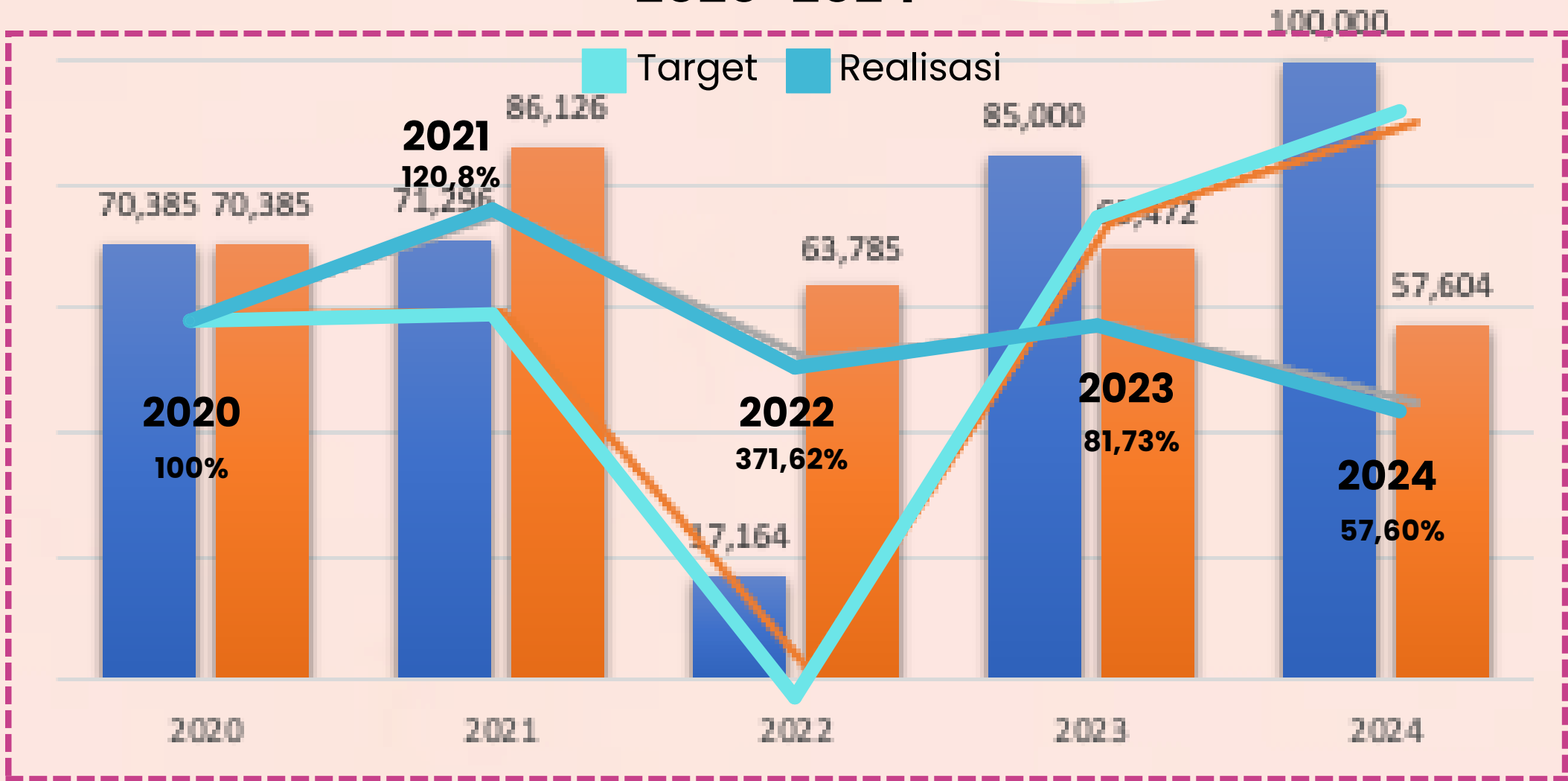
Sumber Data : Dapodik,

<http://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id>, laporan pelaksanaan PKK dan PKW

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode Pengumpulan Data : Tahunan

Tren Capaian Kinerja
2020-2024



Tabel Perbandingan
Target dan Capaian Kinerja 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	Akhir Periode Renstra	%
Target	70385	71296	17164	85000	100000	343845	101,03%
Realisasi	70385	86126	63785	69472	57604	347372	

Pada periode tahun 2020 - 2021, Program pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha jika dilihat perbandingan antara target dan realisasinya, mengalami peningkatan yakni sebanyak 20,8%. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan unitcost per jenis keterampilan sehingga jumlah peserta didik dapat diberikan lebih banyak dari target yang ditetapkan.

Pada periode tahun 2022 - 2024, perbandingan target dan capaian mengalami penurunan yakni dari 371,62% di tahun 2022 menjadi 81,73% di tahun 2023 atau turun sebanyak 289,89 %; kemudian dari 81,73% di tahun 2023 menjadi 57,60% di tahun 2024 atau turun sebanyak 24,13%. Dari data tersebut dapat terlihat gap yang semakin jauh antara target renstra dengan capaian di setiap tahunnya. Kondisi tersebut dimungkinkan dengan adanya realokasi anggaran setiap tahunnya, khususnya realokasi dalam penanganan pandemi covid di tahun 2021 - 2022 yang menyebabkan adanya pergeseran anggaran kepada penanganan dampak covid 19.

Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra yaitu sebesar 343.845 maka capaian sebesar 343.372 telah tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 101,03% atau melampaui sebesar 1,03% dari target yang ditetapkan.

Sasaran Kegiatan meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja adalah untuk memberikan kesempatan bagi anak usia sekolah tidak sekolah usia 15 - 21 tahun untuk memperoleh pendidikan dan kecakapan yang dibutuhkan sehingga memiliki daya saing dan memperbesar peluang untuk dapat memasuki dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja.

Pada tahun 2024, Direktorat Kursus dan Pelatihan menargetkan pemberian bantuan sebanyak kepada **51.939** peserta didik untuk mengikuti program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan **23.637** peserta didik untuk mengikuti program (Pendidikan Kecakapan Wirausaha) PKW. Sehingga total target pemberian bantuan adalah sebanyak **77.276** anak usia sekolah tidak sekolah.

Pada perealisasiannya Direktorat Kursus dan Pelatihan telah memberikan bantuan kepada **57.604** anak usia sekolah tidak sekolah untuk mengikuti program pendidikan kecakapan kerja (PKK) dan kepada **24.732** anak usia sekolah tidak sekolah untuk mengikuti program pendidikan kecakapan wirausaha (PKW). Jika ditotal maka direktorat kursus dan pelatihan di tahun 2024 ini telah memberikan bantuan kepada **82.336** peserta didik, atau sebesar **106,54%**.

Pada program PKK, dari 57.604 yang mendapatkan bantuan pendidikan tersebut, ada 29.831 orang yang telah bekerja (data per 16 Januari 2025) atau presentase serapan lulusan ke dunia kerja adalah sebesar 51,97%. Sedangkan dari 24.732 orang yang mendapatkan bantuan dalam program PKW, 21.111 orang (data per 16 Januari 2025) orang memulai wirausaha atau presentase serapan lulusan yang berwirausaha adalah sebesar 85,36%. Dan angka presentase serapan lulusan PKK dan PKW ini terus berkembang seiring dengan terserapnya lulusan program PKK dan PKW di DUDIKA

Berikut ini adalah program-program pendukung tercapainya IKK 1.1 Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha.

Program Pendidikan Kecakapan Kerja

Target 2024 : 51.939 orang
Capaian 2024 : 57.604 orang



Definisi Program, Output dan Outcome Program

Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah layanan pendidikan dalam bentuk kursus dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia kerja. Sasaran program PKK adalah peserta didik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. usia 17 s.d. 25 tahun; 2. belum bekerja (menganggur); 3. anak usia sekolah tidak sekolah (ATS) dan diprioritaskan pernah menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Proses pembelajaran Program PKK dapat dilaksanakan secara "blended learning" (daring dan luring) untuk pembelajaran teori, sedangkan pembelajaran praktik dilaksanakan secara luring, berikut cakupan masing-masing proses pembelajaran.

Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang disusun oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan berbasis SKL/KKNI/SKKNI. Lembaga penyelenggara dapat menambah dan mengembangkan materi sesuai dengan kebutuhan DUDIKA. Bagi jenis keterampilan yang belum ada kurikulum dari Direktorat Kursus dan Pelatihan, maka lembaga dapat menggunakan acuan atau pedoman dari Kementerian/Lembaga lain dan/atau dari DUDIKA.

Uji kompetensi dilaksanakan di LSK atau LSP-P3 bagi jenis keterampilan yang belum ada LSKnya. Uji kompetensi yang tidak ada LSK atau LSP-P3, dapat diselenggarakan di LSP-P2 (DUDIKA). Pelaksanaan uji kompetensi tersebut di atas wajib dilaporkan ke Direktorat Kursus dan Pelatihan melalui aplikasi.

Lembaga yang Mengakses Program PKK Tahun 2024

Jumlah lembaga yang mengakses aplikasi Program PKK tahun 2024 dapat diketahui dari jumlah lembaga yang sedang proses pengisian (tidak tuntas) ditambah dengan jumlah lembaga yang mengajukan proposal di aplikasi Program PKK. Jumlah proses pengisian (tidak tuntas) adalah jumlah lembaga yang melakukan pengisian proposal di aplikasi Program PKK tetapi tidak sampai ke tahap pengajuan proposal. Sedangkan jumlah pengajuan proposal adalah jumlah proposal yang telah diverifikasi, dan jumlah lembaga adalah jumlah lembaga yang mengajukan proposal di aplikasi.

Tabel Lembaga yang Mengakses Program PKK Tahun 2024

TIPE	PROSES PENGISIAN (TIDAK TUNTAS)		PENGAJUAN			
	LEMBAGA	%	PROPOSAL	%	LEMBAGA	%
Silver	1.297	86%	4.044	96%	2.543	95%
Gold	125	8%	128	3%	85	3%
Platinum	79	5%	42	1%	37	1%
NA*	241					
TOTAL	1.744	100%	4.214	100%	2.665	100%

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3.840 lembaga yang mengakses Program PKK kategori silver, dan 2.543 lembaga yang sampai ke proses pengajuan proposal. Sejumlah 2.543 lembaga tersebut, mengajukan sebanyak 4.044 proposal. Hal ini terjadi karena 2 (dua) alasan, yaitu (1) usulan proposal yang sudah ditolak, diajukan kembali oleh lembaga dengan melengkapi dan memperbaiki proposal yang telah ditolak tersebut berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikator; (2) lembaga yang telah selesai melaksanakan Program PKK tahap 1 dan telah terverifikasi (disetujui) laporan akhirnya, dapat mengajukan Program PKK tahap 2.

Pada Tabel diatas dapat diketahui juga bahwa terdapat 210 lembaga yang mengajukan Program PKK kategori Gold dan hanya 85 lembaga yang sampai pada pengajuan proposal. Sejumlah 85 lembaga tersebut mengajukan sebanyak 128 proposal.

Pada Tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 116 lembaga yang mengajukan Program PKK kategori Platinum dan hanya 37 lembaga yang sampai pada pengajuan proposal. Sejumlah 37 lembaga tersebut mengajukan sebanyak 42 proposal.

Rendahnya persentase lembaga yang sampai pada tahap pengajuan proposal disebabkan karena ketidak siapan lembaga untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam isian proposal Program PKK.

Proposal yang telah diajukan oleh lembaga akan dinilai Tim Verifikator berdasarkan standar penilaian yang sesuai dengan Petunjuk Teknis Program PKK Tahun 2024.

Tabel Status Pengajuan Proposal Program PKK Berdasarkan Tipe

No.	STATUS	SILVER		GOLD		PLATINUM	
		PROPOSAL	%	PROPOSAL	%	PROPOSAL	%
1	Diterima	2300	56.87%	40	31.25%	21	50.00%
2	Ditolak	1744	43.13%	88	68.75%	21	50.00%
TOTAL		4044	100%	128	100%	42	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada pengajuan proposal program PKK tipe silver lebih banyak yang mengakses dengan jumlah proposal yang diterima sebanyak 2.300 (56.87%). Jumlah tersebut terdiri dari 1.546 proposal ditetapkan sebagai penerima bantuan satu kali dan 367 proposal ditetapkan sebagai penerima bantuan dua kali pada tahun anggaran 2024.

Jika dibandingkan dengan program PKK tipe Silver, jumlah pengajuan proposal program PKK tipe Gold lebih banyak proposal yang ditolak sebanyak 88 (68,75%) daripada proposal yang diterima sebanyak 40 (31.25%). Jumlah tersebut terdiri dari 36 proposal ditetapkan sebagai penerima bantuan satu kali dan 2 proposal ditetapkan sebagai penerima bantuan dua kali pada tahun anggaran 2024.

Pengajuan proposal program PKK tipe platinum yang diterima dan yang ditolak jumlahnya sama masing-masing sebanyak 21 (50%).

Tabel Kategori Lembaga Penyelenggara Program PKK

NO	KATEGORI LEMBAGA	JUMLAH LEMBAGA	%
1	LKP	1876	79,46%
2	PKBM	368	15,59%
3	SMK	90	3,81%
4	Yayasan	18	0,76%
5	SKB	9	0,38%
Jumlah		2361	100%

Berdasarkan data tersebut di atas, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) masih mendominasi sebagai lembaga penyelenggara program PKK, yaitu sebanyak 1.876 lembaga (79,46%). Jumlah lembaga penyelenggara program PKK berkurang karena ada beberapa lembaga yang mengundurkan diri sebanyak 10 lembaga terdiri dari 5 LKP, 4 SMK, dan 1 PKBM dengan jumlah peserta didik 203 orang. Pada umumnya, alasan lembaga yang mengundurkan diri dikarenakan tidak dapat memenuhi jumlah peserta didik yang ditetapkan.

Tabel Usia Peserta Didik Program PKK Kategori Silver

Rumpun Keterampilan	Usia								
	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Industri dan Kerajinan	85	653	770	596	468	457	465	444	170
Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	23	341	341	275	199	162	172	178	69
Komunikasi dan Kepribadian	3	3	3	3	2	1	2	1	1
Manajemen	1	29	29	29	23	13	26	22	16
Pariwisata	18	188	188	152	108	103	108	87	30
Seni, Budaya dan Sosial	33	302	302	293	215	195	225	206	78
Teknologi dan Rekayasa	1	19	19	9	18	21	12	13	15
Teknologi Informasi dan Digital	25	316	316	256	227	197	260	216	88
Transportasi	3	46	46	31	16	17	11	11	3
Jumlah Total	192	1897	2014	1644	1276	1166	1281	1178	470

Tabel Usia Peserta Didik Program PKK 2024 Kategori Gold

Rumpun Keterampilan	Usia								
	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Industri dan Kerajinan	3	6	11	10	8	2	5	35	2
Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	-	4	15	18	17	11	6	5	10
Seni, Budaya dan Sosial		3	1	2	1	3	5	3	4
Teknologi dan Rekayasa	-	7	13	7	3	5	5	6	4
Teknologi Informasi dan Digital	1	1	4	4	2	1		1	1
Total	4	21	44	41	31	22	21	50	21

Tabel Usia Peserta Didik Program PKK 2024 Kategori Platinum

Rumpun Keterampilan	Usia								
	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Pariwisata	-	26	30	25	14	17	12	7	4
Teknologi Informasi dan Digital	-	3	13	28	18	16	9	8	3
Total	0	29	43	53	32	33	21	15	7

Output Program PKK

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Program PKK 2024, bahwa lembaga penyelenggara diberikan waktu maksimal satu tahun untuk memperbarui tracer study alumni peserta didik terhitung sejak pelaksanaan uji kompetensi. Karenanya data tracer study akan terus berkembang seiring dengan pembaruan yang dilakukan oleh lembaga. Tabel berikut adalah data tracer study yang diambil pada tanggal 8 Januari 2025.

Tabel Penyerapan Lulusan di Dunia Kerja Program PKK kategori Silver

NO	RUMPUN KETERAMPILAN	BEKERJA	BELUM BEKERJA	MAGANG	TOTAL
1	Agribisnis dan Agroteknologi		40	20	60
2	Industri dan Kerajinan	14758	5975	2667	23400
3	Keolahragaan	15	7	38	60
4	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	4044	2078	1143	7265
5	Komunikasi dan Kepribadian		65	70	135
6	Manajemen	158	285	127	570
7	Pariwisata	1274	1075	1494	3843
8	Seni, Budaya dan Sosial	3712	1964	1650	7326
9	Teknologi dan Rekayasa	260	437	246	943
10	Teknologi Informasi dan Digital	3327	4989	2662	10978
11	Transportasi	340	345	142	827
Total		27.888	17260	10259	55407



Merincermati Tabel di atas diperoleh data 27.888 (50.33%) peserta didik sudah bekerja. Apabila mengacu pada Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program PKK 2024 kategori silver, untuk indikator outcome keterserapan peserta didik di dunia kerja “minimal 60% lulusan dalam 1 tahun setelah selesai uji kompetensi bekerja di dunia kerja”, sehingga dengan hasil 50.33% dapat dinyatakan bahwa Program PKK 2024 saat ini belum mencapai indikator minimal outcome, namun data di atas masih dapat berubah seiring dengan pembaruan yang dilakukan oleh lembaga selama satu tahun ke depan.

Tabel Penyerapan Lulusan di Dunia Kerja Program PKK kategori Gold

NO	RUMPUN KETERAMPILAN	BEKERJA	BELUM BEKERJA	MAGANG	TOTAL
1	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	276	59	42	377
2	Seni, Budaya dan Sosial	96	35	19	150
3	Teknologi dan Rekayasa	174	183	74	431
Total		546	277	135	958

Mencermati tabel di atas diperoleh data 546 (56.99%) peserta didik sudah bekerja. Apabila mengacu pada Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program PKK 2024 kategori gold, untuk indikator outcome keterserapan peserta didik di dunia kerja “minimal 70% lulusan dalam 1 tahun setelah selesai uji kompetensi bekerja di dunia kerja”, sehingga dengan hasil 56.99% dapat dinyatakan bahwa Program PKK 2024 saat ini belum mencapai indikator minimal outcome, namun data di atas masih dapat berubah seiring dengan pembaruan yang dilakukan oleh lembaga selama satu tahun ke depan.

Tabel Penyerapan Lulusan di Dunia Kerja Program PKK kategori Platinum

NO	RUMPUN KETERAMPILAN	BEKERJA	BELUM BEKERJA	MAGANG	TOTAL
1	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	7	43		50
2	Pariwisata	205	196	186	587
3	Teknologi dan Rekayasa	104	171	28	303
4	Teknologi Informasi dan Digital		36		36
5	Transportasi	3	57		60
Total		319	503	214	1036

Pada tabel di atas menunjukkan 503 (48.55%) peserta didik sudah bekerja, dan 214 (20.65%) peserta didik magang. Apabila mengacu pada Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program PKK 2024 kategori platinum, untuk indikator outcome keterserapan peserta didik di dunia kerja “minimal 90% lulusan dalam 1 tahun setelah selesai uji kompetensi bekerja di dunia kerja”, sehingga dengan hasil 48.55% dapat dinyatakan bahwa Program PKK 2024 saat ini belum mencapai indikator minimal outcome, namun data di atas masih dapat berubah seiring dengan pembaruan yang dilakukan oleh lembaga selama satu tahun ke depan.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan dan Penggandaan Pedoman/Kurikulum, Bahan ajar Penyelenggaraan Program PKK;

- Sosialisasi / Koordinasi Penyelenggara Program PKK;
- Penilaian dan Penetapan Proposal Penyelenggara Program PKK;
- Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Program PKK;
- Pemberian Bantuan Pendidikan Kecakapan Kerja;
- Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Program bantuan PKK;
- Verifikasi dan pengolahan Laporan;
- Manajemen dukungan pengelolaan Program bantuan;
- Penyusunan, Penggandaan dan Sosialisasi Best Practice PKK.

Tahapan proses yang harus dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara dalam mengakses program bantuan PKK adalah:

- Lembaga mengajukan proposal melalui aplikasi program PKK;
- Proposal akan di nilai oleh tim verifikator (sudah di tetapkan oleh POKJA PKK), dan memberikan hasil rekomendasi sebagai dasar pertimbangan KPA, PPK dan Pejabat di lingkungan Dit.suslat dalam melakukan pleno penetapan calon penyelenggara program PKK dan dalam menetapkan Surat Keputusan (SK) penerima bantuan pemerintah program PKK;
- PPK dan lembaga penerima program PKK menandatangani Surat Perjanjian kerjasama (SPK), dengan jangka waktu pelaksanaan dan pelaporan sampai tanggal XXX Desember 2024;
- Bimbingan teknis penerima bantuan program PKK secara luring dan daring;
- Penyaluran dana bantuan program PKK melalui transfer langsung ke rekening atas nama lembaga;
- Lembaga penyelenggara melaksanakan program PKK (seleksi peserta didik, sosialisasi pelaksanaan program, menyiapkan sarana prasarana, instruktur, rencana pembelajaran, serta bahan ajar);
- Lembaga penyelenggara wajib melaksanakan pembelajaran, uji kompetensi, menyalurkan lulusan untuk bekerja, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (termasuk pembuatan video best practice) pada akhir program.

Gambaran Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan dan Penggandaan Pedoman/Kurikulum, Bahan ajar Penyelenggaraan Program PKK

a. Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah PKK Tahun 2025

Dalam upaya mempersiapkan program PKK tahun berikutnya maka Petunjuk Teknis tahun 2025 mulai disusun pada tahun anggaran 2024. Tujuannya agar akhir tahun 2024 Petunjuk Teknis Program PKK tahun 2025 sudah terbit sehingga di awal tahun 2025 program PKK bisa langsung berjalan. Penyusunan petunjuk teknis, melibatkan unsur yaitu: Direktorat Kursus dan Pelatihan; Dinas Pendidikan Kab./Kota; Satuan Pendidikan vokasi pelaksana program PKK; Tim Verifikator; Akademisi.

b. Penyusunan Pedoman/Bahan Ajar Pendukung Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)

Penyusunan pedoman pendukung program PKK bertujuan untuk membantu calon penyelenggara Program PKK maupun warga masyarakat khususnya calon peserta didik dalam mengakses dan menyelenggarakan program PKK.

Penyusunan pedoman pendukung program PKK melibatkan berbagai unsur yaitu: Direktorat Kursus dan Pelatihan; Konsorsium Kursus dan Pelatihan; Organisasi Mitra Kursus dan Pelatihan; Lembaga kursus dan pelatihan; Praktisi.

Kegiatan Penyusunan Pedoman Pendukung Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah untuk memberikan panduan kepada penyelenggara program PKK dalam:

- Merekrut Peserta Didik;
- Menjalin kemitraan dengan DUDIKA;
- Menyusun pertanggungjawaban keuangan;
- Menyusun video best practice.

Metode pelaksanaan penyusunan tersebut diselenggarakan dalam bentuk kombinasi antara forum group discussion (FGD) dan workshop yang melibatkan keenam unsur tersebut.

Sosialisasi / Koordinasi Penyelenggara Program PKK

Dalam konteks penyelenggaraan program PKK, koordinasi dilakukan antara Direktorat Kursus dan Pelatihan dengan berbagai pemangku kepentingan yang akan terlibat baik langsung maupun tidak langsung pada penyelenggaraan program PKK. Pemangku kepentingan dimaksud antara lain:

- Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di 34 provinsi di seluruh Indonesia;
- Calon Lembaga Penyelenggara Program PKK di seluruh Indonesia;
- Industri dan Dunia Kerja (Iduka);
- Organisasi Mitra;
- Tim verifikator Ditsuslat.

Sosialisasi dan koordinasi dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu;

1. Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program PKK;
2. Sosialisasi Kebijakan Direktorat;
3. Koordinasi Peran Mitra;

Metode pelaksanaan Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program PKK, Sosialisasi Kebijakan Direktorat, dan Koordinasi Peran Mitra PKK diselenggarakan secara hybrid (luring dan daring) baik dalam bentuk seminar baik secara daring/webinars melalui media video conference dan luring dalam bentuk forum group discussion (FGD) yang melibatkan pemangku kepentingan tersebut.

Penilaian dan Penetapan Proposal Penyelenggara Program PKK

Dalam rangka menjaring lembaga penyelenggara program PKK yang layak dan kredibel maka diperlukan verifikasi terhadap kelayakan calon lembaga penyelenggara. Verifikasi awal terhadap kelayakan dimaksud yaitu dengan cara verifikasi dan penilaian terhadap proposal usulan dari calon lembaga penyelenggara. Verifikasi proposal dilakukan oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh Direktur Kursus dan Pelatihan.

Tim Verikator berasal dari unsur Direktorat Kursus dan Pelatihan, akademisi, organisasi mira, praktisi.

Metode pelaksanaan verifikasi proposal program PKK dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring). Mekanismenya adalah tim verifikator melakukan verifikasi dan penilaian proposal melalui aplikasi e-banper secara daring,

Kemudian dilakukan rapat pleno hasil penilaian yang diselenggarakan dalam bentuk forum group discussion (FGD) dengan melibatkan tim verifikator yang memberikan rekomendasi kepada Direktur Kursus dan Pelatihan, PPK, Kasubbag Tata Usaha, Ketua Tim, Widyaprada Ahli Utama, dan PPSPM di lingkungan Ditsuslat untuk ditetapkan menjadi calon penyelenggara program PKK yang dilakukan secara luring.

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Program PKK

a. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Program PKK

Dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan program PKK maka terhadap lembaga penyelenggara perlu diberikan pembekalan/bimbingan teknis. Kegiatan bimbingan teknis bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada lembaga penyelenggara program PKK dalam rangka pelaksanaan program PKK agar sesuai dengan target yang diharapkan dan akuntabel dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Beberapa materi yang akan disampaikan dalam bimbingan teknis penyelenggara program PKK adalah sebagai berikut:

- Akuntabilitas program PKK;
- Mekanisme penyampaian laporan teknis dan keuangan;
- Uji kompetensi;
- Penilaian Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan
- Optimalisasi potensi karis bagi lulusan Kursus dan Pelatihan;
- Perspektif dari pusat pasar kerja;
- Pedoman Pembuatan Video Best Practice Program PKK;
- Praktik Baik penyelenggaraan program Pendidikan Kecakapan Kerja.

Metode pelaksanaan bimbingan teknis tersebut diselenggarakan baik secara daring/webinars melalui media video conference dan luring dalam bentuk forum group discussion (FGD) dan workshop dengan peserta dari lembaga yang sudah ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara program PKK berdasarkan hasil penilaian dan rapat pleno tim penilai. Dalam Bimtek tersebut akan dilaksanakan juga penandatanganan akad kerjasama pelaksanaan program PKK antara lembaga penyelenggara dengan Direktorat Kursus dan Pelatihan.

b. Pengimbasan Praktik Baik Penyelenggara Program PKK

Kegiatan Pengimbasan Praktik Baik Penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dilaksanakan sebagai upaya agar penyelenggaraan program PKK dapat berjalan dengan baik dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Tujuan kegiatan “Pengimbasan Praktik Baik Penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)” adalah:

1. Mengidentifikasi dan memahami praktik baik yang sudah terbukti efektif dalam penyelenggaraan program PKK.
2. Menggunakan lembaga pengimbas sebagai contoh untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program PKK.
3. Meningkatkan inovasi dan efisiensi operasional, sehingga lembaga penyelenggara program PKK dapat memiliki wawasan dan strategi baru dalam pelaksanaan program PKK yang lebih baik.

Metode pelaksanaan Pengimbasan Praktik Baik Penyelenggara Program PKK diselenggarakan secara luring dalam bentuk forum group discussion (FGD) dan workshop dengan pembahasan diantaranya mengenai:

- Kebijakan Direktorat Kursus dan Pelatihan;
- Praktik Baik Penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK);
- Supervisi dan Pendampingan bagi Lembaga Penyelenggara Program PKK 2024;
- Evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan program PKK.



Pemberian Bantuan Pendidikan Kecakapan Kerja

Metode pelaksanaan dalam bentuk pemberian bantuan langsung kepada lembaga penyelenggara program PKK berdasarkan hasil seleksi/penilaian dan rapat pleno yang menetapkan lembaga tersebut layak sebagai penerima bantuan.

Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Program bantuan PKK

Dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan penyaluran dana bantuan program PKK maka perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap pelaksanaan program PKK yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara.

Metode pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi ini diselenggarakan dalam 2 cara yaitu:

- Dengan melakukan monitoring proses pembelajaran setiap hari secara online melalui aplikasi Program PKK;
- Dalam bentuk penugasan langsung ke petugas dari Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka monitoring, evaluasi dan supervisi penyelenggaraan program PKK yang berlangsung di lembaga penyelenggara. Monitoring ini dilaksanakan selama berlangsungnya pembelajaran dan pasca pembelajaran program PKK.



Verifikasi dan pengolahan Laporan

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program PKK dan memastikan pertanggungjawaban lembaga penyelenggara program PKK tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu dilaksanakan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan lembaga penyelenggara program PKK.

Evaluasi program PKK dilaksanakan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan program PKK di lembaga penyelenggara. Berdasarkan hasil evaluasi ini diharapkan penyelenggaraan program PKK pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik.

Metode pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi 2(dua) yaitu:

Verifikasi terhadap laporan pelaksanaan kegiatan program PKK yang sudah dilaporkan dalam aplikasi e-banper dilakukan secara daring;

Sedangkan evaluasi lembaga penyelenggara program PKK dilakukan dengan metode luring dalam bentuk forum group discussion (FGD).

Manajemen dukungan pengelolaan Program bantuan

Dalam rangka penyaluran dana bantuan program PKK maka diperlukan adanya manajemen pengelolaan untuk mendukung pelaksanaan program menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel. Manajemen pengelolaan dana bantuan PKK meliputi verifikasi awal terhadap proposal yang diajukan oleh lembaga yang mengakses program PKK.

Pengelolaan tersebut membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten sehingga diperlukan adanya kelompok kerja dan tim teknis yang terbentuk dalam sekretariat program bantuan PKK yang dibentuk selama masa penyaluran bantuan hingga pelaporan selesai dilaksanakan.

Penyusunan, Penggandaan dan Sosialisasi Best Practice PKK

Sebagai bentuk pertanggungjawaban program PKK, lembaga penyelenggara wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk video best practices penyelenggaraan program PKK. Video tersebut harus menggambarkan penyelenggaraan program PKK mulai dari input, process, output dan outcome, termasuk didalamnya sukses story peserta didik program PKK.

Video Best practice yang sudah disampaikan akan dikurasi/dinilai kelayakannya oleh tim juri yang telah ditunjuk.

Tim juri tersebut berasal dari unsur:

- Direktorat Kursus dan Pelatihan;
- Pusat Data dan Informasi Pendidikan;
- Akademisi;
- Praktisi sinematografi dan perfilman.

Metode pelaksanaan penilaian video best practice dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi program PKK, sedangkan rapat pleno dan penetapan dilaksanakan dalam bentuk forum group discussion (FGD) dan pelatihan/workshop yang melibatkan keempat unsur tersebut.

Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha

Target 2024 : 23.637 orang
Capaian 2024: 24.732 orang



Definisi Program, Output dan Outcome Program

Program PKW adalah layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkan sikap mental, kemampuan kreatif, inovatif dalam mengembangkan kemampuan potensi diri dan lingkungan sebagai bekal berwirausaha dengan dibimbing oleh mitra.

Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha merupakan bantuan beasiswa untuk mengikuti kursus dan pelatihan khususnya bagi anak usia sekolah tidak sekolah (ATS) usia 15 – 25 tahun agar mereka dapat mengembangkan potensi diri, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya masing-masing

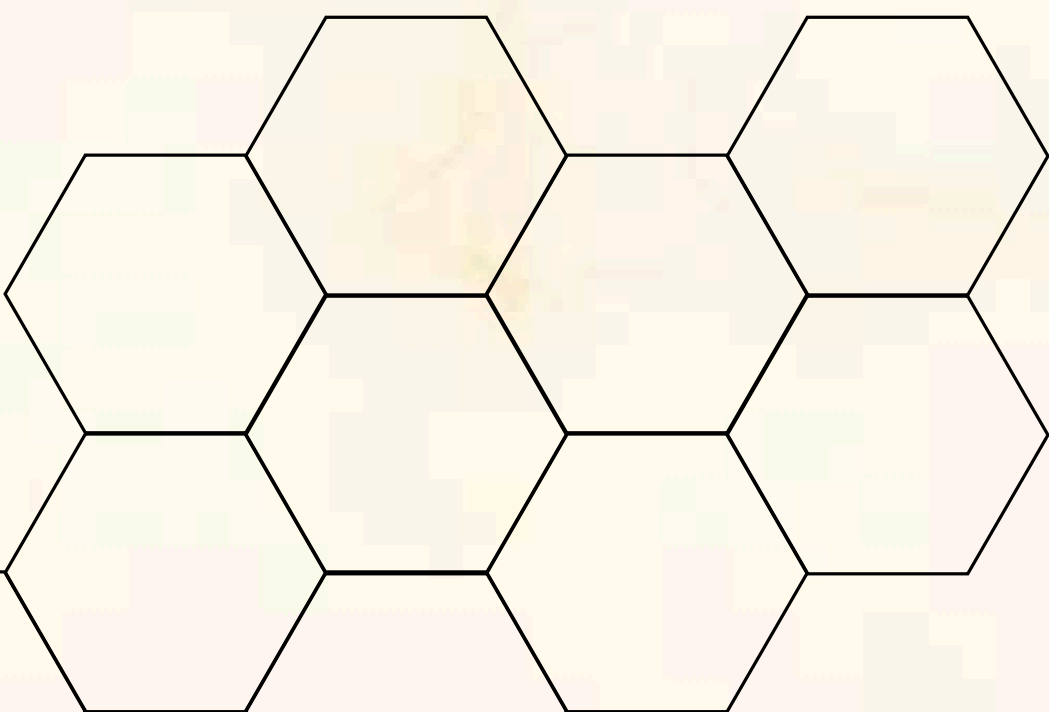
Tujuan penyelenggaraan Program PKW adalah Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap berwirausaha bagi anak usia sekolah tidak sekolah melalui kursus dan pelatihan; Menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengembangkan kemampuan potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha; Memfasilitasi anak usia sekolah tidak sekolah dalam merintis usaha mandiri yang dibimbing oleh mitra usaha. Target sasaran program PKW pada tahun 2024 adalah 21.847, namun realisasinya pada tahun 2024 adalah sebanyak 24.732 peserta didik sudah mendapatkan manfaat dari program ini.

Output

Peserta didik mengikuti pembelajaran dengan tuntas

Outcome

lulusan dapat merintis usaha dalam waktu 12 bulan setelah mengikuti program PKW



Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- Penyusunan Petunjuk Teknis
- Sosialisasi Program
- Penilaian, Verifikasi, dan Penetapan Proposal
- Pemberian Bantuan
- Bimbingan Teknis Lembaga Penerima Program
- Monitoring dan Evaluasi
- Evaluasi dan Verifikasi Laporan Akhir

Gambaran Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan Petunjuk Teknis

Dalam rangka mendukung kelancaran program pelaksanaan Program Pendidikan Wirausaha (PKW) maka mulai disusun Petunjuk Teknis Program PKW tahun 2025 dengan mempertimbangan masukan dari berbagai unsur. Penyusunan petunjuk teknis, melibatkan unsur yaitu:

- Direktorat Kursus dan Pelatihan;
- Dinas Pendidikan Kab./Kota;
- Satuan Pendidikan vokasi pelaksana program PKW;
- Tim Verifikator;
- Akademisi.

Metode pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan pedoman tersebut diselenggarakan dalam bentuk forum group discussion (FGD) yang melibatkan kelima unsur tersebut.



Sosialisasi / Koordinasi Penyelenggara Program PKW

Koordinasi dilakukan antara Direktorat Kursus dan Pelatihan dengan berbagai pemangku kepentingan yang akan terlibat baik langsung maupun tidak langsung pada penyelenggaraan program PKW. Pemangku kepentingan dimaksud antara lain:

- Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di 34 provinsi di seluruh Indonesia;
- Calon Lembaga Penyelenggara Program PKW di seluruh Indonesia;
- Mitra Usaha;
- Organisasi Mitra;
- Tim verifikator Ditsuslat

Penilaian, Verifikasi, dan Penetapan Proposal Penyelenggara Program PKW

Kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi proposal yang telah diinput oleh lembaga pengusul program PKW, mendapatkan rekomendasi daftar lembaga calon penerima program PKW dan menetapkan lembaga calon penerima bantuan program PKW tahun 2024

Verifikasi awal terhadap kelayakan dimaksud yaitu dengan cara verifikasi dan penilaian terhadap proposal usulan dari calon lembaga penyelenggara. Verifikasi proposal dilakukan oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh Direktur Kursus dan Pelatihan.

Tim Verikator berasal dari unsur:

- Direktorat Kursus dan Pelatihan;
- Akademisi;
- Organisasi Mitra;
- Praktisi.

Pemberian Bantuan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha

Direktorat Kursus dan Pelatihan akan memberikan dana bantuan bagi calon lembaga penyelenggara yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan. Proses penyaluran dana bantuan pemerintah program PKW dilakukan melalui transfer langsung ke rekening atas nama lembaga penerima bantuan.

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Program PKW

Dalam rangka penyelenggaraan program yang akuntabel baik pelaksanaan teknis maupun laporan pertanggungjawaban kegiatan maka dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Program PKW. Informasi yang akan dibagikan lewat bimbingan teknis ini mencakup teknis pembelajaran program PKW, administrasi keuangan termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan, video best practice dan bahan ajar PKW dan aplikasi e-banper program PKW. Diharapkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Penyelenggaraan Program PKW dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Peserta kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Program PKW ini adalah sebagai berikut:

1. Lembaga penerima bantuan pemerintah program PKW,
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
3. Dudika,

Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan penyaluran dana bantuan program PKW maka perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap pelaksanaan program PKW yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara.

Metode pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi ini diselenggarakan dalam 2 cara yaitu:

1. Dengan melakukan monitoring proses pembelajaran setiap hari secara online melalui aplikasi Program PKW;
2. Dalam bentuk penugasan langsung ke petugas dari Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka monitoring, evaluasi dan supervisi penyelenggaraan program PKW yang berlangsung di lembaga penyelenggara. Monitoring ini dilaksanakan selama berlangsungnya pembelajaran dan pasca pembelajaran program PKW.

Verifikasi dan Pengolahan Laporan

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program PKW dan memastikan pertanggungjawaban lembaga penyelenggara program PKW tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu dilaksanakan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan lembaga penyelenggara program PKW.

Evaluasi program PKW dilaksanakan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan program PKW di lembaga penyelenggara. Berdasarkan hasil evaluasi ini diharapkan penyelenggaraan program PKW pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik.





Hambatan dan Kendala Program

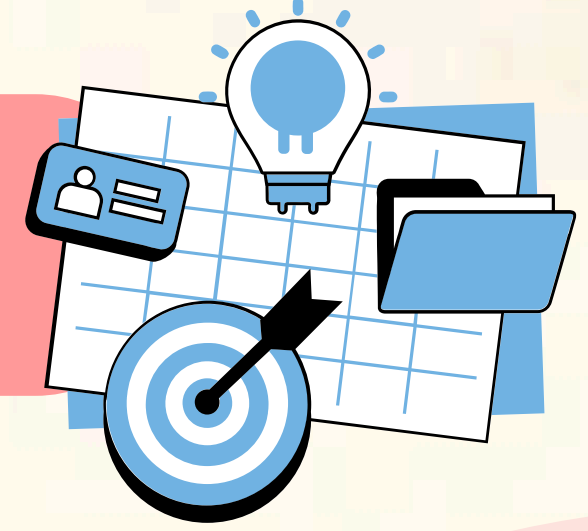
ADMINISTRASI

- Masih terdapat lembaga yang belum menyelesaikan laporan;
- Masih terdapat lembaga yang belum memahami teknis penggunaan aplikasi dan pelaporan;
- Masih terdapat kekurangan terhadap laporan yang disampaikan;
- Masih terdapat lembaga yang sedikit tingkat keberhasilan rintisan usaha (pendapatan belum memenuhi UMR setempat)
- Masih terdapat lembaga yang belum menyampaikan video best practice dan bahan ajar;
- Masih terdapat video yang belum sesuai ketentuan pedoman penyusunan video praktik baik (best practice) dan bahan ajar;

SUBSTANSI PROGRAM

- Keterbatasan Sumber Daya
- Keterbatasan fasilitas dan sarana pelatihan yang memadai, seperti ruang kelas, alat praktik, atau peralatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industri, dapat menghambat pelaksanaan pelatihan.
- Masih rendahnya kompetensi instruktur dan proses pembelajaran, bahwa instruktur tidak hanya harus disiplin, semangat dan memiliki cara mengajar yang kreatif, inovatif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini serta perkembangan industri sehingga dapat mempengaruhi hasil pelatihan bagi peserta didiknya.
- Kompetensi peserta didik adalah kemampuan yang harus dimiliki/dicapai siswa setelah mengikuti pembelajaran. Sejauh mana peserta didik mampu memahami pelajaran yang telah diajarkan dapat diukur melalui penilaian formatif (assessment). Penilaian formatif dilakukan secara berkala selama proses pembelajaran berlangsung, tidak hanya di akhir pelajaran. Tujuannya adalah untuk mengukur pemahaman peserta didik dan memberikan umpan balik untuk perbaikan.
- Kesulitan Akses bagi Peserta
- Peserta yang kesulitan mengakses program pelatihan (terutama pada area 3T, kemiskinan ekstrem, dll) karena jarak, biaya, bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ini.
- Lemahnya Pemantauan Pasca Kursus dan Pelatihan
- Meskipun dalam aplikasi program PKK terdapat menu untuk mengisi dan mengupdate tracer study peserta didik, tanpa pemantauan yang tepat setelah peserta menyelesaikan program PKK, sulit untuk mengetahui apakah peserta benar-benar memperoleh pekerjaan yang sesuai atau berhasil mengaplikasikan keterampilan yang telah dipelajari.
- Tantangan dalam Integrasi Program dengan Sistem Pendidikan Formal
- Perlu kolaborasi yang efektif antara program pendidikan kecakapan kerja dengan sekolah formal (misal; SMK), sehingga lulusan SMK dapat memiliki tambahan keterampilan untuk menunjang keberkerjaan di DUDIKA

Strategi



- Pelaksanaan program melalui aplikasi banper PKW;
- Melaksanakan Bimtek Implementasi/Pendampingan bagi lembaga penyelenggara program bantuan PKW yang memiliki kendala atau belum memahami teknis pelaporan;
- Diberikan sanksi apabila tidak memperbaiki laporan sesuai arahan (Tidak direkomendasikan kembali untuk menerima bantuan program PKW ditahun selanjutnya)
- Mengingatkan lembaga untuk memperbarui perkembangan peserta didik melalui tracer study
- Monitoring penyampaian laporan video best practice dan abahan ajar melalui aplikasi banper PKW;
- Pendampingan kepada lembaga-lembaga yang masih mengalami kendala pemahaman maupun teknis video best practice dan bahan ajar;
- Memberikan fleksibilitas kepada lembaga untuk berkolaborasi dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja dalam proses pembelajaran
- Bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya di daerah 3T, untuk memfasilitasi penyebaran informasi tentang program PKK, serta mendukung penyelenggaraan pelatihan yang lebih dekat dengan masyarakat.
- Fasilitasi tracer study bagi peserta didik melalui laman <https://tracervokasi.kemdikbud.go.id/>
- Integrasi SMK dengan kursus dan pelatihan

Inovasi Program



- Inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran yang sudah mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi;
- Integrasi dengan aplikasi siKompeten dalam pelaksanaan uji kompetensi, sehingga diharapkan hasil UJK validitasnya terjaga;
- Administrasi keuangan sudah dibuat skema sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mempermudah lembaga untuk mengadministrasikan keuangan melibatkan KADIN dalam upaya penguatan kerjasama dengan DUDIKA terutama dalam penyerapan lulusan;
- Pendekatan link and match, yaitu menciptakan lulusan dengan keahlian, keterampilan, karakter, dan daya saing sesuai kebutuhan dunia industri, usaha, dan kerja (IDUKA);
- Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) wajib menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Sasaran Kinerja 2



Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

IKK 2.1 Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja

Lembaga Kursus dan Pelatihan dikatakan sudah menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja, apabila memenuhi antara lain:

1. Menyusun dan menerapkan SKL dan kurikulum berbasis dunia kerja di lembaga kursus dan pelatihan. Kurikulum dikembangkan Bersama dengan dunia kerja yang menekankan pada pengembangan kompetensi yang merujuk pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan kebutuhan kecakapan kerja dari dunia kerja.
2. Menyusun dan menggunakan bahan ajar (luring dan daring) mengacu pada SKI dan kurikulum yang dikembangkan berbasis dunia kerja. Bahan ajar merupakan materi pembelajaran yang disusun secara sistematis dan dipakai sebagai rujukan materi pembelajaran dalam pendidikan kursus dan pelatihan. Bentuk bahan ajar yang dimaksud terdiri dari buku ajar dalam bentuk tertulis maupun buku ajar dalam bentuk e-learning (e-book), Bahan ajar dalam bentuk tertulis yang dimaksud bahan ajar dalam bentuk hardcopy, bahan ajar yang dimaksud adalah penulisan bahan ajar dalam bentuk softcopy. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara daring dan luring di lembaga kursus dan pelatihan, dan/atau
3. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dan/atau
4. Menyelenggarakan program micro credential yang merupakan bentuk dukungan bagi program merdeka belajar bagi para mahasiswa. Program ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1 semester pada lembaga kursus dan pelatihan yang telah memiliki kurikulum, program pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, kompetensi pengelola dan instruktur, dan uji kompetensi yang seluruhnya berbasis dunia kerja, dan/atau. Satuan LKPbekerja sama dengan perguruan tinggi yang menyelenggarakan Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kerjasama dimaksud dapat meliputi: a. LKP menjadi tempat magang bagi mahasiswa perguruan tinggi mitranya, b. menyelenggarakan program pendidikan kecakapan kerja bersertifikat kompetensi bagi mahasiswa.
5. Memiliki unit usaha sebagai teaching factory. Ini bertujuan untuk mendapatkan model pembelajaran praktek kerja lapangan di LKP yang dapat memastikan kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik yang nantinya akan bekerja atau berwirausaha agar selaras dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja, dan/atau
6. Menyelenggarakan rintisan program Pengakuan Pembelajaran Lampau (PPL) kerjasama dengan perguruan tinggi.

7. Menyelenggarakan pusat pengembangan karier, yaitu unit pelaksana di LKP yang melakukan kegiatan/memberikan layanan bagi peserta didik dan lulusan berupa informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, penyaluran dan penempatan kerja. Selain itu juga berfungsi meningkatkan pemahaman dunia kerja terhadap kemampuan/kompetensi yang dimiliki oleh lulusan yang sesuai jenis pekerjaan/posisi jabatan yang tersedia di dunia kerja, serta untuk pencapaian target persentase lulusan yang bekerja pada tahun kelulusan.
8. Instruktur dan Pengelola LKP magang di dunia kerja.
9. Penguji dan Pengelola UJK kursus dan pelatihan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan uji kompetensi.
10. Di nilai Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan. Penilaian Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah kegiatan untuk mengukur dan menetapkan tingkat capaian kinerja satuan LKP yang meliputi aspek kinerja pemasaran, aspek kinerja SDM, aspek kinerja operasional dan pelaksanaan pembelajaran, serta aspek kinerja keuangan dalam menerapkan prinsip Link and Match 8+i Satuan Pendidikan dg Dunia Kerja serta manajemen pengelolaan program kursusnya. Prinsip Link and Match 8+i meliputi aspek: (a) kurikulum berbasis dunia kerja, (b) peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan dunia kerja, (c) sarana pembelajaran pembelajaran berstandar dunia kerja, (d) pembelajaran berbasis proyek, (e) peserta didik magang di dunia kerja, (f) pengelolaan unit usaha sebagai teaching factory, (g) evaluasi peserta didik sesuai kecakapan kerja yg dibutuhkan dunia kerja, (h) komitmen penyerapan lulusan oleh dunia kerja, (i) kerja sama lainnya antara LKP dengan lembaga dunia kerja mitranya dalam meningkatkan mutu pengelolaan program kursus, antara lain: pemberian beasiswa, donasi peralatan praktik. Selain itu aspek manajemen pengelolaan meliputi pemasaran, keuangan, perencanaan.

Metode Penghitungan:

$$K = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J$$

Keterangan:

I = Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja

A = Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja

B = Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran kursus dalam jaringan

C = Jumlah LKP yang memiliki unit produksi sebagai Teaching Factory yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

D = Jumlah Instruktur dan Pengelola LKP magang di dunia kerja

E = Jumlah penguji uji kompetensi kursus dan pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya

F = Jumlah pengelola uji kompetensi kursus dan pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya

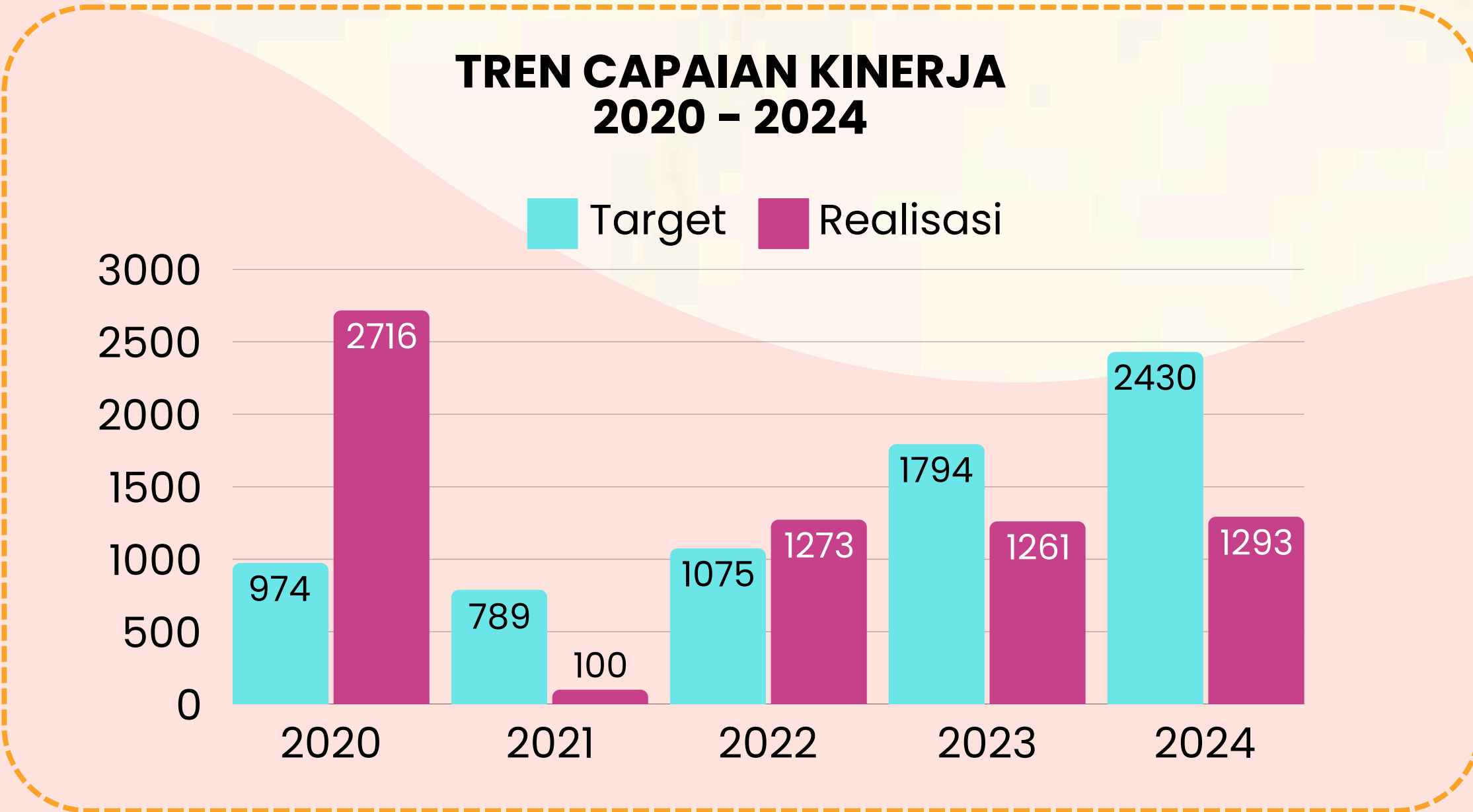
G = Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaganya

H = Jumlah LKP yang menyelenggarakan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan perguruan tinggi

I = Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir

J = Jumlah LKP yang menyelenggarakan microcredential





Tabel Perbandingan
Target dan Capaian Kinerja 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	Akhir Periode Renstra	%
Target	974	789	1075	1794	2430	7062	86,42%
Realisasi	2716	100	1273	1261	1293	6103	

Pada periode tahun 2020 - 2021, Program pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha jika dilihat perbandingan antara target dan realisasinya, mengalami penurunan yang signifikan, dari target sebanyak 974 di tahun 2020, turun menjadi 789 di tahun 2021, dan realisasinya juga turun dari 2716 menjadi 100 di tahun 2021. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan metode penghitungan dimana di tahun 2020 dapat lebih banyak menjangkau capaian karena proses pelaksanaan kegiatan banyak dilakukan secara daring.

Pada periode tahun 2022 - 2024, perbandingan target dan capaian mengalami peningkatan target, yakni untuk target sebanyak 1075 lembaga di tahun 2022, menjadi 1794 di tahun 2023 dan 2430 di tahun 2024. Sementara untuk capaian di tahun 2022 sebanyak 1273 lembaga, di tahun 2023 turun menjadi 1261 lembaga dan kembali naik di tahun 2024 menjadi 1293 lembaga. Dari data tersebut dapat terlihat gap yang semakin jauh antara target renstra dengan capaian di setiap tahunnya. Kondisi tersebut dimungkinkan dengan adanya realokasi anggaran setiap tahunnya, khususnya realokasi dalam penanganan pandemi covid di tahun 2021 - 2022 yang menyebabkan adanya pergeseran anggaran kepada penanganan dampak covid 19.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra yaitu sebesar 7062 lembaga maka capaian sebesar 6103 lembaga telah tercapai sebanyak 86,42% dari target yang ditetapkan.

Ketidaktercapaian target renstra ini dimungkinkan disebabkan karena adanya realokasi anggaran yang dilakukan di sepanjang tahun 2022 - 2024 melalui mekanisme blokir reguler dan blokir Automatic Adjustment yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Perealisasi IKK ini didukung oleh 10 program kerja yaitu:

1. SKL, kurikulum dan bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja
2. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja Project Based Learning (PJBL)
3. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran daring
4. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis pabrik/teaching factory
5. LKP yang dinilai kinerja Lembaga
6. Instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja
7. Penguji uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya
8. Pengelola uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya
9. LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi (PT)
10. LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir
11. LKP yang siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas

SKL, kurikulum dan bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja

Target 2024 : 10 Dokumen
Capaian 2024 : 10 Dokumen



Definisi Program, Output dan Outcome Program

Penyusunan SKL dan Kurikulum dilakukan dalam memenuhi standar materi pembelajaran, pedoman pembelajaran dan pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik kursus dan pelatihan. Penyusunan SKL dan Kurikulum ini dilakukan pada 5 jenis bidang keterampilan. Bidang tersebut antara lain:

1. Garmen Alas Kaki
2. Tenun
3. Perhotelan
4. Otomotif Teknik Sepeda Motor
5. Elektronika

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1. Penyusunan SKL dan Kurikulum Kursus dan Pelatihan

- a) Identifikasi Bidang Keterampilan dan Tim Penyusun
- b) Penyusunan Draf SKL dan Kurikulum
- c) Reviu Draf SKL dan Kurikulum
- d) Uji Publik Draf SKL dan Kurikulum
- e) Finalisasi Draf SKL dan Kurikulum

2. Penyusunan Bahan Ajar E-Modul

Gambaran Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan SKL dan Kurikulum Kursus dan Pelatihan

a. Identifikasi Bidang Keterampilan dan Tim Penyusun

Identifikasi bidang pada penyusunan SKL dan Kurikulum Kursus dan Pelatihan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Kebutuhan Masyarakat

SKL dan Kurikulum Kursus dan Pelatihan yang disusun dan dikembangkan adalah bidang keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk bekerja, berwirausaha, maupun untuk pengembangan diri.

2) Kebutuhan Industri

Kompetensi bidang keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa yang akan datang.

3) Kajian Banding (Benchmark) Standar

Kajian banding penting dilakukan untuk memposisikan program kursus dan pelatihan pada jenjang kesetaraan yang tepat dengan program di tingkat nasional maupun di mancanegara. Kajian banding ini juga penting agar tim penyusun tidak melakukan aktivitas dari nol (not reinventing the wheel).

4) Ilmu atau Teknologi Baru

Kajian terhadap adanya ilmu atau teknologi baru yang relevan dengan kursus atau pelatihan yang akan diselenggarakan sangat penting untuk meningkatkan daya saing program dibandingkan dengan yang telah ada.

5) Jenjang KKNi dan Deskripsinya

Deskripsi setiap jenjang KKNi wajib dijadikan pertimbangan untuk menentukan jenjang kualifikasi dari lulusan kursus atau pelatihan yang akan ditetapkan.

Tim penyusun diidentifikasi yang terdiri dari unsur:

- 1) Pengurus asosiasi penyelenggara atau organisasi profesi bidang terkait. Apabila telah ada asosiasi penyelenggara atau organisasi profesi di tingkat nasional, maka unsur ini wajib berasal dari tingkat nasional.
- 2) Akademisi yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam membuat perangkat pembelajaran.
- 3) Praktisi yang berpengalaman di bidang keterampilan terkait.
- 4) Perusahaan, instansi, atau Kementerian/Lembaga yang membutuhkan lulusan bidang keterampilan.

Proses identifikasi dilakukan dengan membagikan instrumen usulan ke LKP, organisasi profesi, organisasi mitra, dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) untuk mengusulkan bidang keterampilan baru kursus dan pelatihan dan SKL dan Kurikulum lama yang perlu dikaji ulang. Ada 12 usulan untuk SKL dan kurikulum bidang keterampilan baru dan 18 usulan untuk SKL dan kurikulum bidang keterampilan kaji ulang, kemudian hasil kurasi ditentukan yang dapat difasilitasi penyusunan SKL sejumlah 5 bidang keterampilan yang terdiri dari 2 SKL dan kurikulum bidang keterampilan baru dan 3 SKL dan kurikulum bidang keterampilan kaji ulang.

b. Penyusunan Draf SKL dan Kurikulum

Tim penyusun memulai menyusun draf SKL dan kurikulum sesuai dengan pedoman penyusunan SKL dan kurikulum.

b. Reviu Draf SKL dan Kurikulum

Draf SKL dan kurikulum ditelaah oleh tim pembahas yang terdiri dari penyusun dan penelaah (reviewer). Penyusun yang dihadirkan hanya perwakilan 1 orang dan penelaah dari KADIN, Dunia Kerja, dan kementerian teknis dihadirkan 2 orang.

c. Uji Publik Draf SKL dan Kurikulum

Uji publik dilakukan secara luring kepada responden yang memenuhi kriteria. Uji publik bertujuan untuk memastikan keterbacaan, keterlaksanaan, keterukuran, dan ketercapaian draf Standar Isi dan Kurikulum Kursus dan Pelatihan sesuai pedoman penyusunan kurikulum, dengan:

- 1) Menyimak penjelasan substansi draf dari penyusun Standar Isi dan Kurikulum jenis keterampilan Teknik Sepeda Motor, Teknik Elektronika, Perhotelan, dan Operator Alas Kaki.
- 2) Mengisi instrumen uji publik.
- 3) Diskusi.

Uji publik SKL dan kurikulum dilaksanakan di 2 kota, yaitu Surabaya dan Lombok berdasarkan sebaran LKP pada 5 bidang keterampilan.

d. Finalisasi Draf SKL dan Kurikulum

Finalisasi draf SKL dan kurikulum sesuai rekomendasi hasil uji publik dan kesepakatan oleh penyusun.



Jumlah LKP yang menyelenggarakan Project Based Learning (PjBL)

Target 2024 : 30 Lembaga
Capaian 2024 : 30 Lembaga



Definisi Program, Output dan Outcome Program

Project Based Learning (PjBL) adalah pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai soft skills, hard skills, dan karakter. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas peserta didik dalam menghasilkan produk yang menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, hingga mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Produk yang dimaksud adalah hasil proyek berupa barang atau jasa.

Output program adalah LKP mampu menerapkan pembelajaran berbasis proyek (PjBL) sesuai dengan tahapan PjBL dan mampu mendokumentasikan kertas kerja mengacu pada materi pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek (PjBL).

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- Penyusunan Materi Penyelenggaraan Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL)
- Finalisasi Materi Penyelenggaraan Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL)
- Orientasi Teknis Penyelenggaraan Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL)

Gambaran Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan Materi Penyelenggaraan Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL),

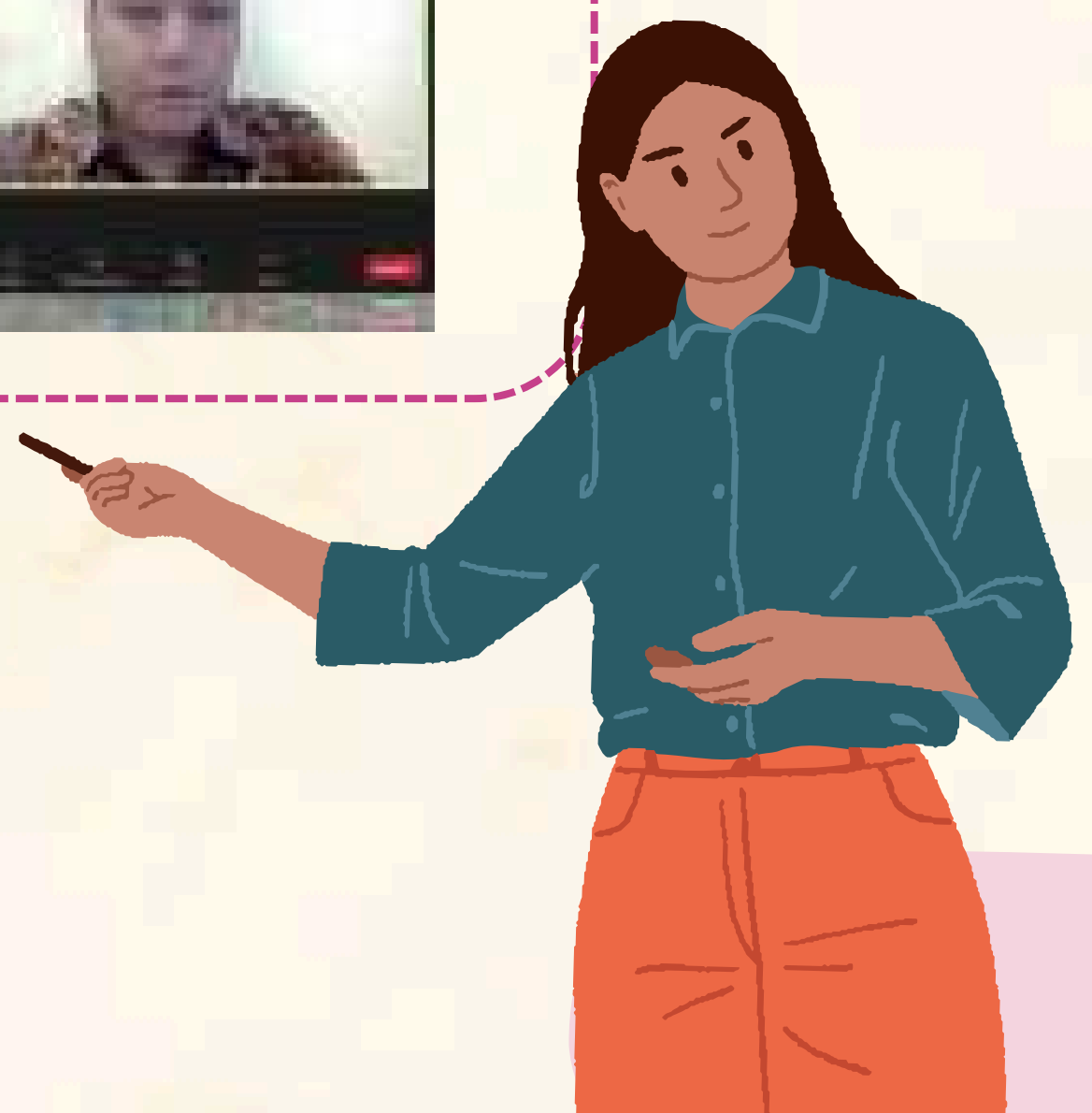
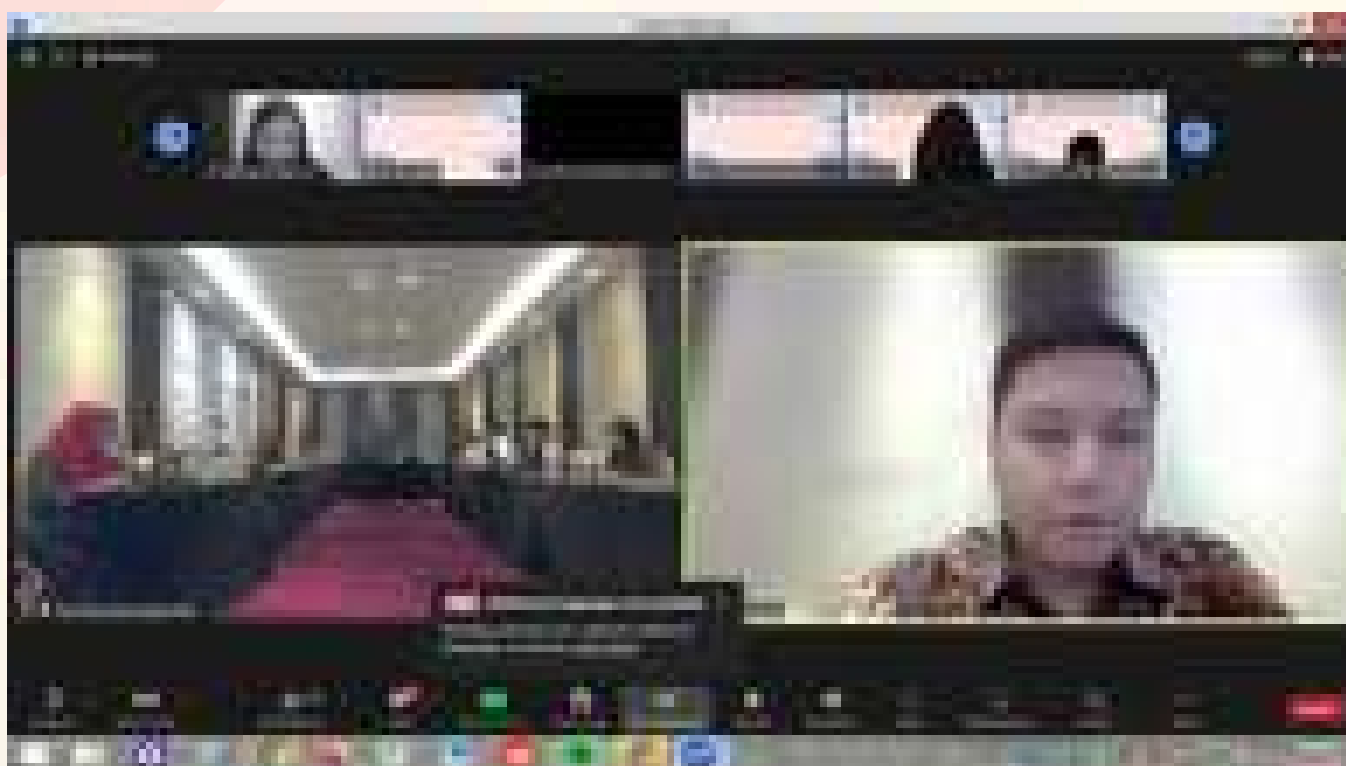
Pelaksanaan program ini diawali dengan kegiatan penyusunan materi penyelenggaraan PjBL yang bertujuan untuk menyusun materi penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek, meliputi Rencana Pembelajaran Paket Kursus dan Pelatihan (RPK), jadwal pelaksanaan PjBL, Rencana Pelaksanaan Proyek (RPP); dan Penilaian Proyek. Peserta eksternal kegiatan yaitu Fakhru Hilman dari LKP Al Amanah Bandung, Rina Arsianti dari LKP Inasaba Pekalongan, Ishvianti dari LPP Ariyanti Bandung, Nisma Nurul Bilah dari LKP Nuning Cimahi dan Ete Kurnia dari LKP Indah Rizki Jaya Jakarta Barat. Hasil dari kegiatan berupa draf pedoman penyelenggaraan PjBL di LKP seperti pada link berikut: dengan hasil berikut: https://bit.ly/Pedoman_Penyelenggaraan_Pjbl_28Feb1Mar2024

Finalisasi Materi Penyelenggaraan Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL).

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membahas dan memfinalkan draft materi penyelenggaraan (PjBL) meliputi konsep pembelajaran kursus berbasis proyek; penerapan PjBL pada lembaga kursus dan pelatihan; ekosistem dan entitas PjBL; dan perangkat pembelajaran PjBL. Peserta eksternal dari kegiatan adalah Ete Kurnia dari LKP Indah Rizki Jaya Jakarta Barat, Nisma Nurul Bilah dari LKP Nuning, Eti Rusmiyati dari LKPLPKMA, Theo George Gill dari LKP Sangkuriang dan Retno Multriarti dari LKP Citramas. Hasil dari kegiatan berupa pedoman penyelenggaraan PjBL yang dilengkapi dengan perangkat model PjBL.

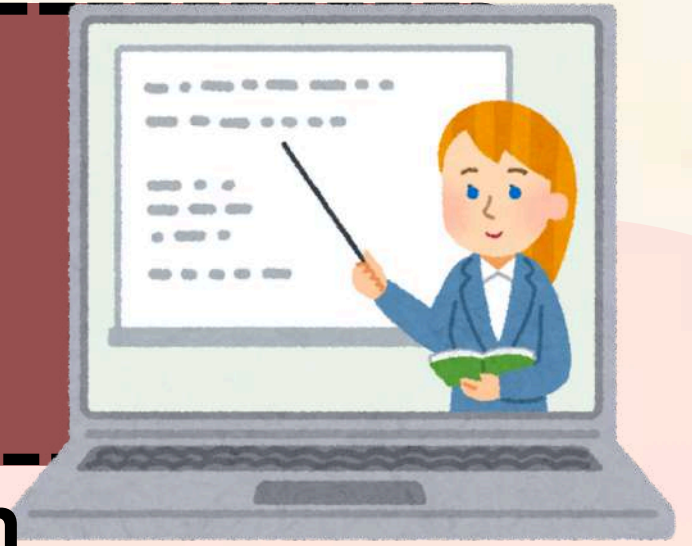
Orientasi Teknis Penyelenggaraan Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL)

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan pendampingan kepada LKP dalam menyiapkan instrumen pembelajaran berbasis proyek, meliputi: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kursus dan Pelatihan, Rencana Pelaksanaan Proyek dan Penilaian Pelaksanaan Proyek. Peserta eksternal dari kegiatan terdiri dari 30 LKP yang akan diberikan bimbingan dan pendampingan dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis proyek, pada kegiatan ini 50 % LKP mengikuti kegiatan melalui daring dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Diantara LKP yang hadir secara luring adalah LKP Automotive Training Centre bapak Edi Fakhrin, S.Pd, LKP Aura Kreatif ibu Vera Susanti, LKP Badami ibu Titi Awati, LKP Dian ibu Sarmanah, LKP Elidas ibu Elida Hafni, LKP Griya Puspitasari ibu Rita Dwi Hermiwati, LKP Mandiri ibu Rina Mujiwati, LKP Manunggal Nusantara Cyberschool ibu Rusyanti, S.Pd, LKP Mawar bapak Dede Abdul Holid, LKP Modelling bapak Wawan Sayuti, LKP Modesta Education Center ibu Rahmayana, LKP Prestatif bapak Dudi Atwendi, LKP Trias Beauty School ibu Hj. Iin Susilawaty, S.Pd, MM, LKP Valentina ibu Warmidianty, S.I.Kom., M.Pd. dan LKP Mey ibu Delis Lela Haryati.



Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring

Target 2024 : 100 Lembaga
Capaian 2024. : 100 Lembaga



Definisi Program, Output dan Outcome Program

Kursus daring adalah program pembelajaran yang disusun berdasarkan silabus (biasanya dalam satuan unit) dan berlangsung di ruang virtual . Kursus daring dapat bersifat informal dan berfokus pada satu keterampilan atau formal yang mengarah pada sertifikasi atau gelar.

Pembelajaran daring adalah metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diselenggarakan secara jarak jauh, melalui jaringan internet, yang dapat memfasilitasi peserta didik lebih luas, lebih banyak, dan lebih bervariasi.

Pelaksanaan program pendidikan vokasi pada lembaga kursus dan pelatihan telah menjadi bagian utama dalam program dan kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Berbeda dengan pendidikan vokasi pada jalur formal, pendidikan vokasi pada jalur nonformal di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) diselenggarakan dengan prinsip antara lain: (1) fleksibel, lebih leluasa dalam aspek penggunaan waktu, tempat, dan program pembelajaran; (2) praktis, ditujukan untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat, industri dan dunia kerja dalam jangka pendek; dan (3) fungsional, peserta didik merasakan langsung manfaat dari hasil kegiatan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan.

Penyelenggaraan pendidikan vokasi di LKP harus memperhatikan dan menerapkan perkembangan teknologi apalagi di era disrupsi digital (digital disruption) sekarang ini. Pada era ini terjadi perubahan yang sangat cepat dan fundamental termasuk perubahan di bidang pendidikan. Era ini menuntut para pelaku bisnis di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan untuk segera melakukan perubahan jika tidak mau tergerus fenomena disrupsi. Inovasi pembelajaran pada LKP melalui kursus daring sudah merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat. Selain itu dengan diselenggarakannya kursus daring ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh baik untuk peserta didik maupun bagi LKP:

Bagi peserta didik:

- Fleksibel; Peserta didik dapat mendaftar dan mengikuti kursus dari mana saja, kapan saja dan dapat dilakukan secara mandiri, serta kemudahan mendapatkan materi pembelajaran untuk dipelajari secara berulang-ulang. serta kemudahan mengkases materi atau bahan ajar secara berulang-ulang.
- Hemat biaya; Peserta didik tidak perlu mengeluarkan biaya lebih besar apabila dibandingkan dengan kursus konvensional, seperti untuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi.
- Media pembelajaran lebih bervariasi; Peserta didik akan mendapatkan bahan ajar yang lebih bervariasi dalam bentuk video, audio, e-book, PDF, power point dan lain-lain.
- Banyak sumber referensi; Peserta didik dapat lebih mudah mengembangkan potensi dan meningkatkan kompetensi dengan mendapatkan sumber referensi yang lain.

Bagi LKP:

- Memperluas pasar; LKP akan menjangkau peluang pasar yang lebih luas, karena peserta didik dapat berasal dari mana saja.
- Dapat dilakukan secara massal; LKP dapat melaksanakan pembelajaran secara massal tanpa dibatasi sarana dan prasarana yang dimiliki.
- Meningkatkan citra lembaga; LKP semakin dikenal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.
- Memperkecil biaya operasional;

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- Reviu Pedoman Penyelenggaraan Kursus Daring
- Koordinasi Penyelenggaraan Kursus Daring
- Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kursus Daring
- Pengimbasan Praktek Baik Penyelenggaraan Kursus Daring
- Penyusunan Naskah Skenario Video Bahan Ajar Kursus Daring
- Reviu/Finalisasi Naskah Skenario Video Bahan Ajar Kursus Daring
- Produksi Video Bahan Ajar Kursus Daring
- Penyusunan dan Editing Video Bahan Ajar Kursus Daring
- Preview dan Finalisasi Hasil Produksi Video Bahan Ajar Kursus Daring

Gambaran Pelaksanaan Kegiatan

Reviu Pedoman Penyelenggaraan Kursus Daring

Pedoman penyelenggaraan kursus daring disusun sebagai pedoman bagi LKP dalam merintis dan mengembangkan model kursus daring di lembaganya.

Kegiatan penyusunan pedoman penyelenggaraan kursus daring bertujuan untuk:

- Menyusun pedoman penyelenggaraan kursus daring dari yang paling sederhana sampai dengan penggunaan LMS (*Learning Management System*);
- Memfinalkan pedoman penyelenggaraan kursus daring dari yang paling sederhana sampai dengan penggunaan LMS (*Learning Management System*);
- Memfinalkan pemetaan LKP yang akan dijadikan sasaran bimbingan teknis penyelenggaraan kursus daring.

Koordinasi Penyelenggaraan Kursus Daring

Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kursus daring dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi terkait penyelenggaraan kursus daring serta mengevaluasi pelaksanaan program kursus daring yang telah berjalan sekaligus mendapatkan masukan dan rekomendasi perbaikan bagi penyelenggaraan kursus daring selanjutnya.

Tujuan dari kegiatan ini yaitu:

- Mensosialisasikan sekaligus memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep penyelenggaraan kursus daring kepada LKP;
- Memberikan pembekalan teknis dan workshop penyelenggaraan kursus daring kepada pengelola, instruktur, dan admin LKP.

Hasil dari kegiatan yaitu:

- Lembaga calon pengimbas memahami tentang teknis penyelenggaraan kursus daring dan dapat melakukan pengimbasan kepada lembaga yang belum menyelenggarakan kursus daring;
- Dengan kegiatan pengimbasan ini, akan banyak lembaga baru yang mau menyelenggarakan kursus daring di masa yang akan datang.

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kursus Daring

Bimbingan teknis terhadap LKP calon penyelenggara kursus Daring dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi terkait penyelenggaraan kursus daring selain itu untuk memberikan pembekalan terhadap LKP dalam rangka meningkatkan mutu layanan kursus dan pelatihannya dengan cara menyelenggarakan kursus secara Daring.

Bimbingan teknis ini ditujukan kepada LKP yaitu pengelola, instruktur dan tenaga admin LKP. Pengelola, instruktur, dan tenaga admin LKP yang mengikuti bimbingan teknis diharapkan memiliki tingkat pemahaman yang sama dalam pelaksanaan pengembangan kursus daring mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kursus daring di LKP.

Tujuan dari kegiatan ini yaitu:

- Mensosialisasikan sekaligus memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep penyelenggaraan kursus daring kepada LKP;
- Memberikan pembekalan teknis dan workshop penyelenggaraan kursus daring kepada pengelola, instruktur, dan admin LKP.

Hasil dari kegiatan yaitu:

- Lembaga calon pengimbas memahami tentang teknis penyelenggaraan kursus daring dan dapat melakukan pengimbasan kepada lembaga yang belum menyelenggarakan kursus daring;
- Dengan kegiatan pengimbasan ini, akan banyak lembaga baru yang mau menyelenggarakan kursus daring di masa yang akan datang

Dengan adanya bimbingan teknis ini maka pelaksanaan kegiatan pengembangan kursus daring diharapkan dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Pengimbasan Praktek Baik Penyelenggaraan Kursus Daring

Tujuan kegiatan Pengimbasan Praktek Baik Penyelenggaraan Kursus Daring ini yaitu:

- Mensosialisasikan sekaligus memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep penyelenggaraan kursus daring kepada LKP;
- Mempermudah Lembaga yang sudah menyelenggarakan Kursus Daring dapat menularkan praktik baik penyelenggaraan kursus daring kepada lembaga lain, yang belum menyelenggarakan kursus daring.

Hasil dari kegiatan Pengimbasan Praktek Baik Penyelenggaraan Kursus Daring ini yaitu:

- Telah dilaksanakan kegiatan pengimbasan praktik di masing-masing area Pringsewu, Tangerang, Bogor, Cimahi, Purwodadi.
- Kegiatan ini diikuti oleh 100 lembaga calon penyelenggara kursus daring, dengan rincian Pringsewu ada 20 lembaga, Tangerang 20 lembaga, Bogor 20 lembaga, Cimahi 20 lembaga, dan Purwodadi 20 lembaga.

Penyusunan Naskah Skenario Video Bahan Ajar Kursus Daring

Penyampaian materi dalam proses pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu pembelajaran. Peserta didik akan dengan mudah menyerap dan memahami materi apabila bahan ajar yang disajikan dikemas dalam bentuk yang interaktif dan menarik. Bentuk kemasan bahan ajar yang dimaksud salah satunya dalam bentuk bahan ajar audio visual atau video pembelajaran.

Dalam penyelenggaraan kursus daring, pengembangan konten video pembelajaran merupakan bagian yang paling penting apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan pembelajaran konvensional/tatap muka langsung. Oleh sebab itu maka untuk memenuhi konten-konten video pembelajaran yang mendukung penyelenggaraan kursus daring perlu dilaksanakan pengembangan dan penyusunan bahan ajar kursus daring.

Reviu/Finalisasi Naskah Skenario Video Bahan Ajar Kursus Daring

Review naskah scenario bahan ajar kursus daring merupakan tindak lanjut dari kegiatan penyusunan naskah skenario bahan ajar kursus daring.

Produksi Video Bahan Ajar Kursus Daring

Pendampingan Pra Produksi bahan ajar kursus daring merupakan tindak lanjut dari kegiatan review storyboard bahan ajar kursus daring.

Penyusunan dan Editing Video Bahan Ajar Kursus Daring

Penyampaian materi dalam proses pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu pembelajaran. Peserta didik akan dengan mudah menyerap dan memahami materi apabila bahan ajar yang disajikan dikemas dalam bentuk yang interaktif dan menarik. Bentuk kemasan bahan ajar yang dimaksud salah satunya dalam bentuk bahan ajar audio visual atau video pembelajaran.

Dalam penyelenggaraan kursus daring, pengembangan konten video pembelajaran merupakan bagian yang paling penting apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan pembelajaran konvensional/tatap muka langsung. Oleh sebab itu maka untuk memenuhi konten-konten video pembelajaran yang mendukung penyelenggaraan kursus daring perlu dilaksanakan pengembangan dan penyusunan bahan ajar kursus daring.

Preview dan Finalisasi Hasil Produksi Video Bahan Ajar Kursus Daring

Penyampaian materi dalam proses pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu pembelajaran. Peserta didik akan dengan mudah menyerap dan memahami materi apabila bahan ajar yang disajikan dikemas dalam bentuk yang interaktif dan menarik. Bentuk kemasan bahan ajar yang dimaksud salah satunya dalam bentuk bahan ajar audio visual atau video pembelajaran.

Dalam penyelenggaraan kursus daring, pengembangan konten video pembelajaran merupakan bagian yang paling penting apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan pembelajaran konvensional/tatap muka langsung. Oleh sebab itu maka untuk memenuhi konten-konten video pembelajaran yang mendukung penyelenggaraan kursus daring perlu dilaksanakan pengembangan dan finalisasi hasil video bahan ajar kursus daring yang sesuai dengan kriteria.

Jumlah LKP yang Menyelenggarakan Unit Produksi Sebagai Teaching Factory

Target 2024 : 394 Lembaga
Capaian 2024. : 305 Lembaga



Definisi Program, Output dan Outcome Program

Teaching Factory (Tefa) di LKP didefinisikan sebagai suatu model pembelajaran yang dilaksanakan di unit usaha yang mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku di DUDIKA.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- Penyusun Pedoman / Teaching Factory (Tefa)
- Pembinaan Unit Usaha / Teaching Factory (Tefa)
- Pengimbasan Unit Usaha / Teaching Factory (Tefa)
- Workshop Pengembangan Unit Usaha / Teaching Factory (Tefa)

Gambaran Pelaksanaan Kegiatan

Penyusun Pedoman / Teaching Factory (Tefa)

Teaching Factory (Tefa) di LKP didefinisikan sebagai suatu model pembelajaran yang dilaksanakan di unit usaha yang mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku di DUDIKA. Kegiatan ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- Untuk mendapatkan masukan terhadap pedoman penyelenggaraan Unit Usaha di LKP yang telah disusun dan telah dilaksanakan oleh LKP dalam rangka penyempurnaan dalam pelaksanaan pengelolaan unit usaha;
- Menyepakati peraturan-peraturan, kaidah dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam pedoman penyelenggaraan unit usaha di LKP.
- Output dari kegiatan ini didapatkan Pedoman atau Panduan Penyelenggaraan Unit Usaha di LKP yang disusun Bersama tim pembahas

Pembinaan Unit Usaha / Teaching Factory (Tefa)

Unit Usaha adalah model pembelajaran berbasis produksi/jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri dan dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di industri. Pelaksanaan pengembangan unit usaha menuntut keterlibatan mutlak pihak industri sebagai pihak yang relevan menilai kualitas hasil pendidikan. Pelaksanaan unit usaha juga harus melibatkan pemerintah, pemerintah daerah dan stakeholders dalam pembuatan regulasi, perencanaan, implementasi maupun evaluasinya. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan unit usaha diharapkan dapat memberikan informasi kepada lembaga sekitar terkait penyelenggaraan unit usaha bagi LKP.

Kegiatan ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

Memberikan pembinaan terhadap lembaga yang belum memiliki unit usaha, di mulai dari penyusunan manajemen, persiapan, proses dan pemasaran produk termasuk pengelolaan keuangannya;

Narasumber dari lembaga yang memiliki unit usaha memberikan contoh penyelenggaraan unit usaha yang telah dilakukan kepada peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan.

Pengimbasan Unit Usaha / Teaching Factory (Tefa)

Kegiatan pengimbasan unit usaha dilatarbelakangi oleh banyaknya lembaga yang memiliki kinerja baik terutama dalam penyelenggaraan unit usaha. Kriteria lembaga yang dipilih memiliki output rintisan usaha yang dibentuk sudah berjalan, memiliki kurikulum dan instruktur kompeten yang sesuai dengan jenis keterampilan, memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai pada unit usaha. Pengimbasan praktik baik penyelenggaraan unit usaha ini diharapkan dapat menyebarkan wawasan/pengetahuan kepada lembaga sekitar terkait penyelenggaraan unit usaha bagi LKP.

Kegiatan ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- Memberikan fasilitasi pengimbasan atau peningkatan kompetensi instruktur/pengelola berdasarkan teknologi dan inovasi terbaru, termasuk penyusunan kurikulum dan bahan ajar yang diperlukan dalam penyelenggaraan program pengimbasan;
- Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pengimbasan praktik baik penyelenggaraan unit usaha bagi LKP.



Workshop Pengembangan Unit Usaha / Teaching Factory (Tefa)

Pelaksanaan pengembangan unit usaha bagi LKP menuntut keterlibatan mutlak pihak industri sebagai pihak yang relevan menilai kualitas hasil pendidikan. Oleh karena itu pemahaman, evaluasi dan sharing berbagai praktik baik perlu terus disosialisasikan antara lain melalui workshop. Kami berharap semoga kegiatan Workshop Pengembangan Unit Usaha bagi LKP yang dilaksanakan ini dapat memberikan gambaran secara jelas terkait penyelenggaraan unit usaha di LKP.

Kegiatan Workshop Pengembangan Unit usaha bagi LKP ini dilaksanakan dengan tujuan: Mensosialisasikan kebijakan Direktorat Kursus dan Pelatihan terkait dengan unit usaha bagi LKP dan pengembangannya;

Mensosialisasikan pengelolaan (best practice) unit usaha yang dimiliki oleh lembaga yang mempunyai kriteria unit usaha yang bagus (Tefa) sebagai acuan/perbandingan bagi LKP lain yang sedang merintis berdirinya unit usaha maupun yang belum memiliki unit usaha;

Mendorong perubahan paradigma pembelajaran di lembaga kursus dan pelatihan;

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran soft skills dan hard skills peserta didik.

Jumlah LKP yang Dinilai Kinerja Lembaga

Target 2024 : 100 Lembaga

Capaian 2024 : 119 Lembaga



Definisi Program, Output dan Outcome Program

Penilaian Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan (PK-LKP) adalah upaya penjaminan mutu pelayanan LKP yang bertujuan untuk memastikan LKP telah memenuhi kriteria kinerja, memetakan capaian kinerja, dan memberikan data sebagai dasar perencanaan untuk menentukan peluang strategis guna meningkatkan kekuatan dan kemampuan pengembangan LKP. Output dari program PK-LKP tahun 2024 adalah 119 LKP yang dinilai kinerja.

Outcome

- Direktorat Kursus dan Pelatihan; Terpetakannya mutu layanan LKP di seluruh Indonesia berdasarkan kategori capaian kinerja, tersedianya data dan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses klasifikasi LKP, tersedianya data dan informasi sebagai dasar untuk melakukan pengembangan dan pembinaan sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka penjaminan mutu dan peningkatan kinerja LKP; Tersedianya data dan informasi untuk pimpinan Direktorat dalam penetapan kebijakan serta intervensi program dalam rangka penjaminan mutu dan peningkatan kinerja LKP.
- Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; Memperoleh data pemetaan mutu LKP sebagai dasar rujukan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembinaan LKP.
- Lembaga Kursus dan Pelatihan; mendapatkan gambaran kinerja Lembaga sebagai bahan untuk merencanakan pengembangan program, sebagai bahan pertimbangan dalam kerja sama dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), untuk branding/pencitraan terhadap LKP sesuai dengan capaian kinerja; dan, sebagai bahan pertimbangan bagi dunia kerja menjadi mitra dalam pelaksanaan program dan penyerapan lulusan LKP.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi; tersedianya data dan informasi untuk penyusunan program pengembangan penjaminan mutu layanan LKP; tersedianya data dan informasi sebagai rujukan kebijakan untuk melaksanakan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola LKP; dan tersedianya data dan informasi untuk melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada LKP.
- Mitra dari unsur DUDIKA; tersedianya data dan informasi terkait LKP yang menyelenggarakan program kursus dan pelatihan yang berkualitas; memberikan keyakinan terhadap lulusan LKP yang kompeten dan terlatih.
- Asosiasi profesi; Membantu membangun reputasi positif bagi asosiasi profesi, terutama dari LKP yang memperoleh capaian kinerja unggul.
- Organisasi mitra vokasi; Memperoleh kepastian bahwa LKP sudah mematuhi standar mutu yang ditetapkan.
- Pemangku kepentingan lainnya; Untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan berkelanjutan layanan yang bermutu di LKP.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1) Persiapan

- Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Kinerja LKP Berbasis Dunia Kerja Tahun 2024 (21-23 Februari 2024)
- Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Kinerja LKP Berbasis Dunia Kerja Tahun 2024 Tahap 2 (6-8 Maret 2024)
- Sosialisasi Pedoman, Instrumen, dan Aplikasi Penilaian Kinerja LKP Tahun 2024 (4-5 April 2024)
- Penyusunan Materi Orientasi Teknis Verifikasi Penilaian Kinerja LKP Tahun 2024 (13-15 Mei 2024)
- Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Kinerja LKP Berbasis Dunia Kerja Tahun 2024 (6-8 Juni 2024)
- Finalisasi Materi Orientasi Teknis Verifikator Penilaian Kinerja Kursus dan Pelatihan (PK-LKP) Tahun 2024 (26-28 Juni 2024)
- Orientasi Teknis Verifikator Penilaian Kinerja LKP Tahun 2024 (2-5 Juli 2024)

2) Pelaksanaan

- Kurasi dan Penetapan LKP Sasaran Penilaian Kinerja LKP Tahun 2024 (12-14 Juni 2024)
- Verifikasi Penilaian Kinerja LKP Tahun 2024 (19 Agustus-27 September 2024)
- Pleno Penetapan Hasil Penilaian Kinerja LKP Tahun 2024 Tahap 1 (21-23 Oktober 2024)
- Pleno Penetapan Hasil Penilaian Kinerja LKP Tahun 2024 Tahap 2 (5-7 November 2024)
- Pleno Penetapan Hasil Penilaian Kinerja LKP Tahun 2024 Tahap 3 (14-16 November 2024)
- Diseminasi Hasil Penilaian Kinerja LKP Tahun 2024 (21-23 November 2024)

3) Tindak Lanjut

- Analisis dan Evaluasi Hasil Penilaian Kinerja LKP Tahun 2024 (28-30 November 2024)
- Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kinerja LKP (17-19 Desember 2024)

Gambaran Pelaksanaan Kegiatan

Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Kinerja LKP Berbasis Dunia Kerja Tahun 2024 (21-23 Februari 2024)

a) Tujuan

- Mendiskusikan strategi pelaksanaan PKLKP tahun 2024;
- Menyepakati hasil finalisasi pedoman dan instrumen PKLKP Berbasis Dunia Kerja Tahun 2024 di lingkungan Ditsuslat;
- Membahas kriteria dan menetapkan verifikator PKLKP 2024

b) Hasil yang diharapkan

- Pedoman Pelaksanaan PKLKP
- Instrumen PKLKP

c) Narasumber/Peserta berasal dari unsur akademisi, praktisi, widya prada, dan tim pengembang aplikasi.

Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Kinerja LKP Berbasis Dunia Kerja Tahun 2024 Tahap 2 (6-8 Maret 2024)

a) Tujuan dari kegiatan ini untuk membahas:

- Draf Kepdirjen tentang pedoman penilaian kinerja LKP
- Timeline pelaksanaan penilaian kinerja LKP
- Instrumen, rubrik, dan aplikasi penilaian kinerja
- Kurasi calon LKP sasaran
- Pemetaan verifikator yang dibutuhkan

b) Hasil yang diharapkan

- Draf Kepdirjen tentang pedoman penilaian kinerja LKP
- Rubrik penilaian kinerja LKP
- Calon LKP sasaran penilaian kinerja
- Peta calon verifikator

c) Narasumber/Peserta berasal dari unsur Setditjen Pendidikan Vokasi, akademisi, praktisi, widya prada, LKP, UPT, dan tim pengembang aplikasi

Sosialisasi Pedoman, Instrumen, dan Aplikasi Penilaian Kinerja LKP Tahun 2024 (4-5 April 2024)

a) Tujuan

- Menyosialisasikan pedoman dan timeline pelaksanaan PK-LKP
- Menyosialisasikan instrumen dan aplikasi PK-LKP
- Menyusun materi orientasi teknis verifikator PK-LKP
- Melakukan kurasi calon LKP sasaran PK-LKP

b) Hasil yang diharapkan

- tersosialisasikannya pedoman dan timeline pelaksanaan PK-LKP
- tersosialisasikannya instrumen dan aplikasi PK-LKP
- materi orientasi teknis verifikator PK-LKP
- calon LKP sasaran PK-LKP

c) Narasumber/Peserta berasal dari unsur akademisi, praktisi, widyaprada, LKP, UPT, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan tim pengembang aplikasi

Penyusunan Materi Orientasi Teknis Verifikasi Penilaian Kinerja LKP Tahun 2024 (13-15 Mei 2024)

a) Tujuan kegiatan ini adalah Menyusun materi orientasi teknis verifikator PK-LKP tahun 2024

b) Hasil yang diharapkan adalah materi orientasi teknis verifikator PK-LKP tahun 2024

c) Narasumber/Peserta berasal dari unsur akademisi, praktisi, widya prada, UPT, dan tim pengembang aplikasi

Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Kinerja LKP Berbasis Dunia Kerja Tahun 2024 (6-8 Juni 2024)

a) Tujuan dari kegiatan ini membahas:

Koordinasi pelaksanaan PK-LKP dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Pemetaan verifikator yang dibutuhkan

Materi Orientasi Teknis Verifikator PK-LKP

b) Hasil yang diharapkan

Data Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersedia menyediakan anggaran untuk pelaksanaan PK-LKP di daerahnya

Pemetaan verifikator yang dibutuhkan

Materi Orientasi Teknis Verifikator PK-LKP

c) Narasumber/Peserta berasal dari unsur akademisi, praktisi, widyaprada, dan tim pengembang aplikasi

Kurasi dan Penetapan LKP Sasaran Penilaian Kinerja LKP Tahun 2024 (12-14 Juni 2024)

a) Tujuan

- Melakukan kurasi terhadap LKP calon sasaran PK-LKP tahun 2024
- Menetapkan LKP yang menjadi sasaran PK-LKP tahun 2024
- Melakukan pemetaan kebutuhan Verifikator PK-LKP tahun 2024 berdasarkan wilayah LKP sasaran

b) Hasil yang diharapkan

- Data LKP yang ditetapkan menjadi sasaran PK-LKP tahun 2024
- Peta kebutuhan Verifikator PK-LKP tahun 2024 berdasarkan wilayah LKP sasaran

c) Narasumber/Peserta berasal dari unsur akademisi, praktisi, widyaprada, dan tim pengembang aplikasi

Finalisasi Materi Orientasi Teknis Verifikator Penilaian Kinerja Kursus dan Pelatihan (PK-LKP) Tahun 2024 (26-28 Juni 2024)

a) Tujuan

- Menyiapkan materi kegiatan orientasi teknis verifikator PK-LKP Tahun 2024
- Menyelesaikan kurasi dan penetapan LKP calon sasaran PK-LKP Tahun 2024
- Membahas kembali draft Pedoman Pelaksanaan PK-LKP

b) Hasil yang diharapkan

- Materi kegiatan orientasi teknis verifikator PK-LKP tahun 2024
- LKP sasaran PK-LKP tahun 2024
- Pedoman pelaksanaan PK-LKP

c) Narasumber/Peserta berasal dari unsur Setditjen Pendidikan Vokasi, akademisi, praktisi, widyaprada, LKP, dan tim pengembang aplikasi



Orientasi Teknis Verifikator Penilaian Kinerja LKP Tahun 2024 (2-5 Juli 2024)

a) Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi di antara calon verifikator tentang:

Mekanisme PK-LKP tahun 2024

Instrumen dan aplikasi PK-LKP tahun 2024

Tugas verifikator PK-LKP tahun 2024

b) Hasil yang diharapkan adalah tercapainya persamaan persepsi tentang:

Mekanisme PK-LKP tahun 2024

Instrumen dan aplikasi PK-LKP tahun 2024

Tugas verifikator PK-LKP tahun 2024

c) Narasumber/Peserta berasal dari unsur akademisi, praktisi, widyaprada, LKP, UPT, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan tim pengembang aplikasi

Verifikasi Penilaian Kinerja LKP Tahun 2024 (19 Agustus–27 September 2024)

- a) Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan kelengkapan data kinerja di aplikasi PK-LKP divisitasi
- b) Hasil yang diharapkan adalah 119 LKP sasaran diverifikasi oleh verifikator. LKP sasaran tersebar di 24 provinsi dan 73 kabupaten/kota di Indonesia.
- c) Narasumber/Peserta berasal dari unsur 6 UPT, 7 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, praktisi, dan Direktorat Kursus dan Pelatihan

Pleno Penetapan Hasil Penilaian Kinerja LKP Tahun 2024 Tahap 1 (21–23 Oktober 2024)

- a) Tujuan
 - menyamakan persepsi di antara peserta pleno tentang instrumen dan rubrik PK-LKP tahun 2024, serta mekanisme pleno penetapan PK-LKP tahun 2024
 - merumuskan rekomendasi penetapan hasil PK-LKP tahun 2024
- b) Hasil yang diharapkan
 - Tercapainya persamaan persepsi di antara peserta pleno tentang instrumen dan rubrik PK-LKP tahun 2024, serta mekanisme pleno penetapan PK-LKP tahun 2024
 - rekomendasi penetapan hasil PK-LKP tahun 2024
- c) Narasumber/Peserta berasal dari unsur Ketua Tim Kerja, Widyaprada Ahli Utama, dan Kasubbag TU Ditsuslat, akademisi, praktisi, widyaprada, tim pengembang aplikasi, serta verifikator dari UPT dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Pleno Penetapan Hasil Penilaian Kinerja LKP Tahun 2024 Tahap 2 (5–7 November 2024)

- a) Tujuan
 - menetapkan skor hasil verval menjadi skor validasi
 - merekomendasikan penetapan hasil PK-LKP tahun 2024
- b) Hasil yang diharapkan
 - Skor hasil validasi
 - Rekomendasi penetapan hasil PK-LKP tahun 2024
- c) Narasumber/Peserta berasal dari unsur Ketua Tim Kerja, Widyaprada Ahli Utama, dan Kasubbag TU Ditsuslat, akademisi, praktisi, widyaprada, serta tim pengembang aplikasi

Pleno Penetapan Hasil Penilaian Kinerja LKP Tahun 2024 Tahap 3 (14–16 November 2024)

- a) Tujuan dari kegiatan ini adalah menetapkan hasil PK-LKP tahun 2024 untuk disyahkan dalam bentuk surat keputusan Direktur Kursus dan Pelatihan
- b) Hasil yang diharapkan adalah penetapan hasil PK-LKP tahun 2024
- c) Narasumber/Peserta berasal dari unsur Ketua Tim Kerja, Widyaprada Ahli Utama, dan Kasubbag TU Ditsuslat, akademisi, praktisi, widyaprada, serta tim pengembang aplikasi

Diseminasi Hasil Penilaian Kinerja LKP Tahun 2024 (21-23 November 2024)

a) Tujuan

hususnya kepada LKP peserta PK-LKP tahun 2024 dan Dinas Pendidikan Kab/Kota, secara daring, menyampaikan: paparan laporan hasil penetapan PK-LKP tahun 2024; penjelasan penggunaan aplikasi PK-LKP dalam mengakses hasil penetapan PK-LKP tahun 2024; penjelasan mengenai mekanisme pengajuan keberatan Menyusun bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan PK-LKP tahun 2024

b) Hasil yang diharapkan

Tersampainya informasi, khususnya kepada LKP dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, mengenai: laporan hasil penetapan PK-LKP tahun 2024; penjelasan penggunaan aplikasi PK-LKP dalam mengakses hasil penetapan PK-LKP tahun 2024; penjelasan mengenai mekanisme pengajuan keberatan Bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan PK-LKP tahun 2024

c) Narasumber/Peserta berasal dari unsur Ketua Tim Kerja, Widyaprada Ahli Utama, dan Kasubbag TU Ditsuslat, akademisi, praktisi, widyaprada, LKP, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta tim pengembang aplikasi

Analisis dan Evaluasi Hasil Penilaian Kinerja LKP Tahun 2024 (28-30 November 2024)

a) Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk merumuskan hasil analisis dan evaluasi atas penetapan PK-LKP tahun 2024 untuk disusun menjadi Laporan Pelaksanaan PK-LKP Tahun 2024

b) Hasil yang diharapkan adalah hasil analisis dan evaluasi atas penetapan PK-LKP tahun 2024

c) Narasumber/Peserta berasal dari unsur Ketua Tim Kerja, Widyaprada Ahli Utama, dan Kasubbag TU Ditsuslat, akademisi, praktisi, widyaprada, serta tim pengembang aplikasi

Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kinerja LKP (17-19 Desember 2024)

a) Tujuan

- melakukan penelaahan kembali berdasarkan keberatan LKP terhadap penetapan PK-LKP tahun 2024 yang telah diumumkan secara daring pada tanggal 22 November 2024, dengan memperhatikan bukti pendukung tambahan yang dilampirkan
- melakukan konfirmasi secara daring kepada LKP yang mengajukan keberatan, mengenai alasan keberatan dan bukti pendukungnya
- merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi PK-LKP tahun 2024 untuk disusun menjadi Laporan Pelaksanaan PK-LKP Tahun 2024.
- memfinalkan Laporan PK-LKP Tahun 2024

b) Hasil yang diharapkan

- penetapan hasil PK-LKP tahun 2024 setelah penelaahan kembali
- rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi PK-LKP tahun 2024
- Laporan PK-LKP Tahun 2024

c) Narasumber/Peserta berasal dari unsur akademisi, praktisi, widyaprada, dan tim pengembang aplikasi. Secara daring, LKP yang mengajukan keberatan

Jumlah Instruktur dan Pengelola LKP Magang di Dunia Kerja

Target 2024 : 30 Orang

Capaian 2024: 30 Orang



Definisi Program

Program Magang pada kursus dan pelatihan merupakan bagian penyelarasan antara keterampilan yang dimiliki saat ini dengan kompetensi di dunia kerja yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan instruktur terkait kompetensi terbaru, teknologi termutakhir, budaya kerja, dan karakter yang diterapkan di dunia kerja/industri; memberikan pengalaman kepada instruktur untuk memadukan kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi terbaru di dunia kerja/industri; memfasilitasi instruktur terkait proses produksi dan kemampuan teknis serta memfasilitasi kerjasama antara LKP dengan dunia kerja/industri.

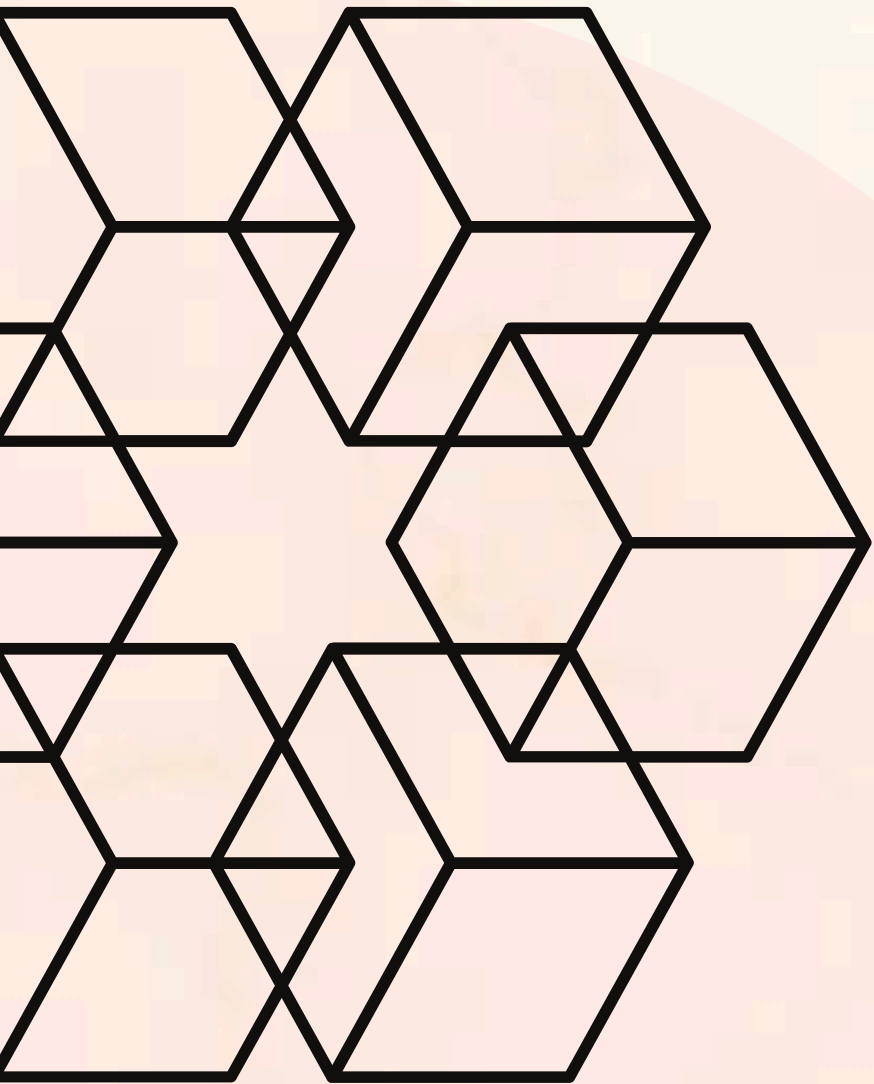
Output :

- 30 instruktur dan pengelola mengikuti program magang selama 10 hari.
- 15 instruktur dan pengelola mendapatkan sertifikat dari Indonesia Coffee Academy bidang keterampilan Barista
- 15 instruktur dan pengelola mendapatkan sertifikat dari Yamaha DDS2 Jawa Barat bidang keterampilan Teknik Sepeda Motor

Outcome :

- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan instruktur dan pengelola kursus dan pelatihan terkait kompetensi terbaru, teknologi termutakhir, budaya kerja, dan karakter yang diterapkan di dunia kerja/industri.
- Pengalaman baru yang didapatkan instruktur dan pengelola kursus dan pelatihan untuk memadukan kompetensi yang dimilikinya dengan kompetensi terbaru di dunia kerja/industri.
- Meningkatnya kompetensi teknis instruktur dan pengelola kursus dan pelatihan terkait proses produksi dan penggunaan teknologi termutakhir di dunia kerja/industri serta kemampuan teknis sebagai seorang instruktur.
- Terjalannya kerja sama antara Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan dunia kerja/industri.





Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- 1). Persiapan
- Koordinasi Program Magang Instruktur (19- 21 Februari 2024)
 - Penyusunan Program Magang Instruktur Kursus dan Pengelola (20-22 Maret 2024)
 - Reviu Pedoman Magang (26-28 Maret 2024)
- 2). Pelaksanan
- Sosialisasi Program Magang (5-7 Mei 2024)
 - Seleksi Administrasi Program Magang (13-17 Mei 2024)
 - Pelaksanaan Program Magang (3-12 Juni 2024)

Gambaran Pelaksanaan Kegiatan

Koordinasi Program Magang Instruktur (19- 21 Februari 2024)

Tujuan

- Mempersiapkan rangkaian program magang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- Menyelaraskan kompetensi teknis instruktur dengan kompetensi terbaru, teknologi termutakhirkan, budaya, dan karakter yang diterapkan di dunia kerja/industri.
- Meningkatkan sinergitas antara Pokja Pembelajaran dan Uji Kompetensi dengan DUDIKA terkait Program Magang Instruktur dan Pengelola Kursus dan Pelatihan.
- Memperkuat pemahaman tentang Program Magang Instruktur dan Pengelola Kursus dan Pelatihan, termasuk tujuan, manfaat, dan mekanismenya.
- Mengidentifikasi serta mitigasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan Program Magang Instruktur dan Pengelola Kursus dan Pelatihan.

Hasil:

Tersusunnya draf pedoman program Magang Instruktur Kursus dan Pelatihan Direktorat Kursus dan Pelatihan

Narasumber:

1. Mahfuron ST, United E-Motor, Semarang
2. Santi Nurhasani, PT Inovindo Digital Media, Bandung
3. Putri Nirwana, PT Inovindo Digital Media, Bandung
4. Faiz Rifaldi, United E-Motor, Semarang
5. Donna Elvina, Indonesia Coffee Academy, Anomali Coffee, Jakarta
6. Tania Angraeni, Indonesia Coffee Academy, Anomali Coffee, Jakarta

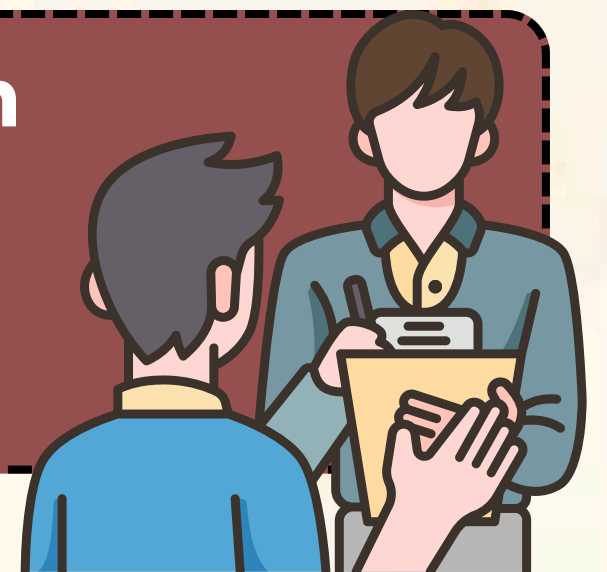


- 1) Penyusunan Program Magang Instruktur dan Pengelola LKP dalam rangka menyusun draf pedoman magang bersama industri.
- 2) Reviu Pedoman Magang Instruktur dan Pengelola LKP, menyempurnakan pedoman magang bersama industri
- 3) Sosialisasi Program Magang Instruktur dan Pengelola LKP, untuk memperkenalkan tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan program magang kepada calon peserta, meningkatkan partisipasi peserta magang dan memberikan penjelasan terkait program magang.
- 4) Seleksi Administrasi Program Magang Instruktur dan Pengelola LKP bertujuan untuk memastikan peserta magang sesuai dengan kriteria , seleksi dilaksanakan secara administrasi sesuai dengan kriteria masing-masing bidang keterampilan untuk seleksi kompetensi teori maupun praktik dilaksanakan melalui daring oleh DUDIKA
- 5) Pelaksanaan Program Magang Instruktur dan Pengelola LKP dilaksanakan selama 10 hari, bidang keterampilan Barista di Indonesia Coffee Academy by Anomali Kopi dan Bidang keterampilan Teknik Sepeda Motor di Yamaha DDS2 Jawa Barat, masing- masing bidang diikuti 15 peserta dari unsur instruktur dan pengelola LKP



Peserta Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya

Target 2024 : 900 Orang
Capaian 2024: 1121 Orang



Definisi Program, Output dan Outcome Program

Program kursus dan pelatihan sebagai bagian dari program pendidikan vokasi menekankan pada pengembangan kompetensi profesional. Penguasaan kompetensi profesional mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI dan kebutuhan dunia kerja. Uji kompetensi sebagai bentuk penjaminan mutu hasil proses pembelajaran kursus dan pelatihan yang dilakukan oleh penguji uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan pelatihan. Uji kompetensi dapat diikuti oleh peserta kursus dari lembaga kursus dan pelatihan atau warga masyarakat yang belajar secara mandiri.

Uji kompetensi dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang dikukuhkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lulusan kursus dan pelatihan yang berhasil dalam uji kompetensi berhak mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai legitimasi penguasaan kompetensi pada bidang keterampilan tertentu yang membantu mereka mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan/ penghasilan yang lebih baik. Fakta menunjukkan bahwa tidak semua peserta didik kursus dan pelatihan dapat mengikuti uji kompetensi diantaranya karena terbatasnya kemampuan ekonomi. Memahami hal tersebut Direktorat Kursus dan Pelatihan memfasilitasi bantuan pemerintah penyelenggaraan uji kompetensi.

Bantuan pemerintah penyelenggaraan uji kompetensi adalah bantuan yang diberikan kepada peserta didik kursus dan pelatihan atau warga masyarakat yang belajar mandiri untuk mengikuti uji kompetensi yang dikelola oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Dana bantuan penyelenggaraan uji kompetensi seluruhnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tujuan Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Uji Kompetensi yaitu untuk memperluas akses bagi masyarakat untuk mengikuti uji kompetensi, meningkatkan kualitas dan penjaminan mutu hasil pendidikan kursus dan pelatihan melalui uji kompetensi, meningkatkan jumlah peserta didik kursus dan pelatihan atau warga masyarakat yang belajar mandiri untuk memiliki sertifikat kompetensi.



Sasaran Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Uji Kompetensi adalah peserta didik kursus dan pelatihan serta warga masyarakat yang belajar mandiri dengan kriteria berusia 17 sampai dengan 25 tahun, WNI yang berdomisili di dalam atau luar negeri, bukan penerima bantuan pemerintah Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) tahun 2024, dan tidak berstatus sebagai peserta didik pada pendidikan formal. Pada tahun 2024, sebanyak 1.121 orang telah menerima bantuan uji kompetensi.

Tata cara pengajuan bantuan uji kompetensi melalui aplikasi SiKompeten dapat dilihat sebagaimana berikut:

- Peserta melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan <https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/ujk/> ;
- Peserta memilih program bantuan uji kompetensi dan mengisi data pelaksanaan uji kompetensi;
- LSK melakukan verifikasi data calon peserta per TUK;
- LSK mengajukan proposal yang berisi calon peserta dan RAB kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan;
- Penetapan peserta penerima bantuan uji kompetensi;
- Penandatanganan surat perjanjian kerja sama;
- LSK menyampaikan laporan awal kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan melalui sistem;
- Pencairan/ penyaluran dana bantuan penyelenggaraan uji kompetensi;
- LSK menyelenggarakan uji kompetensi di TUK yang ditunjuk, TUK mendokumentasikan proses pelaksanaan uji kompetensi;
- LSK melaporkan proses penyelenggaraan uji kompetensi dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana melalui sistem.

Setelah melalui serangkaian tahapan, pada tahun 2024 sebanyak 12 LSK yang menerima program bantuan penyelenggaraan uji kompetensi dengan detail dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

Tabel TUK/LSK Penerima Bantuan Uji Kompetensi

No	Nama TUK	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Nama LSK
1	TUK LKP Family Institute	Jawa Timur	Kab. Pamekasan	LSK Bahasa Inggris
	TUK Safira English Course	Jawa Timur	Kab. Situbondo	
	LKP Mr. Hanz Education Centre (MEC) Bangkalan	Jawa Timur	Kab. Bangkalan	
2	TUK Graha Wisata	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	LSK Barista
	TUK Akpar Nusantara	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	
	TUK Study Hotel Executive	Jawa Timur	Kota Kediri	
	TUK Sangkuriang Maritim Hotel Institute	Jawa Barat	Kota Bogor	
	TUK Smile Zone	Jawa Tengah	Kab. Temanggung	
3	TUK Ganesha	Jawa Timur	Kab. Malang	LSK Bordir dan Sulam
	TUK PKBM Handayani	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	
4	TUK LKP Yale Communication	Kalimantan Barat	Kab. Kuburaya	LSK Broadcasting
5.	TUK Rida Hantaran	Jawa Timur	Kab. Ponorogo	LSK Hantaran
6.	TUK Delfi	Jawa Tengah	Kab. Wonosobo	LSK Pekarya Kesehatan
7.	TUK KH.A. Wahid Hasyim	Jawa Timur	Kab. Pasuruan	LSK Pengasuh Anak
8.	TUK Budi Mulia Dua Culinary School	D.I. Yogyakarta	Kab. Sleman	LSK Perhotelan dan Kapal Pesiar Indonesia
	TUK Voyager International School	Lampung	Kota Bandar Lampung	
	TUK PHI Pekanbaru	Riau	Kota Pekanbaru	
	TUK Adam Mulia	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	
	TUK Akpar Nusantara Tasikmalaya	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	
	TUK Omega Marine Hotel Institute	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	
9.	TUK PITRA LP3T	Jawa Barat	Kota Bekasi	LSK Pitra Indonesia
10.	TUK Widyaloka Palu	Sulawesi Tengah	Kota Palu	LSK Sekretaris
11.	TUK NAN'S	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	LSK Tata Rias Pengantin
	TUK AURA	Sumatera Utara	Kab. Simalungun	
12.	TUK FinAcc Consultants	Jambi	Kota Jambi	LSK Teknisi Akuntansi Bond 09

Tabel Sebaran Peserta Uji Kompetensi

No.	Nama LSK	Total Peserta
1.	LSK Bahasa Inggris	125
2.	LSK Barista	94
3.	LSK Bordir dan Sulam	124
4.	LSK Broadcasting	74
5.	LSK Hantaran	25
6.	LSK Pekarya Kesehatan	25
7.	LSK Pengasuh Anak	16
8.	LSK Perhotelan dan Kapal Pesiar Indonesia	375
9.	LSK Pitra Indonesia	50
10.	LSK Sekretaris	70
11.	LSK Tata Rias Pengantin	93
12.	LSK Teknisi Akuntansi Bond 09	50
Jumlah		1.121

Penetapan Bantuan Uji Kompetensi 2024

- LSK Penerima bantuan berdasarkan : 12 Lembaga
- TUK Penerima bantuan berdasarkan : 24 TUK
- Proposal : 21
- Peserta Uji Kompetensi : 1.121 orang
- Anggaran : Rp 629.910.000



Dari data di atas terlihat bahwa LSK Perhotelan dan Kapal Pesiar Indonesia adalah lembaga dengan peserta yang paling banyak menerima bantuan uji kompetensi. Hal ini menunjukkan kebutuhan uji kompetensi pada bidang keterampilan perhotelan dan kapal pesiar masih cukup tinggi jika dibandingkan LSK lainnya.

Tabel Sebaran Peserta Uji Kompetensi Berdasarkan Hasil Uji Kompetensi

No.	Nama LSK	Kompeten	Tidak Kompeten	Tidak Hadir	Total
1.	LSK Bahasa Inggris	108	17	0	125
2.	LSK Barista	80	14	0	94
3.	LSK Bordir dan Sulam	119	3	2	124
4.	LSK Broadcasting	60	14	0	74
5.	LSK Hantaran	25	0	0	25
6.	LSK Pekarya Kesehatan	20	5	0	25
7.	LSK Pengasuh Anak	13	3	0	16
8.	LSK Perhotelan dan Kapal Pesiar Indonesia	355	20	0	375
9.	LSK Pitra Indonesia	0	0	50	50
10.	LSK Sekretaris	39	31	0	70
11.	LSK Tata Rias Pengantin	84	9	0	93
12.	LSK Teknisi Akuntansi Bond 09	18	32	0	50
Jumlah		921	148	52	1.121

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 1.121 peserta yang menerima bantuan uji kompetensi, sebanyak 921 dinyatakan sudah kompeten atau capaian kelulusannya sebesar 82,16%.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Sosialisasi Bantuan Uji Kompetensi
- 2) Penerimaan proposal
- 3) Verifikasi dan penetapan proposal
- 4) Kelengkapan dokumen
- 5) Pencairan bantuan
- 6) Pelaksanaan uji kompetensi
- 7) Pelaporan



Gambaran Pelaksanaan Kegiatan

Sosialisasi Bantuan Uji Kompetensi

Kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan program bantuan pemerintah penyelenggaraan uji kompetensi kepada pihak terkait.

Penerimaan proposal

Waktu pengumpulan proposal bantuan uji kompetensi yang diajukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi.

Verifikasi dan penetapan proposal

Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikator yang terdiri dari tenaga akademis dan tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Direktur Kursus dan Pelatihan. Setelah proses verifikasi selesai, pleno dilaksanakan untuk membahas hasil verifikasi serta dilakukan penetapan mengenai proposal yang diterima atau ditolak.

Kelengkapan dokumen

Lembaga melengkapi dokumen yang dibutuhkan seperti Surat Perjanjian Kerja sama (SPK), Pakta Integritas, dan Laporan Awal.

Pencairan bantuan

Pencairan dana program bantuan penyelenggaraan uji kompetensi dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening masing-masing Lembaga Sertifikasi Kompetensi.

Pelaksanaan uji kompetensi

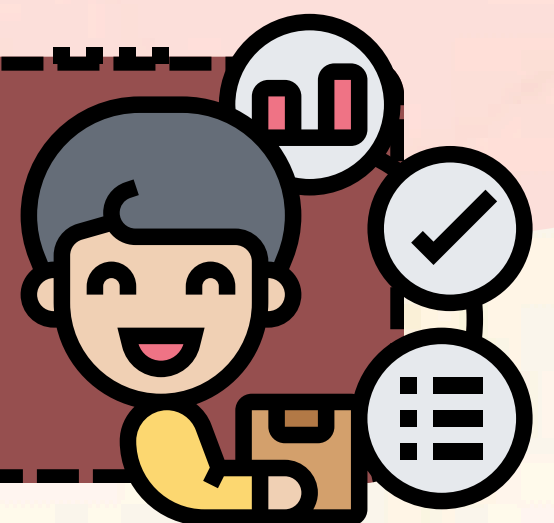
Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) menyelenggarakan uji kompetensi di TUK yang ditunjuk.

Pelaporan

Lembaga Sertifikasi Kompetensi melaporkan proses dan hasil penyelenggaraan uji kompetensi serta pertanggungjawaban penggunaan dana.

Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya

Target 2024 : 80 Orang
Capaian 2024: 93 Orang



Definisi Program, Output dan Outcome Program

Program Pengelola Uji Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pengelola lembaga dalam menyelenggarakan uji kompetensi. Program ini mencakup serangkaian kegiatan bimbingan teknis dan penguatan yang ditujukan untuk pengelola lembaga yang menyelenggarakan uji kompetensi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mereka mengenai mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, penyelenggaraan uji kompetensi, dan penggunaan aplikasi.

Output program:

93 orang pengelola uji kompetensi mengikuti bimbingan teknis dan penguatan pengelola uji kompetensi.

Outcome program:

- Pengelolaan dana dan penyelenggaraan uji kompetensi yang lebih transparan dan akuntabel.
- Pengelola uji kompetensi memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, penyelenggaraan uji kompetensi, dan penggunaan aplikasi.
- Sinergi yang lebih kuat antara lembaga sertifikasi kompetensi dan organisasi profesi.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- Bimbingan Teknis Penguatan Admin Penyelenggara Uji Kompetensi
- Bimbingan Teknis dan Penguatan Pengelola Uji Kompetensi Tahap 1
- Bimbingan Teknis dan Penguatan Pengelola Uji Kompetensi Tahap 2
- Bimbingan Teknis dan Penguatan Pengelola Uji Kompetensi Tahap 3

Gambaran Pelaksanaan Kegiatan

Bimbingan Teknis Penguatan Admin Penyelenggara Uji Kompetensi

Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Admin Pengelolaan Uji Kompetensi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para admin Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dalam pengelolaan penyelenggaraan uji kompetensi melalui Aplikasi "SiKompeten."

Bimbingan Teknis dan Penguatan Pengelola Uji Kompetensi Tahap 1

Kegiatan Bimbingan Teknis dan Penguatan Pengelola Uji Kompetensi Tahap 1 dilaksanakan untuk memberikan penguatan dan sosialisasi kepada pengelola uji kompetensi di masing-masing Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) mengenai pengelolaan penyelenggaraan uji kompetensi.

Bimbingan Teknis dan Penguatan Pengelola Uji Kompetensi Tahap 2

Kegiatan Bimbingan Teknis dan Penguatan Pengelola Uji Kompetensi Tahap 2 dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengurus Organisasi Profesi sebagai pembentuk dan pembina Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Pelaksanaan kegiatan ini mencakup sesi presentasi mengenai sinergitas antara organisasi profesi dan lembaga sertifikasi kompetensi, serta penguatan infrastruktur dan pranata organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, peserta juga diberikan pelatihan mengenai penggunaan aplikasi SiKompeten untuk memfasilitasi pengelolaan uji kompetensi secara efektif.

Bimbingan Teknis dan Penguatan Pengelola Uji Kompetensi Tahap 3

Kegiatan Bimbingan Teknis dan Penguatan Pengelola Uji Kompetensi Tahap 3 dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan lembaga memahami pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana bantuan uji kompetensi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan pelatihan mengenai prosedur pengelolaan dana dan penyelenggaraan uji kompetensi, termasuk penyusunan laporan awal, pelaksanaan uji kompetensi, dan laporan akhir.



Jumlah Penguji Uji Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya

Target 2024 : 100 Orang
Capaian 2024: 100 Orang



Definisi Program

Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguji Uji Kompetensi merupakan program pelatihan yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para penguji dalam melaksanakan penilaian kompetensi. Tujuan utama dari bimtek ini adalah untuk memastikan bahwa penilaian yang dilakukan oleh para penguji memiliki kualitas yang tinggi, objektif, dan reliabel.

Penguji berasal dari praktisi, akademisi atau dunia usaha dan dunia industri yang telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi penguji yang sesuai dengan industri. Kualitas penyelenggaraan uji kompetensi ditunjang oleh kompetensi penguji. Penguasaan dan pemahaman Standar Kompetensi Lulusan yang telah disusun, menguasai Teknik praktik dan teori dengan benar, menguasai indikator dan cara penilaian yang tepat adalah bagian dari kompetensi penguji. Kebaharuan pengetahuan dan Teknik praktik yang terus berkembang mengharuskan para penguji mengupgrade diri secara berkelanjutan agar tidak tertinggal dan terus terbarukan. Atas dasar itulah program peningkatan kompetensi penguji perlu dilaksanakan.

Output dari kegiatan ini adalah membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang penguji yang kompeten, total penguji uji kompetensi yang mengikuti Bimtek Penguji Uji Kompetensi berjumlah 100 penguji.

Outcome Bimtek Penguji Uji Kompetensi adalah:

1. Peningkatan Kualitas Penilaian

- Peserta Bimtek diharapkan mampu melakukan penilaian yang lebih objektif dan adil, sehingga hasil penilaian lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Peserta dapat mengembangkan instrumen penilaian yang valid dan reliabel, sehingga mampu mengukur dengan tepat kompetensi yang ingin dinilai.
- Peserta dapat memilih dan menggunakan metode penilaian yang sesuai dengan jenis kompetensi yang akan dinilai.

2. Meningkatnya Konsistensi Penilaian

- Peserta memahami dan menerapkan standar prosedur penilaian yang telah ditetapkan, sehingga hasil penilaian dari berbagai penguji menjadi lebih konsisten.
- Penggunaan rubrik penilaian yang jelas dan konsisten membantu dalam memberikan penilaian yang lebih objektif dan mengurangi bias.

3. Peningkatan Kompetensi Penguji

- Peserta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang teori dan praktik penilaian, termasuk pengembangan instrumen, pelaksanaan penilaian, dan analisis hasil.
- Peserta dapat mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam proses penilaian, seperti peserta yang sulit dinilai atau kendala teknis.

4. Kontribusi terhadap Pengembangan Sistem Penilaian

- Peserta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan inovasi-inovasi baru dalam bidang penilaian, seperti penggunaan teknologi informasi atau pengembangan metode penilaian yang lebih efektif.
- Peserta dapat berperan aktif dalam pengembangan kebijakan terkait dengan penilaian kompetensi.

5. Peningkatan Kredibilitas Sertifikasi

Dengan adanya penguji yang kompeten, kredibilitas sertifikasi yang dikeluarkan akan meningkat, sehingga lebih dipercaya oleh masyarakat, industri, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Persiapan

1. Pemberitahuan kepada ketua organisasi profesi (Orpro) pembentuk LSK dalam rangka memenuhi kebutuhan penguji uji kompetensi pada setiap bidang keterampilan, Direktorat Kursus dan Pelatihan akan menyelenggarakan pelatihan bagi para calon penguji uji kompetensi baru yang akan diseleksi sesuai dengan pemetaan kebutuhan penguji pada LSK dari masing-masing bidang keterampilan SKL Jenjang III dengan mengajukan surat calon penguji uji kompetensi baru dan mengisi calon penguji pada link gform;
2. Berdasarkan surat pengajuan dari Orpro, ditentukan 9 (sembilan) bidang keterampilan yang mengikuti Bimtek Calon Penguji Uji Kompetensi berdasarkan ketersediaan jumlah penguji di setiap provinsi atau kabupaten dan jumlah penguji uji kompetensi baru di kabupaten yang tingkat uji kompetensi tinggi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang baru terbentuk di tahun 2024 yang belum memiliki penguji yaitu LSK Hipnoterapi Indonesia dan LSK Terapi Perilaku Berkebutuhan Khusus (TPIBK);
3. Bidang keterampilan yang ditetapkan mengikuti Bimtek Penguji Uji Kompetensi yaitu: bidang Hipnoterapi, TPIBK, Perhotelan, Broadcasting, Barista, Penerbangan-Tata Operasi Darat, Sekretaris, Pekarya Kesehatan dan Pendidik Paud.

Pelaksanaan

- Bimtek Penguji Uji Kompetensi Tahap 1
- Bimtek Penguji Uji Kompetensi Tahap 2
- Bimtek Penguji Uji Kompetensi Tahap 3

Gambaran Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Bimtek Penguji Uji Kompetensi bertujuan untuk melatih calon penguji uji kompetensi baru; memenuhi kebutuhan penguji dari masing-masing bidang keterampilan pada LSK; dan melatih calon penguji uji kompetensi baru agar melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengujian dengan konsep Terbuka, Adil, Terukur dan Objektif (TATO).

Setiap Bimtek Penguji Uji Kompetensi mengikuti tahapan sebagai berikut:

1. **Seleksi Administrasi**, dilaksanakan, berdasarkan persyaratan masing-masing bidang keterampilan
2. **Seleksi Wawancara**, dilaksanakan secara daring
3. **Penetapan Calon Penguji**

Bimtek Penguji Uji Kompetensi Tahap 1

Bimtek Penguji Uji Kompetensi Tahap 1 untuk bidang Perhotelan (11 penguji), Hipnoterapi (11 penguji), dan Terapi Perilaku Berkebutuhan Khusus (11 penguji) total 33 penguji.

Bimtek Penguji Uji Kompetensi Tahap 2

Bimtek Penguji Uji Kompetensi Tahap 2 untuk bidang Broadcasting (10 calon penguji), bidang Barista (11 penguji) dan bidang Penerbangan-Tata Operasi Darat (11 calon penguji) total 32 penguji

Bimtek Penguji Uji Kompetensi Tahap 3

Bimtek Penguji Uji Kompetensi Tahap 3 untuk bidang Sekretaris (12 calon penguji), bidang Pekarya Kesehatan (12 calon penguji) dan bidang Pendidik Paud (11 calon penguji) total 35 calon penguji

Total 100 Penguji Uji Kompetensi mengikuti Bimtek Penguji Uji Kompetensi pada tahun 2024

Jumlah LKP yang Menyelenggarakan Program RPL dengan Perguruan Tinggi

Target 2024 : 50 Lembaga
Capaian 2024: 50 Lembaga



Definisi Program, Output dan Outcome Program

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan formal atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pendidikan formal. Hal ini sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 6 yang menyatakan bahwa “Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.” Proses penyetaraan ini memperhatikan hasil capaian pembelajaran dari masing-masing jalur pendidikan dengan capaian pembelajaran yang diharapkan oleh masing-masing jenjang pendidikan tinggi yang dituju.

Output program:

Terfasilitasi peninjauan penerapan RPL antara LKP dengan Perguruan Tinggi melalui pertemuan dengan LLDIKTI di 8 Wilayah.

Outcome program:

- Sudah ada kerjasama 51 LKP dengan perguruan tinggi dalam rangka menerapkan program RPL bagi lulusan kursus dan pelatihan.
- Sebagian LKP yang bekerjasama telah dapat memfasilitasi lulusan, pengelola dan instruktur untuk melanjutkan pendidikan tinggi melalui jalur RPL sebanyak 58 orang di tahun 2024.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- Sosialisasi Program Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau bagi LKP
- Koordinasi Penerapan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi LKP
- Fasilitasi Penerapan RPL antara Perguruan Tinggi dengan LKP
- Evaluasi Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau

Gambaran Pelaksanaan Kegiatan

Sosialisasi Program Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi LKP, pelaksanaan program ini diawali dengan kegiatan sosialisasi program penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi LKP, hal ini bertujuan agar semakin banyak LKP dan Perguruan Tinggi memiliki informasi mengenai kesempatan kerja sama yang dapat dilakukan oleh LKP dengan Perguruan Tinggi salah satunya adalah dengan fasilitasi lulusan, pengelola dan instruktur LKP untuk melanjutkan pendidikan tinggi melalui jalur RPL. Peserta kegiatan terdiri dari unsur Perguruan Tinggi penyelenggara RPL yang sudah terdaftar di SIERRA dan juga LKP.

Koordinasi Penerapan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi LKP, kegiatan ini bertujuan mengevaluasi tindak lanjut kerjasama dengan perguruan tinggi tahun 2023, mendata pencapaian target peserta RPL di masing-masing perguruan tinggi yang bekerjasama, mengidentifikasi program studi jalur RPL yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi tahun 2024; dan menjajaki skema bantuan biaya kuliah mahasiswa jalur RPL.

Fasilitasi Penerapan RPL antara Perguruan Tinggi dengan LKP, tujuan kegiatan adalah Mendorong terciptanya kerjasama penerapan RPL antara perguruan tinggi dan LKP dan menyamakan persepsi pelaksanaan penerimaan mahasiswa jalur RPL dari unsur lulusan, instruktur, dan pengelola LKP.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau, tujuan dari kegiatan ini adalah mengevaluasi kendala dan praktik baik penyelenggaraan RPL dan menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut fasilitasi penerapan RPL bagi lulusan LKP.

Jumlah LKP yang menerapkan Pusat Pengembangan Karier

Target 2024 : 20 Lembaga
Capaian 2024: 20 Lembaga



Definisi Program

Pengelolaan Pusat Pengembangan Karir LKP yang lebih terstruktur dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi.

Output

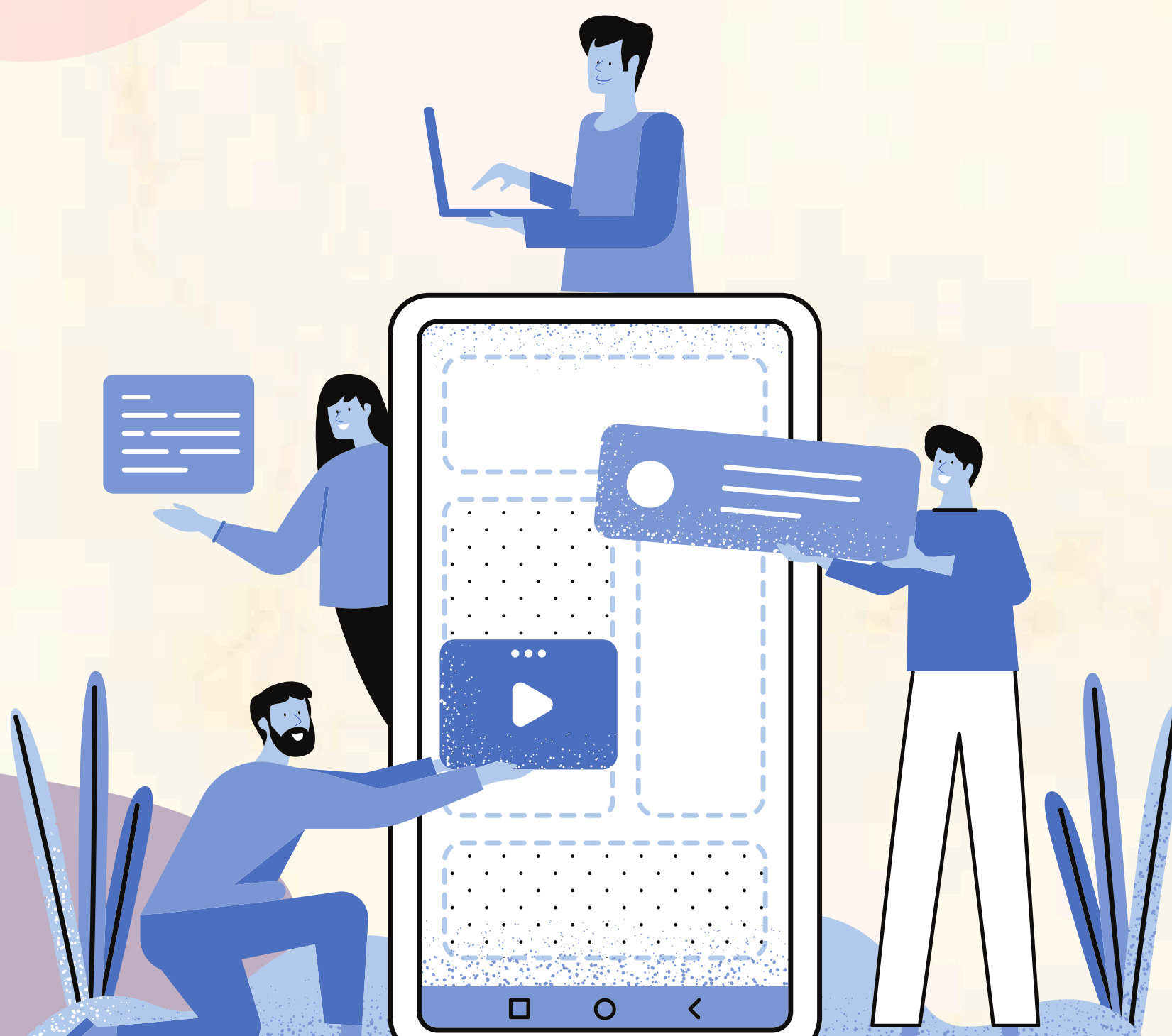
Terselenggaranya Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memiliki atau melaksanakan fungsi Pusat Pengembangan Karir LKP secara lebih terstruktur, terstandar dan bermutu.

Outcome Program

Penyediaan berbagai macam program dan layanan di LKP untuk mendukung pengembangan karier bagi peserta didik, alumni LKP dan warga masyarakat.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- Penyusunan Model Penyelenggaraan Pusat Pengembangan Karir LKP
- Penyusunan Draft Model Pusat Pengembangan Karir LKP
- Pendampingan Penyusunan Model Pusat Pengembangan Karir LKP



Gambaran Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan Draft Model Penyelenggaraan Pusat Pengembangan Karir LKP

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pemetaan penyelenggaraan pengembangan karir yang telah dilakukan LKP dengan berbagai metode penerapan di berbagai bidang kompetensi sehingga dapat menghasilkan sebuah Draft model penyelenggaraan, kegiatan ini dihadiri oleh organisasi mitra LKP, LKP pada bidang kompetensi perhotelan, tata busana, tata kecantikan rambut, tata rias pengantin, Teknik kendaraan ringan dan Komputer/Administrasi Perkantoran serta juga menghadirkan pimpinan dari Direktorat Kursus dan Pelatihan.



Penyusunan Model Penyelenggaraan Pusat Pengembangan Karir LKP

Pada tahapan kegiatan penyusunan model Penyelenggaraan dilaksanakan melalui daring dan luring dengan mengelompokkan LKP sesuai bidang keahliannya untuk masing – masing melakukan pengisian instrumen penyusunan model penyelenggaraan Pusat dengan Draft yang telah disusun pada pertemuan sebelumnya dengan hasil LKP yang hadir dapat memiliki Visi Misi, Struktur Organisasi, Tugas, Pokok dan Fungsi organigram PPK, dan beberapa format pendukung lain yang mendorong dalam melaksanakan fungsi pengembangan karir yang sesuai dengan model yang telah dibuat untuk kemudian dilakukan evaluasi secara Bersama – sama untuk penyempurnaan Model Penyelenggaraan dari Pusat Pengembangan Karir.

Pendampingan Penyusunan Model Pusat Pengembangan Karir LKP

Pendampingan Penyusunan model dilakukan dengan melakukan penyusunan secara langsung ke Lembaga Kursus dan Pelatihan yang telah terpilih melalui data Lembaga yang diambil pada LKP yang memiliki Penilaian Kinerja Tahun 2023 dengan Kinerja Baik, pendampingan penyusunan dilaksanakan ke 5 Lokasi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bidang kompetensi perhotelan, tata busana, tata kecantikan rambut, tata rias pengantin, Teknik kendaraan ringan dan Komputer/Administrasi Perkantoran dari pendampingan penyusunan mendapatkan 20 LKP yang telah melakukan Pengembangan Karir yang sesuai dengan Model Pusat Pengembangan Karir tahun 2024.

Jumlah LKP yang Siap Bertransformasi menjadi Akademi Komunitas

Target 2024 : 20 Lembaga
Capaian 2024: 10 lembaga



Definisi Program, Output dan Outcome Program

Transformasi LKP Menjadi Akademi Komunitas adalah bentuk fasilitasi terhadap LKP yang ingin dan siap untuk melangkah ke jenjang selanjutnya yaitu menjadi satuan pendidikan tinggi vokasi dalam bentuk Akademi Komunitas (AK). Fasilitasi ini dilakukan dengan mendasarkan ketentuan pemenuhan persyaratan pendirian AK sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Output dari kegiatan ini adalah membantu LKP menyusun persyaratan pendirian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Outcome dari program ini adalah LKP dapat mengajukan persyaratan pendirian ke tahapan berikutnya yaitu mendapat rekomendasi dari Idikti setempat, memenuhi persyaratan di Silemkerma hingga mendapatkan izin operasional.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1. Pemetaan Transformasi LKP Menjadi AK
2. Bimbingan Teknis Transformasi LKP Menjadi AK
3. Bimtek Teknis Transformasi LKP Menjadi AK 2
4. Pendampingan Transformasi LKP Menjadi AK
5. Pendampingan Transformasi LKP Menjadi AK 2

Gambaran Pelaksanaan Kegiatan

Pemetaan Transformasi LKP Menjadi AK (4 dan 5 Maret, Karawang)

Kegiatan pemetaan dilakukan terhadap LKP yang telah menyatakan peminatan dan kesanggupan untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk pendirian Akademi Komunitas. Dengan melakukan pemetaan, Direktorat Kursus dan Pelatihan melalui Kelompok Kerja Kelembagaan dapat mengidentifikasi potensi yang dimiliki sekaligus mengantisipasi kendala yang mungkin dihadapi, selain itu juga untuk lebih merancang suatu program pendampingan yang lebih efektif dan efisien. Adapun untuk menjaring calon sasaran, digunakan format google form yang disertai dengan surat pernyataan kesanggupan.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk:

- Memastikan capaian aspek kualitas dan kuantitas
- Merancang bentuk pendampingan yang efektif dan efisien sehingga dapat membantu lkp sasaran dalam pemenuhan persyaratan pendirian AK, dan
- Merancang bentuk koordinasi dengan satuan kerja lain yang relevan dalam upaya percepatan pemenuhan persyaratan pendirian AK.

Bimbingan Teknis Transformasi LKP Menjadi AK

Pendirian AK harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya prodi yang didirikan harus merujuk pada potensi wilayah atau kebutuhan khusus dalam menyediakan tenaga terampil sebagai upaya mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Bimbingan teknis ini dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada lkp sasaran mengenai persyaratan yang bersifat teknis dan administrative. Pelibatan narasumber dari unsur asesor baik dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi maupun dari Direktorat Kelembagaan dan Sumberdaya merupakan salah satu bentuk fasilitasi percepatan pemenuhan persyaratan.

Dilakukan dalam 2 tahap secara hybrid dengan masing-masing tahap diikuti secara luring oleh 5 lkp yang berbeda, dan secara daring oleh lkp lain. Hal ini untuk mengakomodir jarak dan waktu sehingga tujuan fasilitasi dapat tercapai.

Tahap 1 dilaksanakan pada 1 s.d 3 April 2024 di Jatibening, Bekasi dengan peserta yang hadir luring adalah LKP Tallium (Kab. Bandung), LKP ISP Cruiseship (Kota Solo), LKP Bina Mutu Bangsa (Kota Depok) dan LKP LIBMI (Kota Jombang). Narasumber pada kegiatan ini adalah Deni Hidayat dari LL Dikti Wilayah 3 Jakarta.

Sedangkan tahap 2 dilaksanakan 2 s.d 4 Mei di Megacity Bekasi, dengan peserta luring adalah LKP Wahana Tama (Kab Nganjuk), LKP Terra Computer (Kota Kediri), LKP Bentani (Kota Cirebon), LKP LSPTikom (Kota Cirebon), dan LKP Queen Indonesia (Kota Makassar). Narasumber yang hadir adalah Eko Nur Hidayat dan Deni Hidayat dari LL Dikti Wilayah 3 Jakarta.

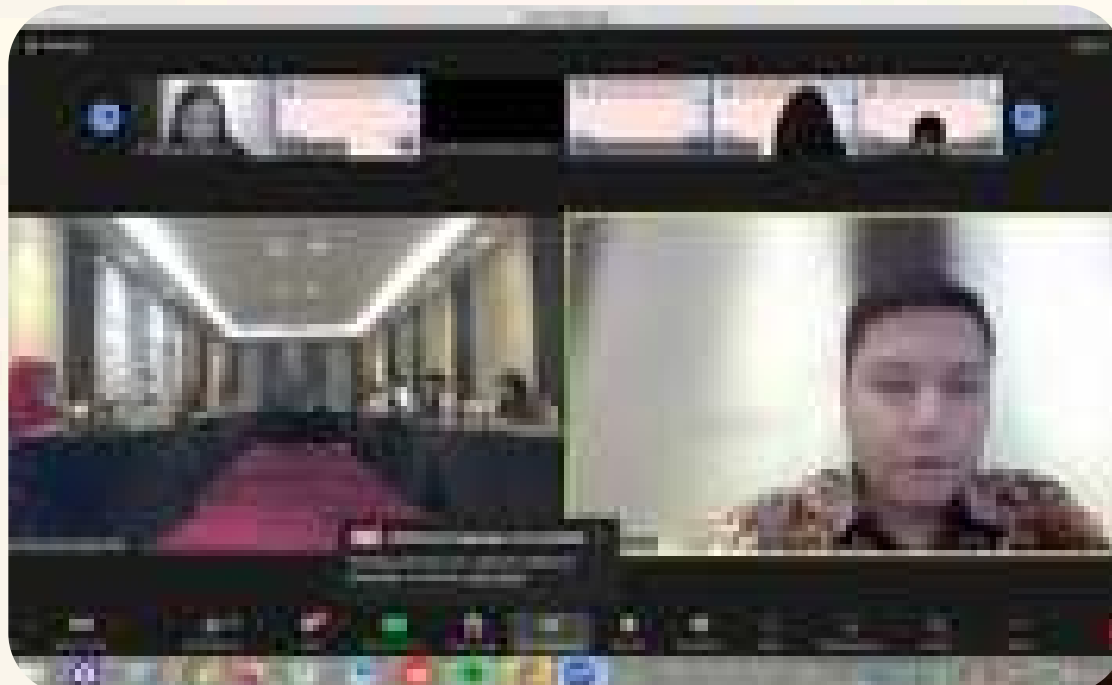
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pelatihan penyusunan persyaratan yang bersifat administratif seperti SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal), kurikulum dan UPPS (Unit Pengelola Program Studi) serta sebagai sarana konsultasi lkp dengan narasumber.

Pendampingan Transformasi LKP Menjadi AK 1 dan 2

Merupakan tahapan lanjutan setelah terlaksananya bimbingan teknis. Sasaran kegiatan ini adalah LKP yang memiliki kemajuan dalam proses penyusunan persyaratan pendirian AK. Terdiri dari 2 tahap pelaksanaan dengan masing-masing tahap terdiri dari 5 lkp sasaran. Pendampingan dilakukan oleh staf dan pimpinan Kelompok Kerja Kelembagaan dengan menghadirkan asesor sebagai narasumber.

Pelaksanaan pendampingan tahap 1 di rentang 25 Juli hingga 1 Agustus 2024, dengan sasaran LKP LIBMI (Jombang), LKP Bina Mutu Bangsa (Depok), LKP ISP Cruiseship (Solo), LKP Tallium (Bandung), dan LKP Bentani (Cirebon).

Sedangkan pelaksanaan tahap 2 pada 25 September hingga 12 Oktober 2024, menyesuaikan dengan ketersediaan waktu tim pendamping dan asesor. Adapun lkp sasaran tahap 2 adalah LKP Pranatamulia (Purwakarta), LKP Abdi Bangsa (Cianjur), LKP Binawan (Jakarta), LKP Terra (Kediri), dan LKP Queen Indonesia (Makassar).



Dalam pelaksanaannya, dengan melihat langsung kondisi lkp, narasumber dan tim pendamping banyak memberikan masukan terkait persyaratan yang bersifat administratif seperti SPMI dan kurikulum. Juga sebagai wadah berkonsultasi terkait hal lain seperti pemenuhan luas lahan minimal termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, kriteria dan syarat linieritas pendidikan calon dosen, syarat kelembagaan dan lain-lain.

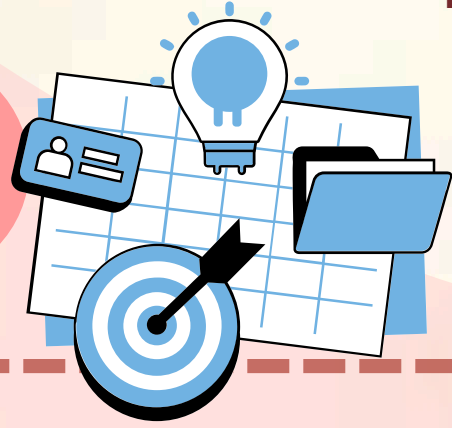
Dari hasil pendampingan Transformasi LKP Menjadi AK Tahun 2024 tahap 1 dan 2, terdapat 3 LKP yang sudah melanjutkan ke tahapan permohonan rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) yaitu LKP Binawan (Jakarta), LKP ISP (Solo), dan LKP Bentani (Cirebon).



Hambatan dan Kendala

- Banyak lembaga belum mengetahui mekanisme penyelenggaraan kursus daring;
- Banyak lembaga yang belum memiliki sarana yang memadai untuk membuat konten yang berkualitas yang dapat diunggah dalam materi pembelajaran;
- Tidak semua lembaga mempunyai unit usaha yang linier dengan keterampilan
- Keterbatasan tempat magang yang sesuai dengan bidang kursus tertentu
- Minimnya instruktur dan pengelola yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi seleksi magang
- Sebagian Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) memiliki tingkat kelulusan dibawah 75%.
- Masih banyak penguji di beberapa bidang belum merata atau tersebar di beberapa provinsi dan kabupaten
- Perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Ditjen Diksi masih memiliki keterbatasan program studi yang selaras dengan bidang keterampilan yang dibelajarkan di LKP dalam satu wilayah.
- Persyaratan seperti luasan lahan minimal adalah 5000m2 sulit untuk dipenuhi oleh LKP yang akan menjadi akademi komunitas

Strategi



- Direktorat Kursus dan Pelatihan bersama Lembaga Sertifikasi Kompetensi melakukan refleksi dan evaluasi penyelenggaraan uji kompetensi.
- LSK berkoordinasi dengan LKP dan TUK menjadwalkan pelaksanaan uji kompetensi secara disiplin agar pelaksanaan sesuai rencana
- Menjajagi peluang kerja sama program RPL kepada Perguruan Tinggi Swasta yang sudah terdaftar di SIERRA
- Mendorong LKP bekerja sama dengan Perguruan Tinggi lintas wilayah
- Pembuatan Model penyelenggaraan Pusat Pengembangan Karir yang sesuai dengan kompetensi yang diselenggarakan oleh LKP sehingga LKP lebih mudah dalam pelaksanaan PPK yang lebih terstruktur.
- Menyediakan wadah untuk pengelola lkp berkonsultasi dengan asesor atau narasumber

Inovasi



- Penerbitan sertifikat kompetensi secara elektronik yang dapat diunduh secara langsung setelah dinyatakan kompeten
- Edukasi dan literasi RPL kepada berbagai pihak melalui video dan media sosial KursusKita
- Model Penyelenggaraan Pusat Pengembangan Karir LKP



Sasaran Kinerja 3



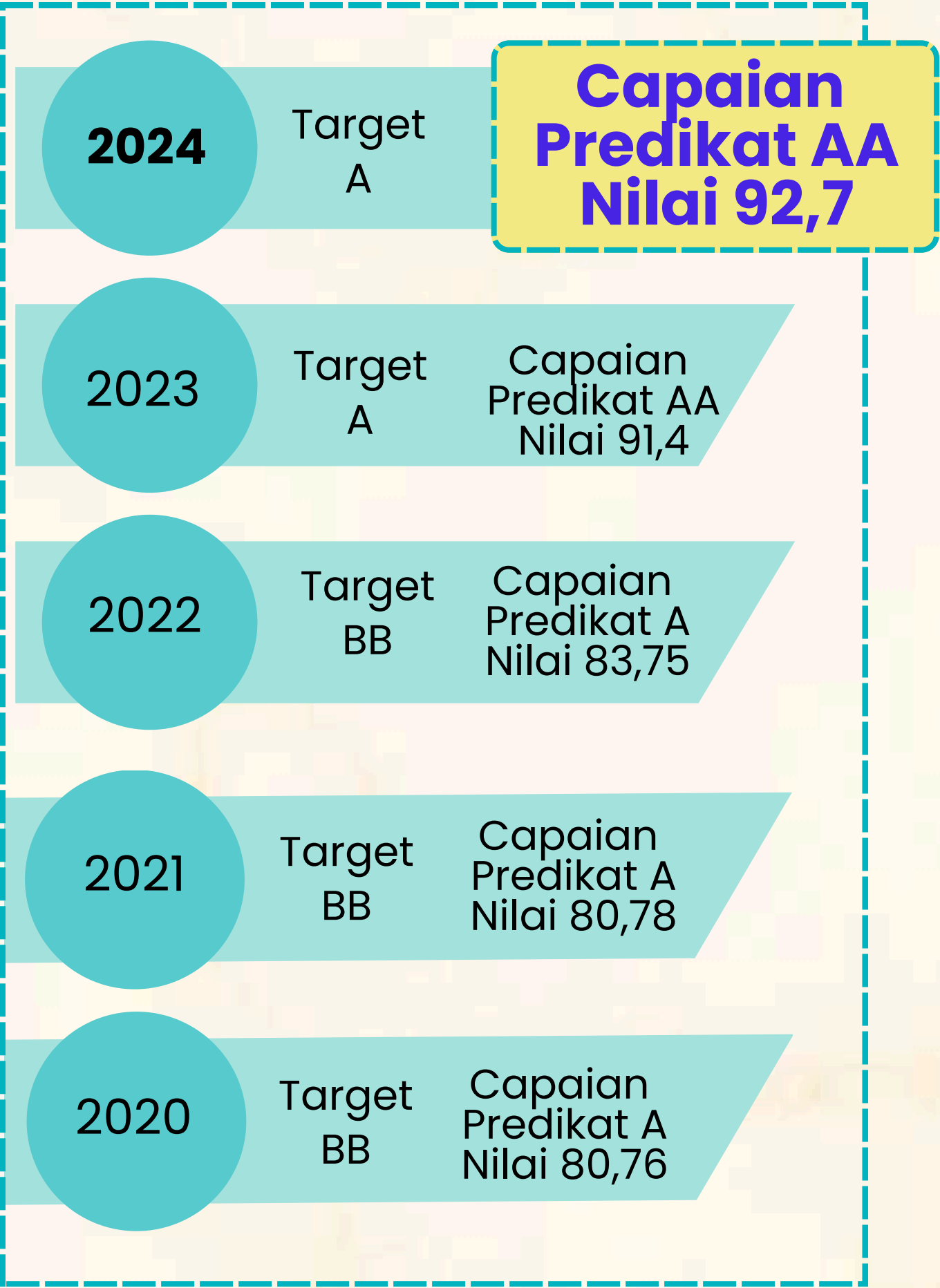
Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan

[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai indikator kinerja kegiatan ini antara lain:

- Meningkatkan keterlibatan publik melalui organisasi mitra dalam pelaksanaan program di Direktorat Kursus dan pelatihan
- Meningkatkan transparansi tata kelola di Direktorat Kursus dan Pelatihan.
- Meningkatkan Akuntabilitas tata kelola di Direktorat Kursus dan Pelatihan.

Penilaian SAKIP diatur dalam Peraturan Menteri PANDan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berdasar pada 4 komponen penilaian yaitu:



Komponen Bobot Nilai Akuntabilitas Kinerja

- Perencanaan Kinerja 30%
- Pengukuran Kinerja 30%
- Pelaporan Kinerja 15%
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25%

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Direktorat Kursus dan Pelatihan Tahun 2024

Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas
Perencanaan Kinerja	30%	29,1
Pengukuran Kinerja	30%	27,6
Pelaporan Kinerja	15%	14,25
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21,75

Hambatan/Kendala

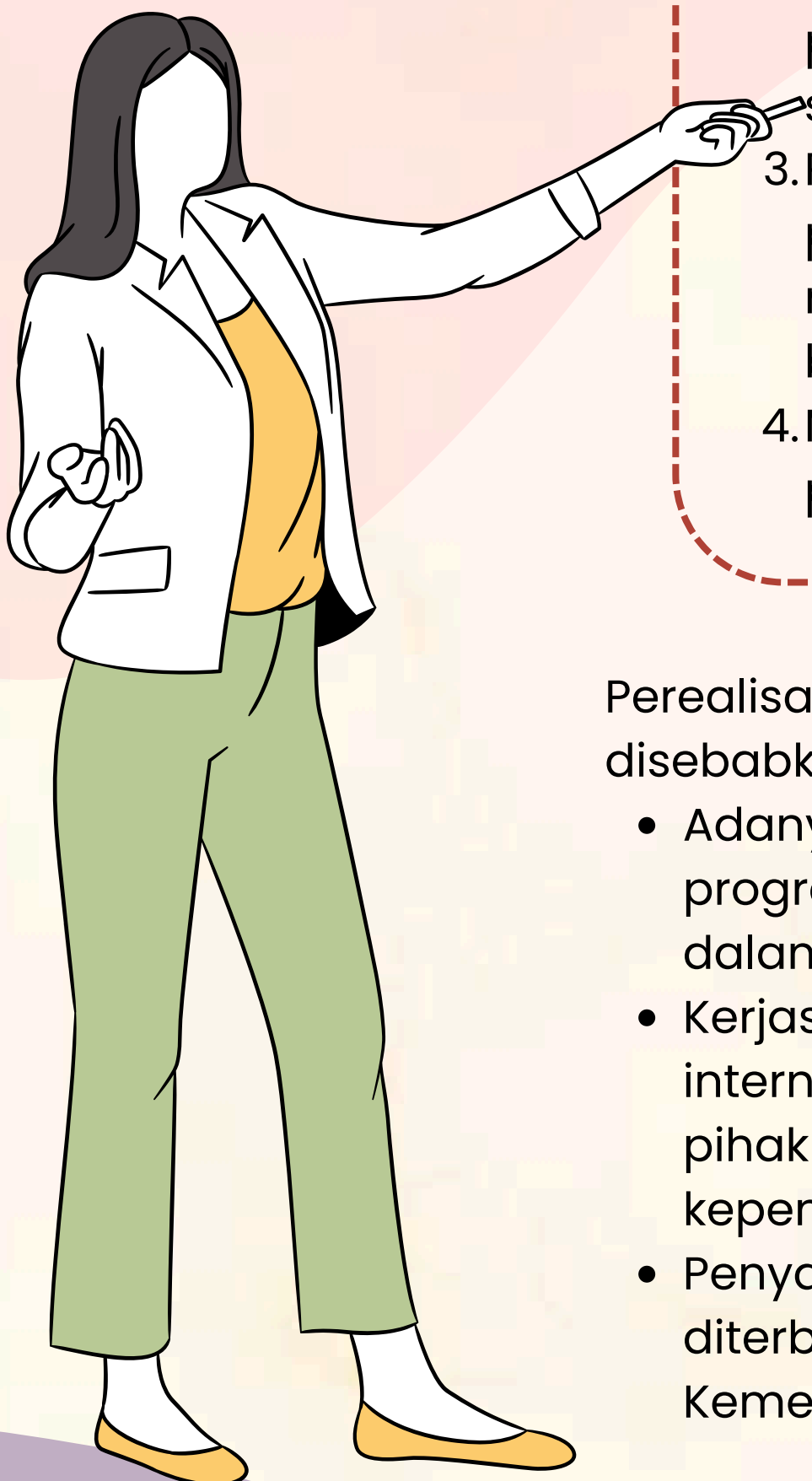


1. Adanya perubahan format penyusunan laporan kinerja sehingga memerlukan penyesuaian kembali;
2. Keterbatasan waktu tim evaluasi dari masing-masing tim kerja untuk pengumpulan kelengkapan data dukung saki
3. Perubahan nomenklatur menyebabkan pegawai harus mengubah kembali SKP
4. Perubahan sistem evaluasi penilaian pada aplikasi spasikita menyebabkan pengukuran kinerja mundur dari jadwal semula



Strategi

1. Berkoordinasi dengan masing-masing kapokja untuk proses pengumpulan data kinerja sesuai batas waktu yang ditentukan
2. Berkoordinasi dengan masing-masing kapokja untuk proses percepatan pengumpulan data dukung kelengkapan saki
3. Penyusunan kembali SKP oleh seluruh pegawai sesuai dengan peta jabatan dari nomenklatur yang baru dengan pemberian batas waktu.
4. Menggunakan penginputan manual untuk pengumpulan data kinerja di triwulan 2.



Perealisasi IKK ini melebihi dari target yang ditetapkan disebabkan yaitu:

- Adanya komitmen pimpinan untuk pelaksanaan program sesuai dengan target yang direncanakan di dalam rencana strategis dan RKAKL.
- Kerjasama dari seluruh pihak yang terkait baik di internal direktorat kursus dan pelatihan, dan juga dari pihak organisasi mitra maupun para pemangku kepentingan lainnya.
- Penyampaian laporan sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh kemenpan RB dan Biro Perencanaan Kemendikbudristek

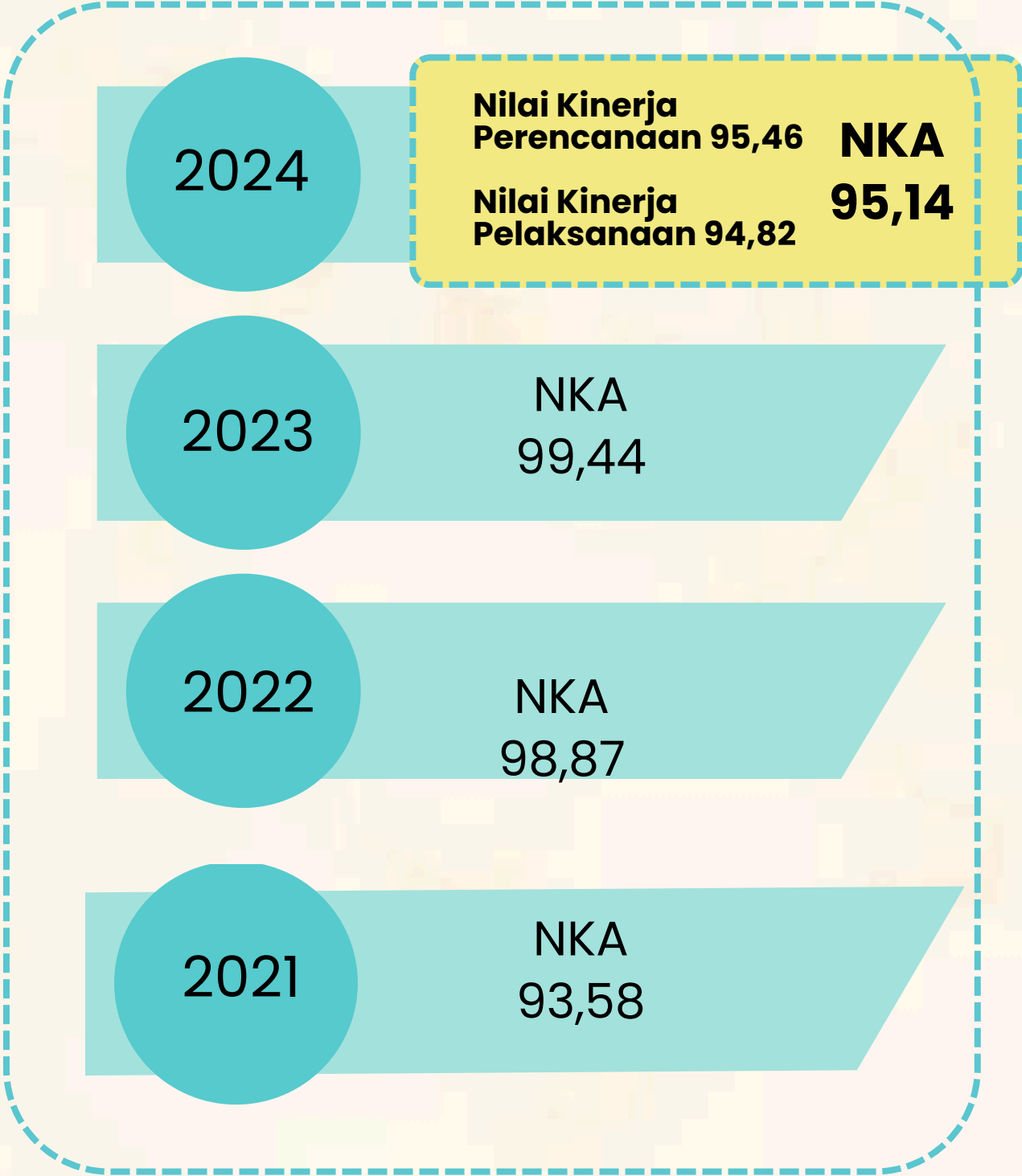
[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai indikator kinerja kegiatan ini antara lain:

- Menjaga Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang telah ditetapkan oleh DJPB Kementerian Keuangan
- Menjaga nilai Evaluasi Kinerja Anggara (EKA) DJA Kementerian Keuangan
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian IKPA dan EKA di Direktorat Kursus dan Pelatihan

Berdasarkan PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai Kinerja Anggaran dievaluasi berdasarkan pengukuran, penilaian, dan analisis tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Penilaian kinerja anggaran dilakukan atas 2 indikator, yaitu: Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang berkontribusi 50% dan Indikator Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang berkontribusi 50%.

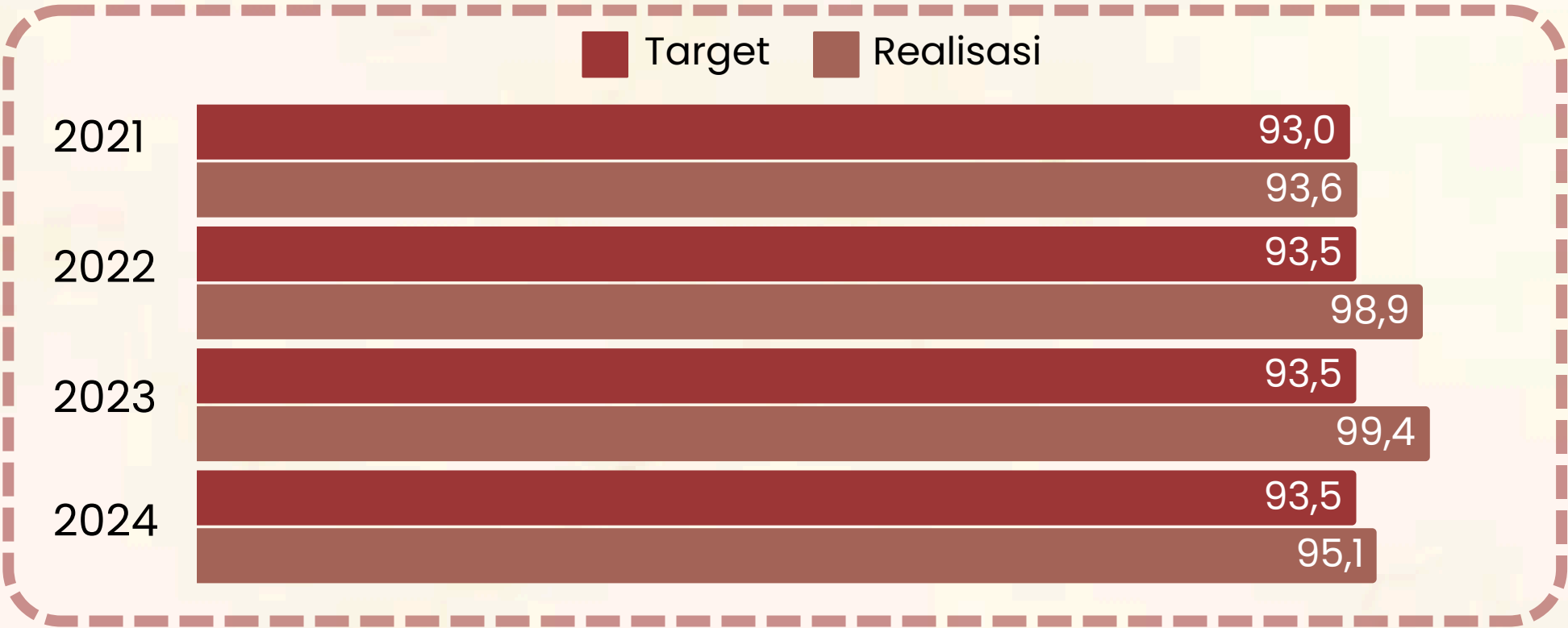


Sumber Data Aplikasi SMART 22 Januari 2025

Tabel Capaian Nilai Kinerja Anggaran 2021 – 2024 dibandingkan dengan target Renstra

	2021	2022	2023	2024
Target	93,0	93,5	93,5	93,5
Realisasi	93,6	98,9	99,4	95,1

Tren Capaian Nilai Kinerja Anggaran 2021 – 2024 dibandingkan dengan target Renstra



Capaian Nilai Kinerja Anggaran di tahun 2024 adalah sebesar 95,14, capaian tersebut mengalami penurunan sebanyak 4,3 poin dari capaian di tahun 2023 yakni sebesar 99,44. Penurunan nilai tersebut disebabkan karena adanya penurunan nilai pada item peniaian efisiensi standar biaya keluaran pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dimana nilai tidak mencapai angka maksimal 100 yakni hanya mencapai 69,7. Hal tserbut menunjukkan adanya gap ketidaksesuaian unitcost pada perealisasiannya jika dibandingkan dengan unitcost pada perencanaannya. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan target pada renstra sebesar 93,5 maka realisasi NKA telah tercapai. Perealisasiannya yang melebihi target dimungkinkan disebabkan karena:

- Adanya evaluasi/reviu berkala di masing-masing triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 untuk target dan capaian. Sehingga dapat dilakukan revisi anggaran.
- Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk melakukan analisis ketercapaian target dan penyusunan rencana revisi anggaran.
- Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk melakukan analisis ketercapaian target rencana anggaran.

Hambatan/Kendala



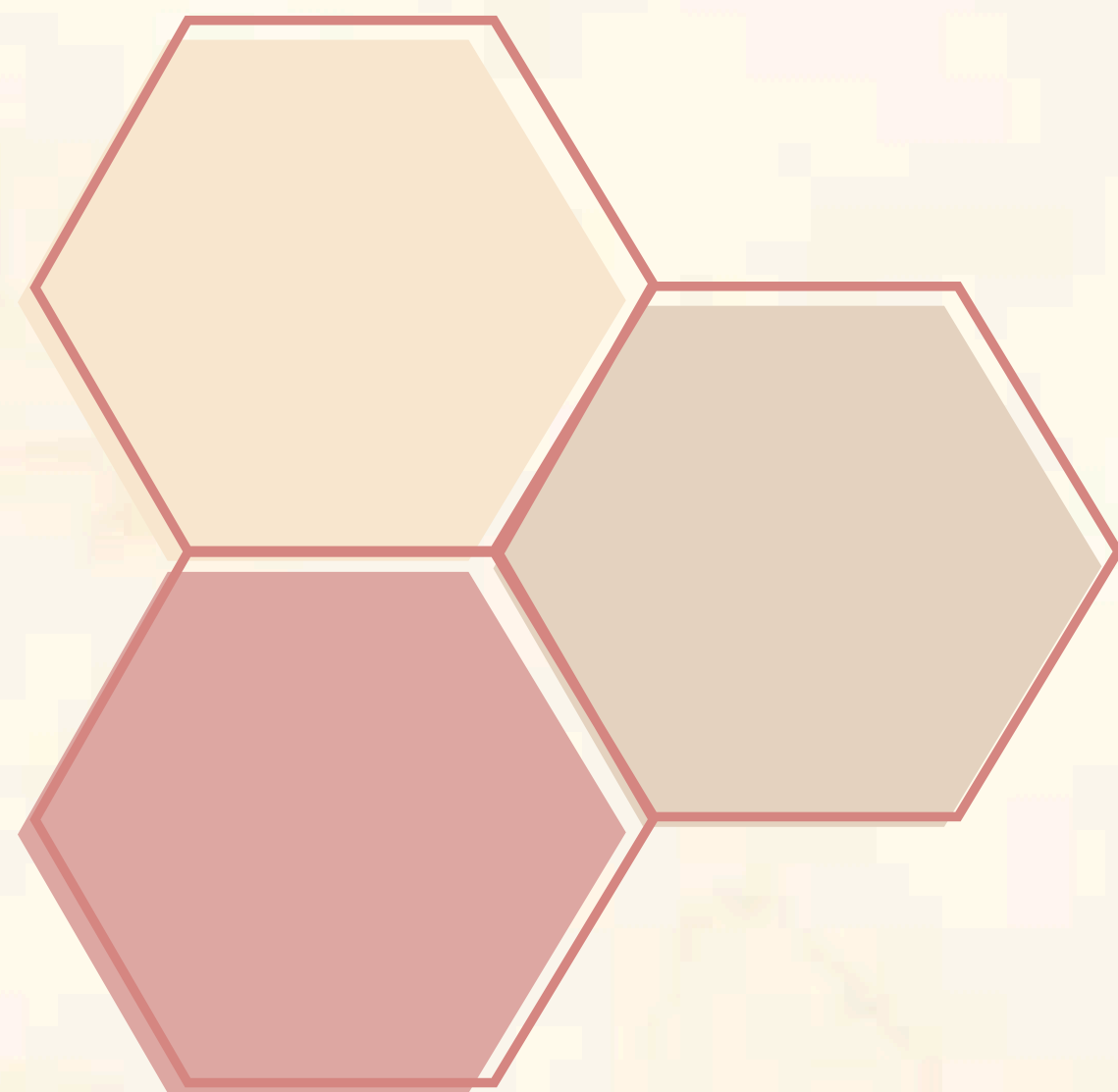
Dalam perealisasiannya, terdapat kendala yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai NKA diantaranya yaitu:

- Adanya formula penghitungan standar biaya keluaran (SBK) para harga satuan yang diberikan kepada peserta program PKK dan PKW, yang mengharuskan capaian realisasi ada pada nilai maksimal 120 untuk mencapai nilai efisiensi dalam perolehan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.



Strategi

Untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan hambatan dan kendala terkait pemenuhan nilai efisiensi anggaran terhadap standar biaya keluaran di program PKK dan PKW maka dapat dilakukan strategi untuk mengendalikan harga satuan dalam proses pemberian dana bantuan Program PKK dan PKW. Meskipun diketahui bahwa harga satuan per jenis keterampilan tidak sama, oleh sebab itu perlu dilakukan monitoring berkala terhadap realisasi pencairan dana bantuan terhadap capaian nilai kinerja perencanaan anggaran.



Realisasi Anggaran Direktorat Kursus dan Pelatihan

Pagu anggaran dalam DIPA tahun 2024 sebesar
Rp.416.118.811.000

Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar
Rp.403.185.546.534

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian tiga sasaran dengan empat indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja. Menyajikan Realisasi anggaran per program 2024

Persentase
daya serap
sebesar
96,89 %

Tabel Capaian Kinerja Anggaran
Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Pagu		%
				Target	Realisasi	
[SK 1] Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	77276 Orang	82336 Orang	375.125.193.000	363.573.906.827	96,92
[SK 2] Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	1000 Lembaga	1293 Lembaga	13.247.114.000	12.504.301.581	94,39
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan AA	AA	AA	27.746.504.000	27.107.338.126	97,70
	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	99,13	95,14			

Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2024 , Direktorat Kursus dan Pelatihan berhasil melakukan efisiensi anggaran pada akun belanja barang sebesar Rp. 12.592.328.000.

Efisiensi Anggaran bersumber dari :

- KRO [4278.QDB] Fasilitas dan Pembinaan Lembaga , sebesar Rp. 724.804.000,-
- KRO [4278.QDC] Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat ,sebesar Rp. 11.501.980.000,-
- Program[WA] Program Dukungan Manajemen, sebesar Rp. 365.544.000,-



Kinerja Lain-Lain



Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada Direktorat Kursus dan Pelatihan adalah bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan. Adapun langkah-langkah kerja yang telah dilakukan adalah

- Penyusunan Standar Pelayanan Kursus dan Pelatihan
- Penyusunan Prosedur Operasional Standar
- Penyusunan Manajemen Resiko
- Pelayanan keterbukaan informasi melalui media sosial pada Kanal Youtube, Facebook, Instagram dengan akun Kursus Kita
- Pencanangn Direktorat Kursus dan Pelatihan menuju ZI WBK



Inovasi

Pada tahun 2024, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah melakukan inovasi yakni dengan melakukan penyusunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Proses Penyusunan SPBE telah dilaksanakan dalam 10 kali kegiatan yakni:

1. Penyusunan Rancangan Arsitektur Enterprise Berbasis SPBE Tahap 1
2. Penyusunan Draf Rancangan Arsitektur Enterprise Berbasis SPBE Tahap 2
3. Reviu Rancangan Arsitektur Enterprise Berbasis SPBE
4. Penyusunan Naskah Akademik Kursus dan Pelatihan Domain Data dan Informasi
5. Penyusunan Naskah Akademik Kursus dan Pelatihan Domain Teknologi
6. Pengolahan Data Arsitektur Enterprise Berbasis SPBE
7. Finalisasi Rancangan Arsitektur Enterprise Berbasis SPBE
8. Uji Coba Rancangan Arsitektur Enterprise Berbasis SPBE Tahap 1
9. Uji Coba Rancangan Arsitektur Enterprise Berbasis SPBE Tahap 2
10. Uji Coba Rancangan Arsitektur Enterprise Berbasis SPBE Tahap 2

Penghargaan 2024



Tingkat Dirjen Pendidikan Vokasi



Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI



Program crosscutting/Kolaboratif



Program percepatan “Task Force”

Pada tahun 2024, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah mengidentifikasi pemadanan anggaran dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota sehingga dapat terlihat keterkaitan dan pelaksanaan pembinaan kursus dan pelatihan di tiap-tiap wilayah.

Kab / Kota	Koordinator	Anggota Taskforce	Kategori
Kab. Bandung	Emi Yulianti, S.H.	Januar Benthoni Thamrin	Kab / Kota Percontohan
Kab. Banyuwangi	Emi Yulianti, S.H.	Deka Suwondo, S.Pd.	Kab / Kota Percontohan
Kab. Demak	Emi Yulianti, S.H.	Ratna Dewi Haryanti	Kab / Kota Percontohan
Kota Jambi	Heri Sutanto	Joyce Amelia S	Kab / Kota Percontohan
Kota Prabumulih	Kartini	Ahmad Mu’tamir	Kab / Kota Percontohan
Kota Surakarta	Kartini	Ngatmi	Kab / Kota Percontohan

Terdapat 6 (enam) wilayah yang sudah diidentifikasi menganggarkan untuk pembinaan kursus dan pelatihan yakni Kab Bandung, Kab. Banyuwangi, Kab. Demak, Kota Jambi, Kota Prabumulih dan Kota Surakarta.

Peran

- Pihak Direktorat yang terdiri dari Koordinator dan anggota tim taskforce nya melakukan sosialisasi dan identifikasi program-program kursus dan pelatihan di direktorat kursus dan pelatihan dengan para stakeholder di daerah baik dinas pendidikan kabupaten/kota, organisasi mitra, organisasi industri di masing-masing wilayah.
- Pihak Dinas Pendidikan berupaya untuk mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kursus dan pelatihan berupa pemberian izin, supervisi pelaksanaan program, dan bentuk pembinaan lainnya terhadap lembaga kursus dan pelatihan

Dampak

- Bagi Lembaga kursus dan pelatihan di daerah, pembinaan yang dilakukan oleh dinas pendidikan, bekerjasama dengan organisasi mitra dan iindusri dapat meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan nonformal di masing-masing wilayah
- Bagi masyarakat, tersedianya penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang berkualitas dapat membuka peluang yang lebih besar untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya.
- Bagi industri, pembinaan yang dilakukan ini dapat memberikan suplai sumberdaya manusia yang berkualitas yang siap bekerja dan berwirausaha.

BAB 4

Penutup

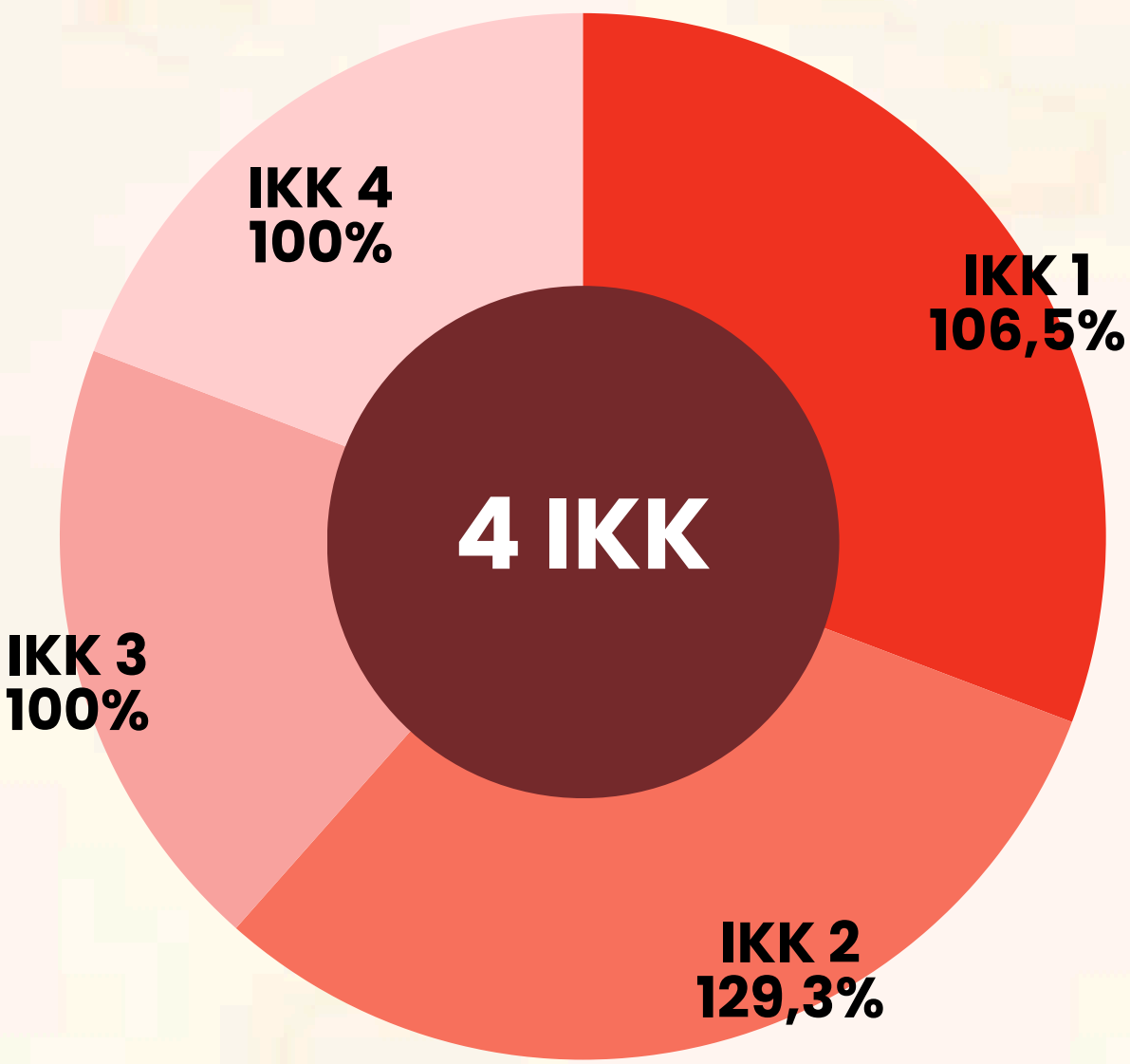


Capaian Kinerja dan Kinerja Keuangan Direktorat Kursus dan Pelatihan Tahun 2024

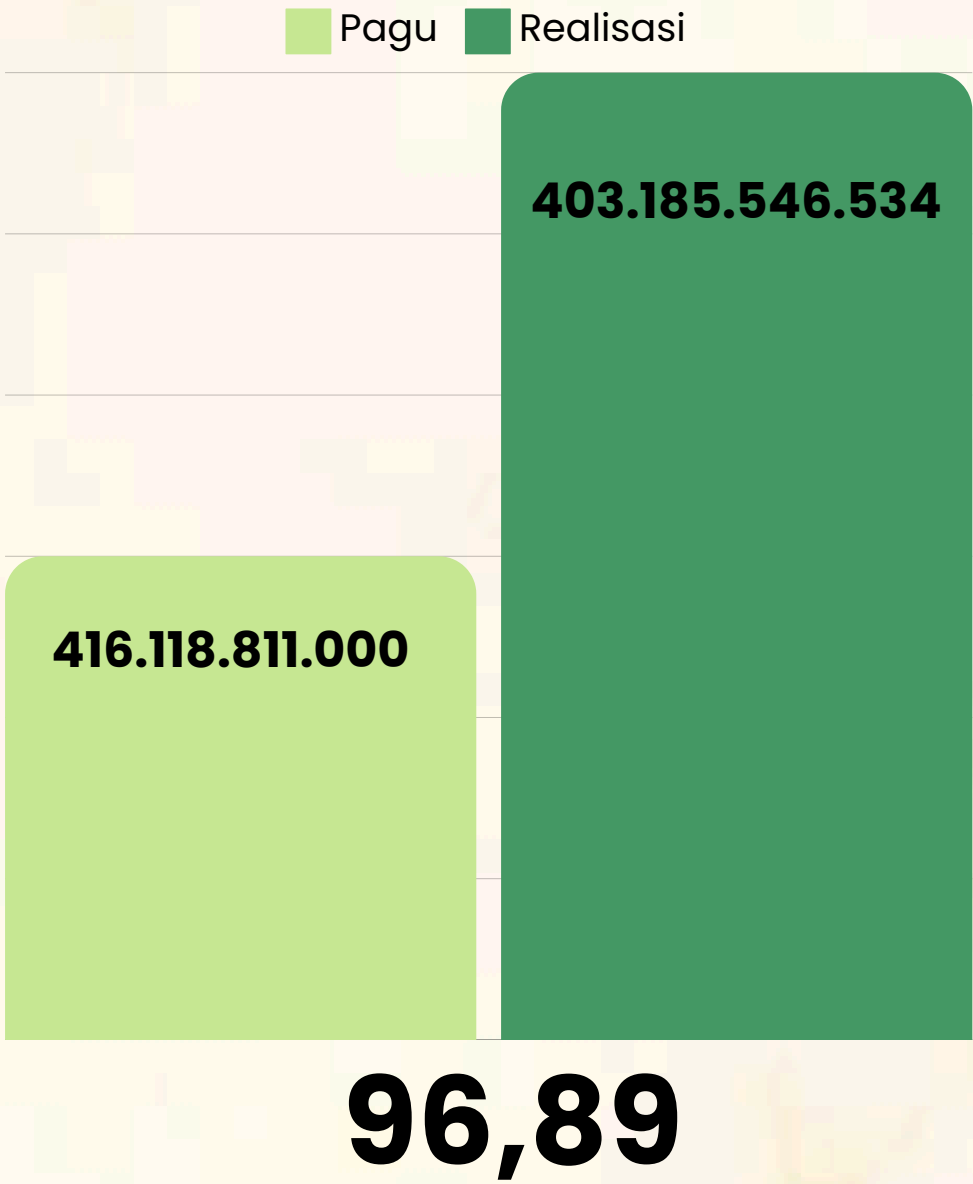


Selama tahun 2024 , Direktorat Kursus dan Pelatihan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Capaian Kinerja



Kinerja Keuangan



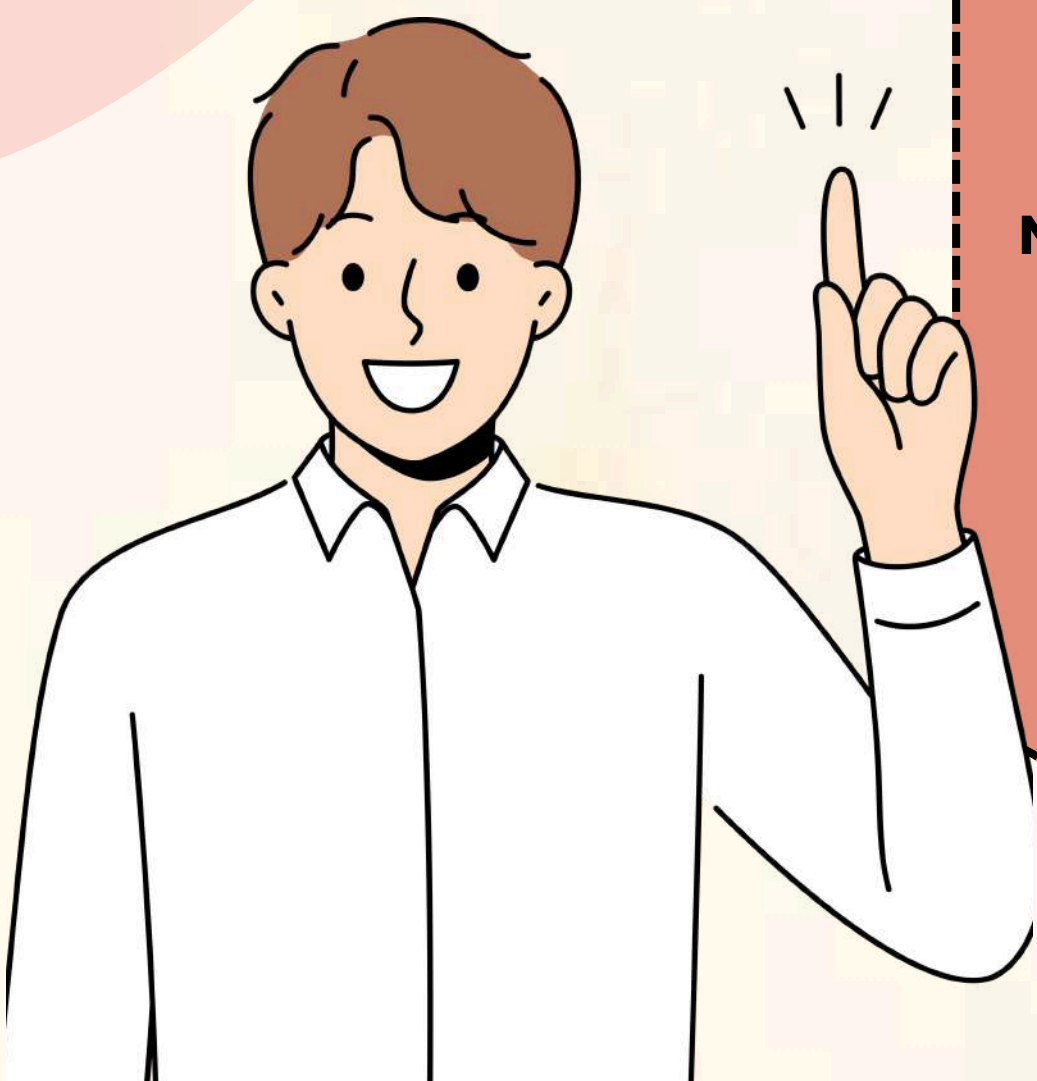
Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu	Blokir	Realisasi SPM		Realisasi SP2D	
1	BELANJA PEGAWAI	9.794.833.000	0	9.640.531.887	98,42	9.640.531.887	98,42
2	BELANJA BARANG	406.323.978.000	12.592.328.000	393.545.014.647	96,85	393.545.014.647	96,85
	TOTAL	416.118.811.000	12.592.328.000	403.185.546.534	96,89	403.185.546.534	96,89

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- Direktorat Kursus dan Pelatihan merupakan unit kerja di bawah kementerian pendidikan dasar dan menengah yang memiliki tugas utama penyiapan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045 melalui jalur pendidikan non formal.
- Dalam menjalankan tugasnya sesuai amanah UU sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, Direktorat Kursus dan Pelatihan perlu lebih fokus dalam penyiapan program-program kerjanya agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja
- Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kursus dan Pelatihan perlu meningkatkan peran antar unit kerja di kementerian pendidikan dasar dan menengah baik dalam fungsi perencanaan, pengawasan dan evaluasi agar memperoleh dampak program yang lebih komprehensif.
- Untuk memperluas dampak program, perlu dilakukan koordinasi dengan pihak stakeholder baik dari dinas pendidikan, organisasi mitra, dunia usaha dunia industri dan dunia kerja baik di pusat maupun di daerah.

Seiring dengan selesainya periode Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2020–2024, dapat dikatakan bahwa Direktorat Kursus dan Pelatihan telah melaksanakan program kegiatan berdasarkan target/sasaran kinerja yang ditetapkan dengan optimal. Selanjutnya, kita akan memasuki periode arah dan kebijakan baru, yaitu Renstra Tahun 2025–2029, dimana mengacu kepada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Arah kebijakan baru tersebut tentunya akan memiliki program, target, sasaran kinerja dan anggaran yang baru dan mendukung peningkatan kualitas bidang pendidikan.



Berikut gambaran arah dan kebijakan bidang kursus dan pelatihan untuk periode berikutnya yaitu

Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan bagi masyarakat bertujuan untuk:

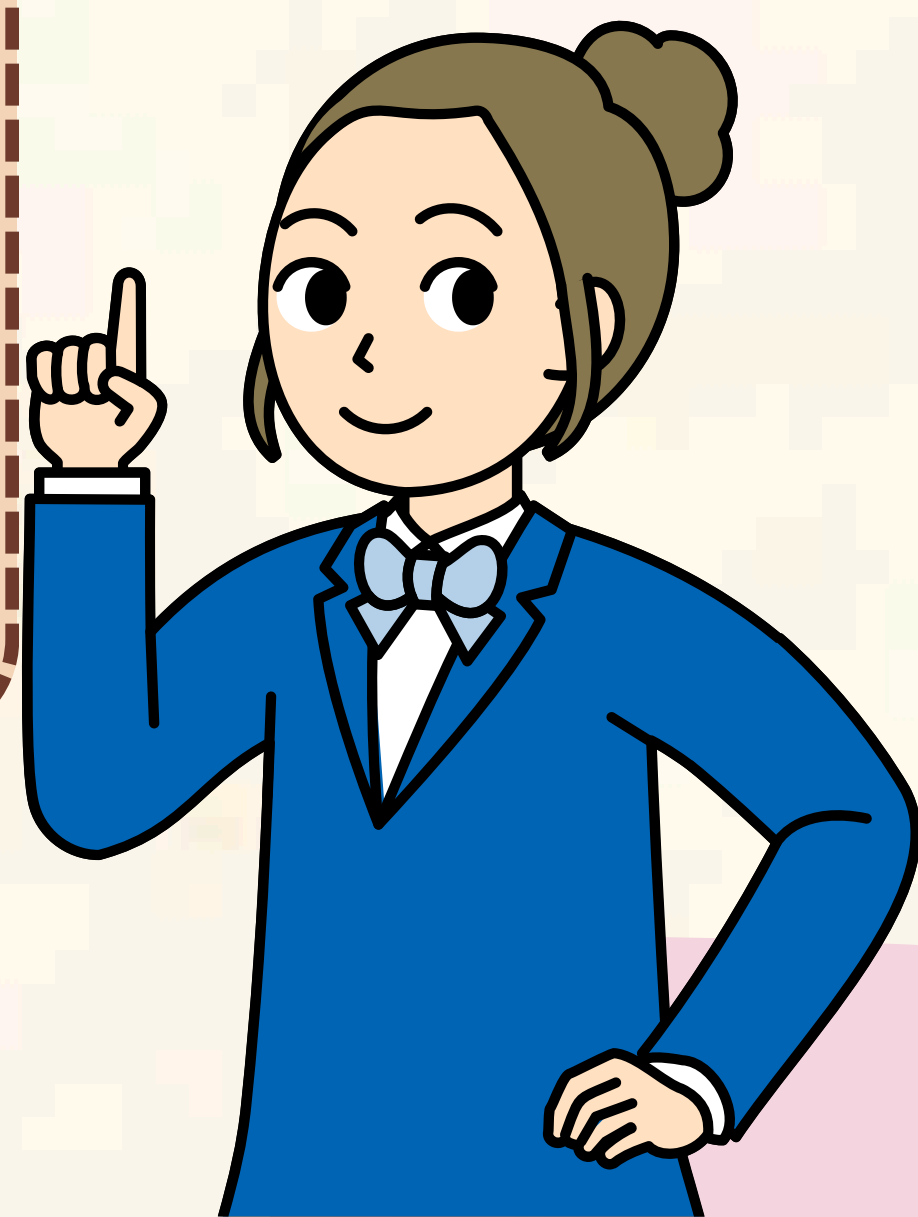
- memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
- mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
- mempersiapkan diri untuk bekerja;
- meningkatkan kompetensi kerja;
- mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
- melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Kursus dan Pelatihan diselenggarakan dengan prinsip:

- pembelajaran yang fleksibel, terpadu, relevan, dan mendukung pendidikan sepanjang hayat;
- suasana belajar yang kondusif dan aman;
- instruktur yang reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi; dan
- pimpinan lembaga yang berjiwa wirausaha untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan;

Lembaga Kursus dan Pelatihan Perlu meningkatkan responsifitas terhadap perubahan teknologi dan industri. Oleh karena itu perlu mempersiapkan :

- Teknologi pembelajaran yang terintegrasi dengan kebutuhan industri. LKP perlu mempersiapkan sarana dan prasarana kursus yang mendukung
- Perluasan kemitraan dengan industri untuk memastikan kurikulum yang digunakan adalah relevan dengan kebutuhan industri
- Peningkatan kompetensi instruktur untuk memastikan penguasaan terhadap kebutuhan teknologi terbaru
- Peningkatan penyelenggaraan Teaching Factory sebagai jembatan bagi para lulusan kursus dan pelatihan untuk memasuki dunia industri dan dunia kerja



LAMPIRAN

+ + + + + +
+ + + + + +



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Direktur Kursus dan Pelatihan
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nahdiana
Jabatan : Direktur Kursus dan Pelatihan
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kiki Yulianti
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 15 Februari 2024

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,

Direktur Kursus dan Pelatihan,

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Kiki Yulianti
NIP -

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Nahdiana
NIP 196908061992012001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	77276
[2.0] Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[2.1] Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	1000
[3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[3.1] Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	AA
[3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	99.13

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 28.237.201.000,-
2.	4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Rp. 388.372.307.000,-
Total Anggaran			Rp. 416.609.508.000,-

Jakarta, 15 Februari 2024

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,

Direktur Kursus dan Pelatihan,



Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Kiki Yuliati
NIP -



Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Nahdiana
NIP 196908061992012001



Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Direktur Kursus dan Pelatihan
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nahdiana
Jabatan : Direktur Kursus dan Pelatihan
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kiki Yuliati
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 15 Februari 2024

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,

Direktur Kursus dan Pelatihan,



Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Kiki Yuliati
NIP -



Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Nahdiana
NIP 196908061992012001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	Orang	77276
[SK 2] Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	Lembaga	1000
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	Predikat	AA
	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	Nilai	99.13

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp 27.746.504.000
2	4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Rp 388.372.307.000
Total Anggaran			Rp 416.118.811.000

Jakarta, 13 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Tatang Muttaqin



Ditandatangani secara elektronik oleh

Direktur Kursus dan Pelatihan

Nahdiana



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





Laporan Kinerja Triwulan 1
Direktorat Kursus dan Pelatihan
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Direktorat Kursus dan Pelatihan selama Triwulan 1 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 1

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	77276	Orang	12882	12882
2.	[SK 2.0] Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	1000	Lembaga	25	369
3.	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	AA	Predikat	-	-
4.	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	99.13	Nilai	0	0

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 1

1. [SK 1.0 Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja] IKK 1.1 Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha

Progress / Kegiatan :

Dalam mencapai target pada IKK ini, Direktorat Kursus dan Pelatihan melaksanakan dua program yaitu PKK dan PKW dengan progress capaian sebagai berikut,

1. Program PKK:
 - a) Sudah dilakukan penyusunan pedoman pendukung penyelenggaraan program PKK. Adapun pedoman pendukungnya yaitu pedoman rekrutmen peserta didik, pedoman menjalin kerjasama dengan DUDIKA, pedoman penyusunan pertanggungjawaban administrasi keuangan, pedoman video best practice program PKK. Unsur yang terlibat adalah lembaga kursus dan pelatihan, PKBM, LSK, asosiasi profesi, dan SEAMEO SEAMOLEC;
 - b) Sudah dilakukan sosialisasi program PKK sebanyak 2 kali dan koordinasi program PKK sebanyak 2 kali dengan melibatkan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, dinas pendidikan kab/kota, LSK, asosiasi profesi, forum LKP, HIPPKI dan DUDIKA;
 - c) Sudah dilakukan penilaian dan penetapan proposal. Jumlah proposal yang dinilai ada 482, proposal yang diterima sebanyak 286 dan proposal yang ditolak sebanyak 196;
 - d) Dari total 286 proposal yang diterima setelah penilaian dilakukan pleno yang dihadiri unsur tim verifikator dan internal Direktorat (Direktur, Widyaprada Ahli Utama, KPA, Ketua Tim, Kerja, PPK, BPP, dan tim teknis) yang hasilnya ditetapkan SK tahap 1 dengan total 8.802 peserta didik dan total anggaran yang sudah disalurkan sebanyak Rp 32.088.300.000 dengan presentase realisasi anggaran 14,54% dari total anggaran yang akan disalurkan di tahun 2024;
 - e) Sudah dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan program PKK sebanyak satu kali terhadap 286 lembaga yang dilaksanakan secara blended (luring dan daring) yang hadir adalah penanggungjawab program PKK dan operator;
2. Program PKW:
 - a) Sudah dilakukan penyusunan pedoman pendukung penyelenggaraan program PKW. Adapun pedoman pendukungnya yaitu pedoman penyusunan video best practice dan pedoman penyusunan bahan ajar;
 - b) Sudah dilakukan sosialisasi dan koordinasi program PKW sebanyak 3 kali dengan melibatkan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, dinas pendidikan kab/kota, forum LKP, HIPPKI, dan mitra usaha (perbankan, platform digital, UMKM);
 - c) Sudah dilakukan pengimbasan praktik baik penyelenggaraan program PKW di 4 lokasi dan yang berpartisipasi sebanyak 80 lembaga;
 - d) Sudah dilakukan penilaian dan penetapan proposal. Jumlah proposal yang dinilai ada 678, proposal yang diterima sebanyak 155 dan proposal yang ditolak sebanyak 6;
 - e) Dari total 155 proposal yang diterima setelah penilaian dilakukan pleno yang dihadiri unsur tim verifikator dan internal Direktorat (Direktur, Widyaprada Ahli Utama, KPA, Ketua Tim, Kerja, PPK, BPP, dan tim teknis) yang hasilnya ditetapkan SK tahap 1 sebanyak 270 peserta didik, SK tahap 2 sebanyak 3.200 peserta didik, dan SK Tahap 3 sebanyak 610 peserta didik sehingga total di triwulan I ini adalah



Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



4.080 peserta didik dan total anggaran yang sudah disalurkan sebanyak Rp 22.590.000.000, - dengan presentase realisasi anggaran 17,26% dari total anggaran yang akan disalurkan di tahun 2024;
f) Sudah dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan program PKW sebanyak satu kali terhadap 155 lembaga yang dilaksanakan secara blended (luring dan daring) yang hadir adalah penanggungjawab program PKW dan operator;

Kendala / Permasalahan :

Kendala dalam pencapaian target pada IKK ini adalah sebagai berikut,

- 1. Kegiatan mundur dari jadwal yang direncanakan karena anggaran PKK dan PKW masih terblokir sampai pertengahan februari;
- 2. Banyak verifikator penilaian proposal yang baru di program PKW sehingga memerlukan waktu untuk pemberian pemahaman terkait dengan teknis penilaian proposal

Strategi / Tindak Lanjut :

Strategi yang dilakukan Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk mengatasi kendala pada pencapaian target IKK ini adalah sebagai berikut:

- 1. Mengajukan usulan buka blokir anggaran;
- 2. Dilakukan bimbingan teknis verifikator program PKW dan perbanyak simulasi penilaian proposal

2. [SK 2.0 Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja] IKK 2.1 Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja

Progress / Kegiatan :

Dalam mencapai target pada IKK ini, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah melakukan intervensi kepada satuan pendidikan kursus dan pelatihan untuk dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui berbagai program dengan progress dan capaian sebagai berikut;;

- 1. SKL, kurikulum dan bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja;;
 - a) Sudah dilakukan penyusunan draft SKL untuk 5 bidang keterampilan yaitu teknik sepeda motor, teknik elektronika, tenun, garmen alas kaki, dan perhotelan di bulan maret;
 - b) Sudah dilakukan penyusunan draft bahan ajar/e -modul untuk bidang keterampilan administrasi perkantoran, pemasaran digital, teknik akuntansi, pekarya kesehatan, barista, tata boga, animasi, musik, pemrograman web, dan teknik komputer;
- 2. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (PjBL);;
Pada TW 1 dilaksanakan penyiapan pedoman untuk menyelenggarakan PjBL pada LKP, berupa,
 - a) Sudah melaksanakan pembahasan rancangan pedoman penyelenggaraan PJBL yang dilengkapi dengan materi penyelenggaraan PJBL meliputi konsep PJBL, penerapan PJBL di LKP, materi PJBL diantaranya rencana pembelajaran paket kursus dan pelatihan, rencana pelaksanaan proyek, penilaian proyek. Penyusunan pedoman penyelenggaraan PJBL melibatkan unsur praktisi lembaga kursus dan pelatihan dan akademisi yang telah menyelenggarakan PJBL seperti Politeknik Manufaktur Bandung, Politeknik Negeri Jakarta dan Universitas Negeri Jakarta;
- 3. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran daring;;
 - a) Sudah dilakukan reviu pedoman penyelenggaraan kursus daring yang melibatkan unsur lembaga kursus penyelenggara kursus daring dan SEAMEO SEAMOLEC;
 - b) Dilakukan koordinasi dengan lembaga calon pengimbasan praktik baik, pesertanya adalah lembaga calon pengimbasan dan SEAMEO SEAMOLEC sebagai narasumbernya;
 - c) Dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan kursus daring dan peserta yang hadir daring sebanyak 347 lembaga dan peserta yang hadir secara luring 22 lembaga. Unsur yang hadir adalah dari pengelola lembaga, admin, dan instruktur;
- 4. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis pabrik/teaching factory;;
Belum ada pelaksanaan kegiatan dan baru direncanakan di triwulan II;
- 5. LKP yang dinilai kinerja lembaga;;
 - a) Sudah dilaksanakan koordinasi internal penilaian kinerja dengan melibatkan praktisi, akademisi, UPT (BBPPMPV), internal Ditsuslat, serta koordinasi eksternal dengan melibatkan dinas pendidikan kab/kota, ormit, LKP, praktisi, akademisi, UPT (BBPPMPV), internal Ditsuslat. Koordinasi ini adalah tindak lanjut kegiatan review pedoman Penilaian Kinerja LKP (PK LKP) yang sudah dilakukan di tahun 2023 serta dalam rangka menyamakan perspektif penyelenggaraan PK LKP;
- 6. Instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja:
 - a) Sudah dilaksanakan kegiatan koordinasi program magang instruktur kursus dan pelatihan dengan melibatkan unsur DUDIKA dan LSK
 - b) Sudah dilaksanakan kegiatan penyusunan dan review pedoman program magang instuktur kursus dan pelatihan dengan melibatkan unsur DUDIKA dan LSK dan pengembang aplikasi SIMANTAP
- 7. Penguji Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya:
 - a) Sudah dilakukan kegiatan koordinasi dan penyusunan pedoman STRANAS dan kemitraan lembaga kursus dan pelatihan yang terdiri dari kegiatan tindak lanjut terkait rancangan peraturan tentang norma SKL Kursus dan Pelatihan, koordinasi dengan BSKAP, review pedoman penguatan pembelajaran dan uji kompetensi. Pedoman yang disusun nantinya akan dijadikan bahan pelaksanaan bimtek penguji uji



Catatan :

- 1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
- 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



konten untuk bahan ajar kursus daring;

c) Dukungan sarana dan prasarana masih terbatas, karena untuk menyelenggarakan kursus daring dibutuhkan sarana yang mendukung seperti kamera dan internet yang memadai;

d) Adanya keterbatasan anggaran untuk melaksanakan bimtek kursus daring secara luring sementara sasaran lembaga yang berpotensi menyelenggarakan kursus daring cukup banyak;

e) SSL laman kursus daring belum diperpanjang sehingga mengganggu proses akses ke laman kursus daring

4. LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai teaching factory;;
Tidak ada kendala. Kegiatan baru akan dilaksanakan di TW II

5. LKP yang dinilai kinerja lembaga:

a) Kuota sasaran dari anggaran Ditsuslat masih sangat terbatas sementara jumlah LKP yang belum dinilai kinerjanya masih banyak;

b) Verifikator dari BBPPMPV hanya tersedia di 5 provinsi sedangkan cakupan wilayah PK LKP ada 38 provinsi;

6. Instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja:

a) Sulitnya mencari industri yang bisa diajak kerjasama dan memenuhi kriteria menyelenggarakan magang instruktur;

7. Penguji Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya:

a) Alokasi anggaran yang digunakan untuk peningkatan kompetensi penguji uji kompetensi masih terbatas, sementara jumlah penguji uji kompetensi yang mengajukan untuk ditingkatkan kompetensinya sangat banyak yang berasal dari berbagai macam bidang

b) Hasil revidu pedoman masih belum seluruhnya diterima karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga revidu pedoman dilanjutkan secara mandiri

8. Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya:

Belum ada pelaksanaan kegiatan dan baru direncanakan di triwulan II di bulan april;

9. LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi:

a) Tingkat kesesuaian jenis keterampilan di LKP dengan program studi program RPL masih sangat rendah

10. LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir:

a) Banyaknya variasi bidang keterampilan LKP menyebabkan sulitnya merumuskan model pusat pengembangan karir LKP secara umum sehingga diperlukan beberapa model penerapan pusat pengembangan karir LKP

11. LKP yang siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas:

a) Mayoritas LKP sasaran tahun 2024 belum memahami persyaratan pendirian secara komprehensif yang mengakibatkan belum dimulainya proses penyusunan persyaratan di internal

Strategi / Tindak Lanjut :

Strategi yang dilakukan Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk mengatasi kendala pada pencapaian target IKK ini adalah sebagai berikut,

1. Jumlah SKL, kurikulum dan bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja;;

a) Mengagendakan kegiatan atau pertemuan dengan Pusat Standar dan Kebijakan, akademisi, dan praktisi untuk menyusun SKL tersebut di bulan mei;

2. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (PjBL): ;

a) Tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan ini adalah menyusun Draft Keputusan Dirjen tentang Pelaksanaan PJBL pada Lembaga Kursus dan Pelatihan;

3. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran daring;;

a) Melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan kursus daring untuk memberikan motivasi dan melakukan pendampingan penyelenggaraan kursus daring di LKP;

b) Untuk mengakomodir keterbatasan anggaran penyelenggaraan bimtek kursus daring metode penyelenggaraan bimtek dilakukan secara blended (luring dan daring) sehingga dapat menjangkau lebih banyak LKP;

c) Berkoordinasi secara intens dengan pihak Pusdatin untuk perpanjangan sertifikat SSL;

4. LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai teaching factory:

Kegiatan baru akan dilaksanakan di TW II

5. LKP yang dinilai kinerja lembaga:

a) Melibatkan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan LKP dalam pelaksanaan pembiayaan penilaian kinerja yang dituangkan di dalam pedoman PK LKP terbaru;

b) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan UPT lainnya di lingkungan Kemendikbudristek untuk menyediakan SDM verifikator untuk PK LKP;

c) Memperkuat penyelenggaraan PK LKP lewat penyusunan Keputusan Dirjen tentang Pedoman Penyelenggaraan PK LKP

6. Instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja:

a) Berkerjasama dengan organisasi mitra dan organisasi profesi untuk mencari industri yang dapat melakukan kerja sama

7. Penguji Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya:

a) Berkoordinasi dengan para reviewer pedoman untuk bisa menyerahkan hasil review pedoman agar selanjutnya bisa difinalisasi



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



- 8. Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya:
Belum ada pelaksanaan kegiatan dan baru direncanakan di triwulan II di bulan april;
 - 9. LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi:
 - a) Pemaparan tentang kursus dan pelatihan meliputi kebijakan, program pembelajaran, capaian pembelajaran, dan data LKP
 - b) Diskusi penerapan RPL untuk lulusan, pengelola, dan instruktur LKP yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui jalur RPL
 - c) Melakukan pemetaan kesesuaian program studi dan jenis keterampilan kursus dan pelatihan
- Tindaklanjut:
- 1. Rapat persiapan fasilitasi dengan LLDIKTI Wilayah 1-8
 - 2. Fasilitasi pertemuan LKP dengan perguruan tinggi swasta untuk kerja sama terutama untuk menerapkan RPL
- 10. LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir:
 - a) Menyusun beberapa pilihan penerapan model pusat pengembangan karir
 - 11. LKP yang siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas:
 - a) Mengkonsep pelaksanaan bimbingan teknis terkait pemenuhan persyaratan pendirian dengan penguatan pada bagian persyaratan yang bersifat administratif seperti kurikulum, SPMI, dan lain lain

3. [SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan] IKK 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan

Progress / Kegiatan :

Sebagai upaya mencapai target pada penilaian SAKIP, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah melakukan beberapa kegiatan di triwulan I meliputi:

- 1. Dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 secara tepat waktu;
- 2. Dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Direktur Kursus dan Pelatihan Tahun Anggaran 2024 secara tepat waktu;
- 3. Dilakukan Penyusunan Rencana Aksi Tahun Anggaran 2024 secara tepat waktu;
- 4. Dilakukan pengukuran kinerja triwulan I tahun anggaran 2024 secara tepat waktu;
- 5. Dilakukan penyusunan rencana SKP pegawai

Kendala/permasalahan dalam pencapaian IKK ini di triwulan I ini adalah sebagai berikut:

- 1. Adanya perubahan format penyusunan laporan kinerja sehingga memerlukan penyesuaian kembali;
- 2. Keterbatasan waktu tim evaluasi dari masing-masing tim kerja

Strategi / Tindak Lanjut :

Strategi yang dilakukan Direktorat Kursus dan Pelatihan dalam berupaya mengatasi kendala yang ada pada pencapaian IKK ini adalah sebagai berikut:

- 1. Berkoordinasi dengan tim SAKIP eselon I dan tim SAKIP dari Biro Perencanaan;
- 2. Rapat pengukuran kinerja dilakukan secara daring

4. [SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan] IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan

Progress / Kegiatan :

Sebagai upaya mencapai target pada NKA, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah melakukan beberapa kegiatan di triwulan I meliputi:

- 1. Dilakukan revisi RPD halaman III DIPA pada bulan februari
- 2. Dilakukan penyusunan target dan realisasi capaian output triwulan I secara tepat waktu
- 3. Dilakukan revisi/penyesuaian program kerja
- 4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban UP dan TUP secara tepat waktu
- 5. Dilakukan monitoring realisasi program dan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan

Kendala / Permasalahan :

Kendala/permasalahan dalam pencapaian IKK ini di triwulan I ini adalah terdapat perubahan tim pengelola keuangan sehingga perlu penyesuaian terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2024

4. [SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan] IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan

Progress / Kegiatan :

Sebagai upaya mencapai target pada NKA, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah melakukan beberapa kegiatan di triwulan I meliputi:

- 1. Dilakukan revisi RPD halaman III DIPA pada bulan februari
- 2. Dilakukan penyusunan target dan realisasi capaian output triwulan I secara tepat waktu
- 3. Dilakukan revisi/penyesuaian program kerja
- 4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban UP dan TUP secara tepat waktu
- 5. Dilakukan monitoring realisasi program dan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan

Kendala / Permasalahan :

Kendala/permasalahan dalam pencapaian IKK ini di triwulan I ini adalah terdapat perubahan tim pengelola keuangan sehingga perlu penyesuaian terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2024

Strategi / Tindak Lanjut :

Strategi yang dilakukan Direktorat Kursus dan Pelatihan dalam berupaya mengatasi kendala yang ada pada pencapaian IKK ini adalah dengan melakukan kegiatan peningkatan administrasi pengelola keuangan dengan melibatkan unsur Biro Perencanaan, Dit. Pelaksanaan Anggaran Kemenkeu, Dit. Jenderal Anggaran Kemenkeu RI, Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk menyamakan persepsi tim pengelola keuangan dalam pelaksanaan program dan anggaran agar sesuai dengan strategi pencapaian target NKA

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 1

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[690442.DL.4278.QDB.001] Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri	Lembaga	1.000	25	975	13.247.114.000	1.259.951.072	11.987.162.928
[690442.DL.4278.QDC.U01] Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	Orang	51.939	8.802	43.137	227.489.230.000	32.948.451.500	194.540.778.500
[690442.DL.4278.QDC.U02] Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	Orang	23.637	4.080	19.557	147.635.963.000	23.398.107.742	124.237.855.258
[690442.WA.4261.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	7.742.032.000	1.312.538.225	6.429.493.775
[690442.WA.4261.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	20.495.169.000	3.630.947.665	16.864.221.335
Total					416.609.508.000	62.549.996.204	354.059.511.796

D. Rekomendasi Pimpinan

- 1. Program-program yang dilaksanakan, pastikan menysasar ke seluruh kota dan kabupaten terutama di daerah kantong kemiskinan dan 3T;
- 2. Pelibatan Pemda dalam monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pertemuan dengan Pemda secara berkala diagendakan, sehingga fungsi konkuren Pemerintah Pusat dan Daerah bisa sinergis;
- 3. Pastikan publikasi sebagai sarana informasi bisa efektif keseluruh wilayah Indonesia sehingga masyarakat luas mendapat informasi tentang program-program kursus dan pelatihan, keberhasilan, peserta didik dan jejaring ke DUDIKA.

Jakarta, 20 Mei 2024
Direktur Kursus dan Pelatihan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Nahdiana
NIP 196908061992012001



Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E





**Laporan Kinerja Triwulan II
Direktorat Kursus dan Pelatihan
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Direktorat Kursus dan Pelatihan selama Triwulan II Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan II

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target (Kumulatif)	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	77276	Orang	39.179	TW 1 : 12.882 TW 2 : 28.383 Total Capaian: 41.265
2.	[SK 2.0] Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	1000	Lembaga	474	TW 1 : 369 TW 2 : 362 Total Capaian: 731
3.	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	AA	Predikat	-	-
4.	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	99.13	Nilai	-	-

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan II

1. [SK 1.0 Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja] IKK 1.1 Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha
- Progress/Kegiatan :
- a. Program PKK
- Telah dilakukan sosialisasi program PKK kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan vokasi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Organisasi Mitra Kursus dan Pelatihan
 - Telah dilakukan penilaian proposal lembaga yang mengakses program PKK sebanyak 3 kegiatan. Jumlah proposal yang dinilai ada 1.463, proposal yang diterima sebanyak 821 dan proposal yang ditolak sebanyak 639

- Dari total 821 proposal yang diterima setelah dilakukan penilaian melalui pleno yang dihadiri oleh unsur tim verifikator dan internal Direktorat (Direktur, Widya Prada Ahli Utama, KPA, Ketua Tim Kerja, PPK, BPP, dan tim teknis) hasilnya ditetapkan SK tahap 2 tipe silver sebanyak 10.355 orang peserta didik, SK tahap 1 tipe gold sebanyak 456 orang peserta didik, SK tahap 1 tipe platinum sebanyak 950 orang peserta didik, SK tahap 2 tipe gold sebanyak 155 orang peserta didik, SK tahap 3 tipe silver sebanyak 7.787 orang peserta didik, sehingga total capaian PKK di triwulan II ini adalah sebanyak **19.703 orang** peserta didik dengan total anggaran yang sudah disalurkan sebanyak Rp 82.395.350.000.
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program PKK secara daring kemudian hasilnya dianalisis sehingga menghasilkan rekomendasi untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara langsung datang ke lembaga dengan pengambilan sampling sebanyak 23 lembaga yang tersebar di 4 provinsi 11 Kab./Kota meliputi Kab. Bandung, Kota Bandung, Kab. Banyuwangi, Kab. Cianjur, Kab. Deli Serdang, Kota Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Jombang, Kab. Lamongan, Kab. Subang, dan Kab. Sidenreng Rappang.

b. Program PKW

- Telah dilakukan sosialisasi program PKW kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan vokasi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Organisasi Mitra Kursus dan Pelatihan
- Telah dilakukan sebanyak 7 kegiatan penilaian terhadap proposal calon penerima PKW. Jumlah proposal yang dinilai ada 688, proposal yang diterima sebanyak 330 dan proposal yang ditolak sebanyak 85;
- Dari total 330 proposal yang diterima setelah penilaian dilakukan pleno yang dihadiri unsur tim verifikator dan internal Direktorat (Direktur, Widya Prada Ahli Utama, KPA, Ketua Tim, Kerja, PPK, BPP, dan tim teknis) yang hasilnya ditetapkan SK tahap 4 tipe gold sebanyak 3.185 orang peserta didik, SK tahap 5 tipe silver sebanyak 3.265 orang peserta didik, SK tahap 6 tipe platinum sebanyak 920 orang peserta didik, SK tahap 7 tipe gold sebanyak 800 orang peserta didik, dan SK tahap 8 silver sebanyak 510 orang peserta didik sehingga total capaian PKW di triwulan II ini adalah sebanyak **8.680 orang** peserta didik dengan total anggaran yang sudah disalurkan sebanyak Rp 53.172.500.000
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program PKW secara daring kemudian hasilnya di analisis sehingga menghasilkan rekomendasi untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara langsung datang ke lembaga dengan pengambilan sampling sebanyak 9 lembaga yang tersebar di 7 provinsi 9 Kab./Kota meliputi Kab. Cianjur, Kota Makassar, Kab. Bandung Barat, Kab. Demak, Kab. Kuningan, Kab. Lebak, Kab. Lombok Tengah, Kab. Sumenep, Kota Medan.

Kendala/Permasalahan :

a. Program PKK

- Banyak proposal yang belum memenuhi persyaratan
- Sudah dilakukan sosialisasi di kabupaten/kota yang masuk ke dalam kategori daerah 3T dan kantung kemiskinan, akan tetapi proposal yang masuk masih terbatas
- Masih banyak lembaga yang sudah mengisi proposal namun belum submit pengajuan proposal

b. Program PKW

- Banyak proposal yang belum memenuhi persyaratan
- Sudah dilakukan sosialisasi di kabupaten/kota yang masuk ke dalam kategori daerah 3T dan kantung kemiskinan, akan tetapi proposal yang masuk masih terbatas

Strategi/Tindak Lanjut :

a. Program PKK dan PKW

- Melakukan pendampingan bagi lembaga dari wilayah 3T dan afirmasi sehingga dapat memenuhi proposal sesuai dengan ketentuan dalam juknis
- Mengoptimalkan peran ormit dan dinas pendidikan untuk mensosialisasikan program bantuan PKK.
- Membentuk task force untuk meningkatkan percepatan koordinasi dengan kabupaten/kota melalui dinas pendidikan

2. [SK 2.0 Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja] IKK 2.1 Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja

Progress/Kegiatan :

Dalam mencapai target pada IKK ini, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah melakukan intervensi kepada satuan pendidikan kursus dan pelatihan untuk dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui berbagai program dengan progress dan capaian sebagai berikut:

a. SKL, kurikulum dan bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja

- Dilakukan penyusunan dan reviu SKL di 5 bidang yaitu bidang teknik sepeda motor, teknik elektronika, tenun, garmen alas kaki, dan perhotelan
- Dilakukan reviu dan finalisasi bahan ajar e-modul sesuai dengan SKL Kursus dan Pelatihan di 10 bidang yaitu bidang administrasi perkantoran (sekretaris), pemasaran digital, teknik akuntansi, pekarya kesehatan, barista, tata boga, animasi, musik, pemrograman web, teknik komputer

b. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (PjBL)

- Dilakukan finalisasi pedoman penyelenggaraan PjBL pada kursus dan pelatihan dengan fokus pada penyusunan perangkat PjBL meliputi: 1) Rencana pelaksanaan pembelajaran kursus dan pelatihan di LKP, 2) Rencana pelaksanaan proyek, 3) Instrumen penilaian proyek

c. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran daring

- Dilakukan penyusunan naskah bahan ajar kursus dalam jaringan (daring)
- Dilakukan reviu naskah skenario video bahan ajar kursus daring
- Dilakukan Finalisasi Naskah Skenario Bahan Ajar Kursus Daring
- Dilakukan pengimbasan praktik baik penyelenggaraan kursus dalam jaringan (daring) dengan di 5 wilayah yaitu Pringsewu, Tangerang, Bogor, Cimahi, Purwodadi dengan total 100 lembaga yang diimbas dan 5 lembaga menjadi pengimbas sehingga total lembaga yang menjadi sasaran kegiatan ini sebanyak 105 lembaga

d. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis pabrik/teaching factory

- Dilakukan review pedoman penyelenggaraan unit usaha di LKP
- Dilakukan Pengimbasan Unit Usaha/Teaching Factory (TEFA) kepada 100 lembaga
- Dilakukan Workshop Pengembangan Unit Usaha/Teaching Factory (TEFA) 15 lembaga
- Dilakukan Penyusunan Instrumen Seleksi Lembaga Calon Penyelenggara Unit Usaha

e. LKP yang dinilai kinerja lembaga

- Dilakukan sosialisasi pedoman, instrumen, dan aplikasi PK-LKP
- Dilakukan penyusunan materi orientasi teknis verifikator PK-LKP tahun 2024

- Dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota
- Dilakukan kurasi calon sasaran PK-LKP tahun 2024
- Dilakukan finalisasi bahan orientasi teknis verifikator PK-LKP tahun 2024

f. Instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja

- Dilakukan sosialisasi program magang instruktur kursus dan pelatihan bidang Teknik Sepeda Motor dan Barista
- Dilakukan seleksi program magang instruktur kursus dan pelatihan, mulai dari seleksi administrasi program magang, seleksi wawancara dan praktik.
- Dilakukan pelaksanaan program magang instruktur kursus dan pelatihan bidang **Teknik Sepeda Motor sebanyak 15 orang dan Barista sebanyak 15 orang**

g. Penguji Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya

- Mengidentifikasi kebutuhan penguji dari masing-masing bidang keterampilan pada Lembaga Sertifikasi Kompetensi;
- Menginformasikan ke ketua organisasi profesi (Orpro) pembentuk LSK agar mengajukan calon penguji baru;
- Telah dilakukan Bimbingan Teknis Penguji Uji Kompetensi Tahap I untuk calon penguji baru bidang Perhotelan, Hipnoterapi, Terapi Perilaku Berkebutuhan Khusus;
- Telah dinyatakan lulus penguji masing-masing bidang tersebut sebanyak **33 penguji**, masing-masing bidang 11 penguji.

h. Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya

- Dilakukan bimbingan teknis dan penguatan pengelola uji kompetensi tahap 1 (LSK) dan tahap 2 (Organisasi Profesi) sebanyak **total 40 orang**
- Dilakukan Bimtek Penguatan Admin penyelenggara Uji Kompetensi sebanyak **total 39 orang**

i. LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi

Dilakukan kegiatan Fasilitasi Penerapan RPL antara LKP dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bersama dengan LLDIKTI yang dilaksanakan di 10 lokasi yaitu:

- Kota Padang
- Kota Palembang
- Kota Lampung
- Kota Jakarta
- Kota Bandung
- Kota Semarang
- Kota Yogyakarta
- Kota Malang
- Kota Surabaya
- Kota Denpasar

Kegiatan Fasilitasi dihadiri oleh Tim RPL dari PTS di 10 lokasi tersebut serta LKP yang menyelenggarakan kursus dan pelatihan yang relevan dengan program studi yang di RPL kan di masing-masing PTS tersebut.

Tujuan fasilitasi Penerapan RPL antara perguruan tinggi dengan LKP yaitu:

- Mendorong terciptanya kerjasama penerapan RPL antara perguruan tinggi dan LKP

- Menyamakan persepsi pelaksanaan penerimaan mahasiswa jalur RPL dari unsur lulusan, instruktur, dan pengelola LKP.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah LKP dan perguruan tinggi yang relevan berkomitmen melaksanakan kerjasama penerapan program RPL bagi lulusan, instruktur, dan pengelola LKP. Hasil kerjasama akan di monitoring di triwulan berikutnya.

j. LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir

Dilakukan penyusunan dokumen model penyelenggaraan Pusat Pengembangan Karir tahun 2024 yang meliputi :

- Pembagian kriteria untuk LKP menentukan sesuai dengan SDM yang tersedia;
- Perencanaan dan Pengorganisasian PPK di LKP;
- Pelaksanaan program PPK di LKP dan;
- Pengawasan PPK di LKP.

k. LKP yang siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas

- Dilakukan Bimbingan Teknis Transformasi LKP Menjadi Akademi Komunitas

Kendala/Permasalahan :

Kendala dalam pencapaian target pada IKK ini adalah sebagai berikut:

a. SKL, kurikulum dan bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja

- SKL dan kurikulum yang sedang disusun di tahun 2024 masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dikarenakan adanya transformasi standar yang masih dalam kajian dan telaah selain itu belum adanya kepastian format dan struktur terbaru setelah adanya risalah transformasi standar.
- Belum semua Bahan Ajar direview sesuai dengan kaidah akademis dengan baik serta belum semua memenuhi kebutuhan industri sedangkan alokasi anggaran sangat terbatas untuk melakukan revisi terhadap perubahan tersebut disamping itu kemampuan literasi digital penyusun bahan ajar audio visual dan e-modul yang beragam.

b. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (PjBL)

Materi pembelajaran berbasis proyek belum dapat difinalkan karena banyaknya alternatif format pelaksanaan PjBL

c. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran daring

- Pada Penyusunan, review dan finalisasi naskah bahan ajar Kursus dalam Jaringan (Daring): ada tim penyusun naskah yang baru bergabung (Batik dan Tata Operasi Darat/TOD) dan belum memiliki pengalaman sehingga harus diberikan pemahaman dan persepsi yang sama dalam penyusunan naskah; Perlu waktu untuk menentukan tim penyusun yang sesuai dengan kriteria dan jenis keterampilan yang akan dibuat video bahan ajarnya;
- Pada Pengimbasan Praktik Baik Penyelenggaraan Kursus Dalam Jaringan (Daring): Banyak lembaga yang masih belum terbiasa dengan pembelajaran kursus daring karena keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga (Sarana, prasarana); Instruktur kurang dapat memberikan materi pembelajaran kursus daring yang menarik dan dapat diserap oleh peserta didik yang dimiliki lembaga;

d. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis pabrik/teaching factory

- Kondisi unit usaha lembaga belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Unit Usaha di LKP tahun 2023
- Lembaga kursus dan pelatihan belum memasukkan model pembelajaran di unit usahanya.
- Belum ada tindak lanjut dari kegiatan pendampingan penyelenggaraan unit usaha di lembaga oleh lembaga yang telah dinilai baik penyelenggaraan unit usahanya (narasumber).

e. LKP yang dinilai kinerja lembaga

- Belum semua Dinas Pendidikan Kab/Kota mengikuti kegiatan sosialisasi pedoman, instrumen dan aplikasi PK-LKP, sehingga penyebaran informasi masih terbatas
- Belum semua Dinas Pendidikan Kab/Kota bisa mengalokasikan pembiayaan untuk PK-LKP pada tahun 2024

f. Instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja

- Dunia Usaha dan Dunia Kerja tidak bersedia menjadi pelaksana program magang instruktur dan pengelola
- Beberapa peserta yang sudah lolos seleksi administrasi dan seleksi kompetensi mengundurkan diri

g. Penguji Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya

Penguji di beberapa bidang belum merata atau tersebar di beberapa kabupaten

h. Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya

- Penugasan penguji uji kompetensi belum merata
- Aplikasi SiKompeten beberapa kali mengalami error dan lamban
- Kehadiran pengawas dari Dinas Pendidikan yang hanya sebentar atau tidak hadir pada saat pelaksanaan uji kompetensi
- Adanya keterlambatan proses verifikasi jadwal uji kompetensi pada program PKK

i. LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi

Kendala/Permasalahan dalam kegiatan Fasilitasi Penerapan RPL antara LKP dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bersama dengan LLDIKTI, yaitu:

- Program kursus dan pelatihan yang diselenggarakan oleh LKP di 10 wilayah tersebut belum semuanya sesuai dengan program studi PTS melalui jalur RPL.
- Sebagian besar PTS yang hadir baru mengetahui program RPL untuk lulusan kursus dan pelatihan dari pertemuan ini.

j. LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir

- Pengenalan akan peran pentingnya Unit Pusat Pengembangan Karir di LKP yang terstruktur dan terencana masih kurang sehingga pengembangan model sulit diterapkan.
- Minimnya kerjasama LKP dengan DUDI yang bersifat Nasional karena kemitraan yang saat ini LKP banyak lakukan masih sebatas pada DUDIKA lokal daerah/UMKM
- Klasifikasi yang dibuat untuk memudah LKP memilih PPK masih kurang mudah dipahami sehingga perlu adanya orientasi lebih lanjut untuk memudahkan LKP menentukan tipe PPK di LKP.

k. LKP yang siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas

- Belum semua dokumen persyaratan pendirian akademi komunitas dapat dipenuhi oleh LKP
- Tidak semua perwakilan LKP memiliki kompetensi dalam penyusunan SPMI dan kurikulum, sehingga dokumen tersebut banyak yang belum selesai

Strategi/Tindak Lanjut :

Strategi yang dilakukan Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk mengatasi kendala pada pencapaian target IKK ini adalah sebagai berikut,

- a. SKL, kurikulum dan bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja**
Percepatan pembahasan kebijakan arah standar kursus dan pelatihan dengan melibatkan berbagai pakar dari KKNi, BSKAP, KADIN, Kemenaker dan stakeholder lainnya.
Dilakukan perbaikan dengan menambahkan elemen-elemen interaktif agar e-modul lebih menarik.
- b. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (PjBL)**
Melaksanakan diskusi lanjutan bersama narasumber dan internal direktorat secara daring maupun luring di kantor
- c. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran daring**
 - Mengintensifkan dengan penyusun untuk membahas kembali naskah yang disusun. Untuk penyusun yang baru bergabung di tahun ini berkoordinasi lebih intensif untuk jenis keterampilan batik dan TOD bersama tim produksi.
 - Pengimbasan dilanjutkan dengan pendampingan menggunakan grup whatsapp, Memfasilitasi pendampingan dengan tim seamolec untuk mendampingi lembaga yang ingin menyelenggarakan kursus daring.
 -
- d. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis industri/teaching factory**
 - Melakukan review pedoman penyelenggaraan unit usaha
 - Melakukan pengimbasan penyelenggaraan pembelajaran di unit usaha di LKP oleh LKP yang telah baik penyelenggaraan pembelajarannya di unit usaha.
 - Berkoordinasi dengan lembaga role model untuk memberikan laporan tindak lanjut kegiatan pengimbasan pelaksanaan pembelajaran di unit usaha
- e. LKP yang dinilai kinerja lembaga**
 - Melakukan koordinasi lanjutan secara intensif dengan Dinas pendidikan Kab/Kota sehingga mereka dapat menyiapkan anggaran (dana padanan) penyelenggaraan PK-LKP Tahun 2025
 - Pemetaan penugasan verifikator setelah kegiatan Orientasi Teknis Verifikator PK-LKP Tahun 2024 tgl 2-5 Juli 2024.
 - Penambahan sumber/asal/kriteria verifikator PK-LKP dan pelaksanaan orientasi teknis kembali bagi calon verifikator baru.
- f. Instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja**
 - Mensosialisasikan menggunakan media sosial maupun pertemuan secara daring terkait pelaksanaan program magang.
 - Menggantikan peserta yang mengundurkan diri, dengan peserta yang memiliki kompetensi yang sama
- g. Penguji Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya**
 - Terkait tidak meratanya penguji di beberapa kabupaten akan diadakan Bimbingan Teknis Penguji Uji Kompetensi Tahap II dan III untuk calon penguji baru yang sudah tersedia anggarannya;

h. Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya

- Mendorong LSK untuk memprioritaskan penguji yang berada di wilayah terdekat dari tempat uji kompetensi.
- Melakukan koordinasi dengan tim pengembang aplikasi Si Kompeten secara periodik untuk menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi pada aplikasi Si Kompeten.
- TUK melampirkan rincian tugas pengawas kepada pengawas yang akan bertugas.
- LSK berkoordinasi dengan LKP dan TUK menjadwalkan pelaksanaan uji kompetensi secara disiplin agar pelaksanaan sesuai rencana.

i. LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi

Strategi/Tindak Lanjut yang dilakukan:

- Bekerjasama dengan LLDIKTI untuk mensosialisasikan program RPL bagi lulusan kursus dan pelatihan kepada PTS di wilayahnya secara berkelanjutan
- Mendorong LKP untuk lebih aktif berkomunikasi dengan PTS yang relevan yang hadir saat pertemuan fasilitasi sehingga terbentuk kerjasama antara LKP dengan PTS

j. LKP yang mempunyai pusat pengembangan karier

- Memastikan LKP yang akan dipilih menjadi percontohan penerapan model penyelenggaraan PPK memahami pedoman model PPK
- Penyederhanaan Instrumen bagi LKP untuk memudahkan pemilihan tipe PPK
- Melakukan pendekatan untuk pemahaman secara lebih mendetail ke LKP dengan melakukan orientasi teknis dan pendampingan secara langsung.

k. LKP yang siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas

- Menyusun konsep pendampingan yang efektif, sehingga persyaratan-persyaratan pengajuan dapat dipenuhi
- Melaksanakan pendampingan

3. [SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan] IKK 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan

Progress/Kegiatan :

- a. Dilakukan pengukuran kinerja triwulan I tahun anggaran 2024 secara tepat waktu
- b. Mempersiapkan kelengkapan dokumen penilaian SAKIP
- c. Dilakukan penyusunan rencana SKP pegawai dengan penyesuaian perubahan nomenklatur jabatan baru

Kendala/Permasalahan :

- a. Dikarenakan terdapat kendala pada aplikasi pengukuran kinerja melalui SPASIKITA, maka perlu penyesuaian pengukuran kinerja dengan menggunakan format manual
- b. Adanya perubahan nomenklatur menyebabkan perlu penyesuaian kembali terhadap tugas dan fungsi masing-masing pegawai

Strategi/Tindak Lanjut :

Melakukan sosialisasi penyusunan rencana SKP kepada seluruh pegawai

4. [SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan] IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan

Progress/Kegiatan :

- a. Dilakukan revisi RPD halaman III DIPA pada bulan juli
- b. Dilakukan penyesuaian target capaian output pada bulan juli
- c. Mengoptimalkan penggunaan KKP
- d. Melakukan revolving UP minimal 3 kali dalam sebulan

Kendala/Permasalahan :
 Terjadi kesalahan kode revisi DIPA sehingga dalam 1 semester terdapat tiga kali revisi DIPA melampaui jumlah maksimal revisi sebanyak dua kali

Strategi/Tindak Lanjut :
 Mengajukan surat permohonan dispensasi ke Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Indikator Revisi DIPA ke Setditjen Pendidikan Vokasi karena tagging kode DIPA dilakukan oleh Eselon I

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan II

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[690442.DL.4278.QDB.001] Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri	Lembaga	1.000	731	269	13,247,114,000	5,215,864,350	8,031,249,650
[690442.DL.4278.QDC.U01] Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	Orang	51.939	28.505	23.434	227,489,230,000	116,610,246,200	69,264,571,800
[690442.DL.4278.QDC.U02] Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	Orang	23.637	12.760	10.877	147,635,963,000	78,286,568,178	48,079,394,822
[690442.WA.4261.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	7,742,032,000	3,160,066,145	4,581,965,855
[690442.WA.4261.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	20,495,169,000	8,295,525,648	12,199,643,352
Total					416.609.508.000	211,568,270,521	142,156,825,479

- Catatan:**
- Pada Rincian Output (RO) 4278.QDC.U01 terdapat anggaran terblokir *automatic adjustment* sebesar Rp 41.614.412.000
 - Pada Rincian Output (RO) 4278.QDC.U02 terdapat anggaran terblokir *automatic adjustment* sebesar Rp21.270.000.000

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Rumuskan target output dari tim *task force* yang telah dibentuk untuk koordinasi dengan pemerintah daerah serta buat timeline rencana kerjanya
2. Penentuan sasaran monev program PKK dan PKW sebelum sampling ke lapangan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah kurasi dari monitoring yang dilakukan melalui aplikasi. Kedua adalah dengan memilih sasaran dengan berdasarkan beberapa kategori sehingga lokus dan sasaran monev yang ditentukan nanti akan menghimpun informasi yang utuh dari berbagai sisi dan tindak lanjuti hasil monev tahap pertama yang sudah dilaksanakan.
3. Buat desain monev untuk penyelenggara bantuan uji kompetensi dengan menyasar LSK dan TUK

Jakarta, 8 Agustus 2024

Direktur Kursus dan Pelatihan,



Rahdiana

NIP 196908061992012001



Laporan Kinerja Triwulan 3
Direktorat Kursus dan Pelatihan
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Direktorat Kursus dan Pelatihan selama triwulan 3 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja				
[IKK 1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	77276	Orang	66278	64259
[SK 2] Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja				
[IKK 2.1] Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	1000	Lembaga	671	1098
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan				
[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	AA	Predikat	-	-
[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	99.13	Nilai	0	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
[IKK 1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha

Progress/Kegiatan

Program Kecakapan Kerja (PKK)

- Pengajuan program PKK dilakukan oleh Lembaga calon penyelenggara dengan memasukan dokumen proposal ke dalam aplikasi eBanper yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator. Jumlah total proposal yang telah dinilai dari bulan Juli s.d akhir September pada kegiatan penilaian proposal PKK sebanyak 1.133 proposal, yang diterima dan ditetapkan di SK sebanyak 625 lembaga dengan total peserta didik sebanyak. 14.112 orang, dan yang ditolak sebanyak 508 proposal dengan presentasi realisasi anggaran 23,64 % dari total anggaran yang telah disalurkan dalam kurun waktu Juli s.d akhir bulan September tahun 2024.



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Berdasarkan hasil verifikasi dan kajian proposal, Tim Verifikator memberikan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan Kuasa Pengguna Anggaran, PPK, Ketua Tim Kerja, Bendahara, Pejabat Pengelola SPM, dan WPU di lingkungan Dit.suslat serta Tim Verifikator dalam melakukan pleno. Dari hasil pleno tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Surat Keputusan (SK) penerima bantuan pemerintah program PKK yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menetapkan sebanyak 625 lembaga dengan jumlah peserta didik sebanyak 14.112 orang penyelenggara program PKK.

Program Kecakapan Wirausaha (PKW)

- Pengajuan program PKW dilakukan oleh Lembaga calon penyelenggara dengan memasukan dokumen proposal ke dalam aplikasi eBanper yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator. Jumlah total proposal yang telah dinilai dari bulan Juli s.d akhir September pada kegiatan penilaian proposal PKW sebanyak 647 proposal, yang diterima dan ditetapkan di SK sebanyak 340 lembaga, dan yang ditolak sebanyak 307 proposal dengan presentasi realisasi anggaran 32,09% dari total anggaran yang telah disalurkan dalam kurun waktu Juli s.d akhir bulan September tahun 2024.- Berdasarkan hasil verifikasi dan kajian proposal, Tim Verifikator memberikan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan Kuasa Pengguna Anggaran, PPK, Ketua Tim Kerja, Bendahara, Pejabat Pengelola SPM, dan WPU di lingkungan Dit.suslat serta Tim Verifikator dalam melakukan pleno.
- Berdasarkan dari hasil pleno tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Surat Keputusan (SK) penerima bantuan pemerintah program PKW yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menetapkan sebanyak 340 lembaga penyelenggara program PKW dengan jumlah peserta didik sebanyak 8.882 orang

Kendala/Permasalahan

1. Masih lambatnya pengajuan proposal oleh lembaga dan banyak proposal yang belum memenuhi persyaratan
2. Masih terdapat kabupaten/kota yang belum mengajukan proposal
3. Masih banyak lembaga yang sudah mengisi proposal namun belum submit pengajuan proposal
4. Masih ada beberapa lembaga yang sudah ditetapkan sebagai calon penyelenggara namun terlambat menyampaikan laporan awal sehingga menunda proses pencairan dana bantuan.
5. Adanya pergantian tim verifikator proposal banper PKW

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota, satuan pendidikan, organisasi mitra kursus dan pelatihan.
2. Telah dilakukan bimbingan teknis terhadap verifikator yang baru.
3. Melakukan pendampingan bagi lembaga yang sudah mengisi proposal di aplikasi untuk mengetahui kendala yang dialami lembaga dan memberikan penjelasan untuk solusi serta mendorong lembaga agar segera mensubmit proposal.
4. Melakukan pendampingan kepada lembaga yang sudah ditetapkan sebagai calon penyelenggara namun belum mengunci laporan awal
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan baik langsung berkunjung ke lembaga secara sampling sebanyak 23 lembaga maupun monitoring secara Daring melalui aplikasi e-banper.

[SK 2] Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
[IKK 2.1] Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dalam mencapai target pada IKK ini, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah melakukan intervensi kepada satuan pendidikan kursus dan pelatihan untuk dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui berbagai program dengan progress dan capaian sebagai berikut:

1. SKL, kurikulum dan bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja:
 - Telah disusun dan direview kurikulum operasional kursus dan pelatihan sesuai kebutuhan dunia kerja pada 5 bidang keterampilan teknik yaitu sepeda motor, teknik elektronika, perhotelan, tennnis, dan operator alas kaki;
 - Dilakukan bimtek penguatan penguasaan kurikulum dalam penerapan pembelajaran kursus dan pelatihan tahap 1 yaitu bidang tata rias pengantin, aplikasi perkantoran, mengemudi angkutan penumpang bus umum dan massal, dan desain teknologi fesyen kepada **51 Lembaga**;
 - Dilakukan bimtek penguatan penguasaan kurikulum dalam penerapan pembelajaran kursus dan pelatihan tahap 2 yaitu bidang perhotelan, barista, tata busana, tata rias pengantin, aplikasi perkantoran, pemasaran digital dan desain grafis kepada **59 Lembaga**.
2. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (PjBL):
Telah tersusunnya bahan materi penyelenggaraan Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL).
3. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran daring:
 - Tersedia 24 Naskah Video Bahan Ajar Kursus Daring yang telah di produksi;
 - Preview Hasil Produksi Video Bahan Ajar Kursus Daring sebanyak 24 video.
4. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis pabrik/teaching factory
 - Telah tersusun pedoman penyelenggaraan unit usaha di lembaga
 - Telah dilaksanakan pengimbasan dan pendampingan unit usaha di **120 lembaga**
 - Telah tersusun instrumen pendataan lembaga penyelenggaraan unit usaha
5. LKP yang dinilai kinerja lembaga:
 - Telah disusun Pedoman PK-LKP;
 - Telah dilaksanakan orientasi teknis bagi calon verifikator penilaian kinerja lembaga kursus dan pelatihan;
 - Telah dilaksanakan verifikasi PK LKP di 119 LKP dengan menugaskan sebanyak 31 orang verifikator.
6. Instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: Sudah selesai dilaksanakan di triwulan 2.
7. Peserta Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya:
 - Program bantuan penyelenggaraan uji kompetensi telah disosialisasikan kepada Pengurus Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Tempat Uji Kompetensi di berbagai bidang.
 - Dari 28 proposal yang diajukan, 22 lolos verifikasi. Dalam pleno, 21 dari 22 proposal tersebut diterima dan 1 ditolak.
 - Sebanyak 1.121 peserta didik mendapatkan bantuan uji kompetensi melalui **12 lembaga**
8. Penguji Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya:
Sebanyak **31 orang** telah melaksanakan Bimbingan Teknis Penguji Uji Kompetensi Tahap II untuk calon penguji baru bidang Barista, Broadcasting, dan Tata Operasi Darat
9. Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya:
Sebanyak 12 LSK dan **14 orang** dari TUK telah melaksanakan Bimbingan Teknis dan Penguatan Pengelola Uji Kompetensi Tahap 3
10. LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi:
 - Berkoordinasi dengan LLDIKTI untuk memfasilitasi kerja sama LKP dan perguruan tinggi penyelenggaraan RPL dalam untuk melaksanakan program RPL bagi lulusan, instruktur, dan pengelola melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang dihadiri oleh 78 perguruan tinggi swasta dan 122 LKP di 10 lokasi;
 - Sebanyak **50 LKP** telah menjajaki kerja sama dengan perguruan tinggi untuk menerapkan program RPL bagi lulusan, instruktur, dan pengelola kursus dan pelatihan
11. LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir:
 - Telah dilaksanakan orientasi teknis pada LKP yang menyelenggarakan pusat pengembangan karir.- telah dilakukan pendampingan penyelenggaraan pusat pengembangan karir di lkp LKP Budi Mulya, LKP Ariyanti, LKP Graha Wisata, LKP Arya School of Fashion, LKP Sangkuriang, LKP IHCT
 - Telah ditetapkan **30 LKP** yang penyelenggaraan pusat pengembangan karir.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

12. LKP yang siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas
 - Telah dilakukan pendampingan Transformasi LKP Menjadi Akademi Komunitas.

Kendala/Permasalahan

Kendala dalam pencapaian target pada IKK ini adalah sebagai berikut:

1. SKL, kurikulum dan bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja: Beberapa penyusun pada tahap revidi tidak dapat diundang keseluruhan karena diprioritaskan pada jumlah reviewer.
2. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (PjBL): tidak ada kendala
3. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran daring:
 - Pada kegiatan Produksi bahan ajar, Ada beberapa rancangan anggaran biaya yang diajukan oleh penyusun yang harus disesuaikan dengan dana yang dikelola dengan kegiatan produksi, lokasi pengambilan gambar, dan penentuan talent (belum terbiasa tampil on cam, jadi banyak scene yang diulang berulang kali);
 - Video bahan ajar yang disajikan untuk direview hanya video yang dishoot offline (keseluruhan scene belum selesai proses edit);
 - Perlu penambahan sub title, teks, image, dan background, agar mempermudah penonton dalam memahami alur bahan ajar dan membuat konten lebih menarik;
 - Visual narator terkait pergantian topik narasi di setiap scene nya lebih diperhalus, serta penghilangan penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami.
4. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis pabrik/teaching factory: tidak ada kendala
5. LKP yang dinilai kinerja lembaga:
setelah pemetaan penugasan verifikator diketahui bahwa verifikator yang ada tidak mewakili seluruh daerah LKP sasaran PK-LKP Tahun 2024, dan terdapat beberapa verifikator baru dari Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Ditsuslat.
6. Instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: sudah selesai dilaksanakan di TW II.
7. Penguji Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya:
 - Penguji di beberapa bidang belum merata atau tersebar di beberapa kabupaten;
 - Proses dan tahapan Bimtek penguji dilakukan secara manual belum melalui aplikasi Sikompeten sehingga Orpro mengadakan pelatihan penguji tidak diketahui kebenarannya apakah sudah sesuai dengan ketentuan pada pedoman pelatihan penguji;
 - Proses pencetakan sertifikasi penguji masih proses manual dengan mengajukan surat permohonan Permintaan Blanks Sertifikat Penguji ke Direktorat oleh organisasi profesi (Orpro) pembentuk LSK terhadap penguji yang dinyatakan lulus, kemudian mengajukan tanda tangan sertifikat penguji ke Direktur.
8. Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya:
 - Beberapa LSK dan TUK menyusun RAB yang kurang sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan.
 - Beberapa TUK menghadapi kendala dalam hal administrasi, terutama dalam pengaturan pembayaran dan perpajakan.
 - Beberapa Dinas Pendidikan mengirim lebih dari satu pengawas untuk hadir dalam uji kompetensi, padahal di Juknis hanya memperbolehkan satu orang pengawas. Hal ini menyebabkan masalah budgeting.
 - Pengawas dari Dinas Pendidikan kadang tidak sepenuhnya menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan yang diharapkan.
9. LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi:
Kendala hanya pada realisasi kerja sama belum optimal disebabkan: 1) Keterbatasan program studi RPL dengan bidang keterampilan yang diselenggarakan LKP dalam satu wilayah. 2) Biaya kuliah program RPL relatif lebih tinggi dari penerimaan regular.
10. LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir: LKP masih banyak yg belum mengenal tentang pentingnya tata kelola lembaga yang terstruktur sehingga menghambat penerapan pusat pengembangan karir disisi lain kurangnya pemahaman tentang tata kelola lkp menjadi salah satu kendala dari penerapan karena lkp dikelola hanya dengan sedikit sumber daya.
11. LKP yang siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas:
LKP yang belum berproses ke tahap selanjutnya (permohonan rekomendasi lldikti) rata-rata masih kesulitan dalam:



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- a. pemenuhan luas lahan yang disyaratkan seluas 5000m²,
- b. pemenuhan persyaratan linieritas pendidikan calon dosen dengan latar belakang S2/Magister.
- c. Beberapa terkendala dengan persyaratan penyusunan dokumen seperti kurikulum, SPMI dan instrument lain.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk mengatasi kendala pada pencapaian target IKK ini adalah sebagai berikut,

1. SKL, kurikulum dan bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja:
Akan dilakukan finalisasi penyusunan kurikulum operasional di 5 bidang keterampilan yaitu bidang teknik sepeda motor, teknik elektronika, tenun, operator alas kaki, dan perhotelan.
2. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (PjBL):
Tahapan selanjutnya akan dilaksanakan orientasi teknis lkp penyelenggaraan Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL) pada akhir bulan oktober 2024.
3. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran daring:
 - Adanya pendampingan selama proses shooting dari narasumber;
 - Perlu disusun timeline proses editing video supaya hasilnya dapat maksimal;
 - Peningkatan kualitas konten, melalui kegiatan preview yang dilaksanakan 2 kali (bisa mandiri melalui zoom antara tim produksi dengan tim penyusun bahan ajar).
4. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis pabrik/teaching factory:
LKP yang dinilai kinerja lembaga: Tindak Lanjut, Verifikator melibatkan pula dari unsur Ditsuslat, yang dilibatkan dalam kegiatan pembekalan sebelum pelaksanaan verifikasi, dan verifikator baru dari Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Ditsuslat ditugaskan berpasangan dengan verifikator dari UPT. Tahapan selanjutnya adalah pleno hasil verifikasi PK-LKP, diseminasi Hasil PK-LKP, masa banding selama 14 hari, serta penerbitan SK dan sertifikat hasil PK-LKP tahun 2024. Kemudian akan dilaksanakan analisis dan evaluasi dari hasil PK-LKP tahun 2024, sehingga dapat diperoleh rekomendasi perbaikan pelaksanaan PK-LKP maupun kebijakan dan pembinaan LKP di masa yang akan datang. Instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: sudah selesai dilaksanakan.
5. Penguji Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya:
 - Telah dilakukan pemetaan Penguji di beberapa bidang yang belum merata atau tersebar di beberapa kabupaten;
 - Proses dan tahapan pelatihan penguji proses pengembangan melalui aplikasi Sikompeten: 1) proses dan tahapan lebih transparan; 2) penguji terstandar (lebih terukur dan terstandar) sesuai pedoman pelatihan penguji; 3) Data Penguji dan proses pelatihan penguji terhubung dan tersimpan di Sikompeten 4) Lebih cepat mendapatkan sertifikat Penguji; 5) Legitimasi Sertifikat penguji lebih terpercaya 6) Pengadaan pelatihan penguji lebih mudah dan terintegrasi
6. Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya:
Proses dan tahapan pengujian akan dikembangkan melalui aplikasi Sikompeten, agar mudah tertelusur dan transparan; Penguji Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya:
7. LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi:
 - Mendorong LKP bekerja sama dengan Perguruan Tinggi lintas wilayah;
 - Penjajakan kemungkinan program beasiswa peserta didik jalur RPL.
8. LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir:
Perlu adanya sosialisasi tata kelola terutama di bidang pengembangan karir yang akan berdampak ke peserta didik, alumni dan dudika agar dapat saling berkolaborasi mendukung lembaga mencetak lulusan yang siap kerja.
9. LKP yang siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas:
Dari hasil pendampingan bersama dengan asesor dari Ildikti di wilayah LKP, asesor sudah menyatakan kesediaan untuk sewaktu-waktu konsultasi terkait kendala-kendala pemenuhan persyaratan. di beberapa lokasi pendampingan seperti Kediri, dan Depok asesor memberikan contoh dokumen sebagai acuan LKP dan memfasilitasi kebutuhan konsultasi LKP dengan asesor dan WPU, baik secara langsung melalui tatap muka ataupun melalui WA.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan
[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan

Progress/Kegiatan

Untuk mencapai predikat SAKIP Ditsuslat agar sesuai target, dilakukan beberapa kegiatan di triwulan 3 sebagai berikut,

1. Melaksanakan pengukuran kinerja triwulan III untuk mengidentifikasi progress, kendala/permasalahan, strategi/tindak lanjut;
2. Mengumpulkan data dukung sebagai kelengkapan SAKIP;
3. Pengumpulan dokumen rencana SKP yang sesuai dengan caseceding.

Kendala/Permasalahan

Kendala dalam pencapaian target pada IKK ini adalah pengukuran kinerja memerlukan waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan 1 - 3 hari, dikarenakan harus mengidentifikasi kembali hambatan dan kendala serta strategi tindak lanjutnya.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk mengatasi kendala pada pencapaian target IKK ini adalah sebagai berikut,

1. Berkoordinasi dengan masing pokja untuk segera menyelesaikan tugasnya untuk pengukuran kinerja
2. Mengajukan surat permohonan dispensasi nilai IKPA pada indikator revisi DIPA.

[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan
[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan

Progress/Kegiatan

Untuk mencapai NKA atas pelaksanaan RKA K/L Ditsuslat agar sesuai target, dilakukan beberapa kegiatan yaitu,

1. Koordinasi nilai capaian NKA yang terdiri dari Nilai EKA dan IKPA dengan masing-masing tim kerja;
2. Telah dilaksanakan kegiatan revisi anggaran di bulan september 2024.

Kendala/Permasalahan

Direktorat Kursus dan Pelatihan telah melakukan buka blokir reguler. Buka blokir reguler seharusnya tidak menjadi perhitungan dalam penilaian IKPA pada Indikator DIPA, karena proses revisi yang dilakukan hanya memerlukan kode revisi 306 saja terkait pencantuman/ penghapusan/ perubahan catatan halaman IV DIPA melalui Unit Eselon I sebagai fasilitator dalam menampung seluruh revisi eselon II yang menjadi kewenangan DJA. Kondisi ini mengakibatkan nilai IKPA pada indikator Revisi DIPA mengalami penurunan

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala di triwulan 3 adalah dengan mengajukan surat permohonan dispensasi nilai IKPA pada indikator revisi DIPA ke DJA.

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DL.4278.QDB.001] Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri	Lembaga	1000	731	269	Rp13.247.114.000	Rp10.814.900.439	Rp2.432.213.561
[DL.4278.QDC.U01] Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	Orang	51939	42617	9322	Rp227.489.230.000	Rp215.265.395.750	Rp12.223.834.250
[DL.4278.QDC.U02] Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	Orang	23637	20666	2971	Rp147.635.963.000	Rp135.123.882.202	Rp12.512.080.798
[WA.4261.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	0	1	Rp10.000.000	Rp0	Rp10.000.000
[WA.4261.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp7.732.032.000	Rp4.580.547.976	Rp3.151.484.024
[WA.4261.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp20.004.472.000	Rp14.961.477.201	Rp5.042.994.799
Total Anggaran					Rp416.118.811.000	Rp380.746.203.568	Rp35.372.607.432

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Lakukan revisi atau penyesuaian juknis program PKK dan PKW terhadap kondisi-kondisi yang sesuai dengan pelaksanaan program. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian sistem terhadap juknis yang direvisi;
2. Dorong percepatan update tracer study secara periodik terkait kebekerjaan lulusan PKK dan rintisan usaha lulusan PKW bagi lembaga penyelenggara yang telah menyelesaikan program PKK dan PKW.

Jakarta, 1 November 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Kursus dan Pelatihan

Nahdiana



Laporan Kinerja Triwulan 4
Direktorat Kursus dan Pelatihan
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Direktorat Kursus dan Pelatihan selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja				
[IKK 1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	77276	Orang	77276	82336
[SK 2] Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja				
[IKK 2.1] Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	1000	Lembaga	1000	1293
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan				
[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	AA	Predikat	AA	AA
[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	99.13	Nilai	99.13	96.62

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
[IKK 1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha

Progress/Kegiatan

Dalam mencapai target pada IKK ini, Direktorat Kursus dan Pelatihan melaksanakan dua program yaitu PKK dan PKW dengan progress capaian sebagai berikut,

1. Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)

- Telah dilakukan Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah PKK Tahun 2025 yang disusun dengan melibatkan unsur Dinas Pendidikan Kota Depok, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dinas Pendidikan Bogor, Widyaprada Ahli Utama dan Ketua Bidang di lingkungan Dit.suslat, Pokja PKK, Itjen, Sesditjen Tim kerja bidang hukum, tata laksana, pembinaan dan pengembangan karir kepegawaian, PPSPM, LKP, Forum LSK, Forum HIPPKI, Forum FKLKP, dan Tim Verifikator.



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Telah dilakukan Penyusunan satuan biaya perjenis keterampilan program PKK dalam rangka Penyusunan Pedoman - Pedoman/Bahan Ajar Pendukung Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), dan menghasilkan satuan biaya untuk jenis keterampilan Tata Busana, Membatik, Operator Menjahit Upper Alas Kaki, Tata Kecantikan, Tata Rias Pengantin, SPA, Seni Tari, Tata Boga, Perhotelan, Care giver, Baby Sitter, Teknik Sepeda Motor, Teknik Kendaraan Ringan, Pengelasan, Tata Operasi Darat, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Broadcasting yang disusun dengan melibatkan unsur LSK Tata Busana, LSK Membatik, LKP Bangun Karya Jombang, LSK Tata Kecantikan, LSK Tata Rias Pengantin, LSK SPA, Asosiasi Seniman Tari Indonesia, LSK Tata Boga, LSK Perhotelan, LSK Care Giver, LSK Baby Sitter, LSK Teknik Sepeda Motor, LSK Teknik Kendaraan Ringan, LKP Nusa Citra Indonesia, LSK Penerbangan, LSK TIK, LSK Broadcasting, dan Tim Verifikator PKK.
 - Telah dilakukan penilaian proposal lembaga yang mengakses program PKK sebanyak 2 (Dua) kegiatan. Jumlah proposal yang dinilai ada 1.134, proposal yang diterima sebanyak 628 dan proposal yang ditolak sebanyak 506.
 - Telah dilakukan penetapan penerima dan penyaluran bantuan program PKK sebanyak **14.987** orang dengan rincian tipe silver tahap XI sebanyak **1.290** orang, tipe silver tahap XII sebanyak **11.248** orang, tipe silver tahap XIII sebanyak **132** orang, tipe silver tahap XIV sebanyak **2.217** orang, dan tipe gold tahap SK VI sebanyak **100** orang.
 - Telah dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Program PKK sebanyak 5 kegiatan secara blended kepada 628 lembaga. Telah dilakukan kegiatan Verifikasi dan Pengolahan Laporan Penyelenggara Program PKK sebanyak 7 kegiatan secara blended.
 - Telah dilakukan kegiatan Penilaian Lomba video Best Practice Program PKK sebanyak 2 kegiatan, sebanyak 652 video yang telah dinilai dan terpilih sebanyak 3 video. Tim penilai terdiri dari unsur Pokja PKK Dit.suslat, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Pusat Pendataan dan Informasi, Rumah Produksi Nyala Kala Cakra, SEAMEO SEAMOLEC, Rumah Merah Kreatif, PT Lathisa Pesona Natura dan Universitas Sebelas Maret.
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program PKK kepada 25 lembaga yang berada di wilayah Kab. Banyumas, Kab. Lamongan, Kab. Indramayu, Kab. Cianjur, Kab. Ciamis, Kab. Bandung, Kab. Buleleng, Kab. Kutai Timur, Kota Ternate, Kota Jambi, Kota Bontang, dan Kota Mataram.

2. Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)

- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program PKW secara daring 226 lembaga
- Telah dilakukan penetapan penerima dan penyaluran bantuan program PKW sebanyak **3.090** orang dengan rincian tipe gold tahap XVIII sebanyak **99** orang, tipe gold tahap XIX sebanyak **182** orang, tipe tahap XX sebanyak **298** orang, dan tipe Silver tahap XXI sebanyak **2.511** orang
- Telah disusun 1 dokumen petunjuk teknis Program PKW
- Telah diselenggarakan 1 kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Program PKW SK Tahap 18-21
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program PKW 630 lembaga
- Telah diseleksi dan ditetapkan 3 video praktik baik terbaik dan 3 video bahan ajar PKW terbaik
- Telah dilakukan verifikasi laporan akhir penyelenggaraan program PKW Tahun 2024 sebanyak 374 proposal
- Telah dilakukan pengimbasan praktik baik penyelenggaraan program PKW terhadap 40 lembaga di Garut dan Minahasa Utara
- Telah dilakukan evaluasi lembaga penyelenggaraan program PKW terhadap 110 lembaga

Kendala/Permasalahan

Kendala dalam pencapaian target pada IKK ini adalah sebagai berikut,

1. Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK):

- Pengesahan DIPA buka blokir dilakukan di bulan september sehingga merubah jadwal pencairan dan pelaksanaan pembelajaran yang harusnya dimulai bulan oktober menjadi bulan november
- Terdapat lembaga yang sudah menyelesaikan pembelajaran tetapi belum menyampaikan laporan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

pertanggungjawaban program bantuan pemerintah melalui aplikasi

2. Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW):

- Terdapat lembaga yang sudah menyelesaikan pembelajaran tetapi belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban program bantuan pemerintah melalui aplikasi
- Terdapat lembaga yang belum melaporkan perkembangan rintisan usaha peserta didik

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk mengatasi kendala pada pencapaian target IKK ini adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK):

- Melakukan pendampingan kepada lembaga penyelenggara untuk menambah jam pelajaran per hari sehingga waktu pembelajaran dapat efektif selesai sampai maksimal bulan desember dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya maksimal 31 Desember 2024
- Dilakukan pendampingan secara intensif terhadap kendala yang dihadapi untuk segera menyelesaikan pertanggungjawabannya baik melalui luring maupun daring

2. Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW):

- Dilakukan pendampingan secara intensif terhadap kendala yang dihadapi untuk segera menyelesaikan pertanggungjawabannya baik melalui luring maupun daring
- Dilakukan pendampingan secara berkala baik melalui aplikasi maupun luring untuk melaporkan perkembangan rintisan usaha peserta didik

[SK 2] Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja [IKK 2.1] Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja

Progress/Kegiatan

Dalam mencapai target pada IKK ini, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah melakukan intervensi kepada satuan pendidikan kursus dan pelatihan untuk dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui berbagai program dengan progress dan capaian sebagai berikut:

1. SKL, kurikulum dan bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja

- Telah dilakukan uji publik SKL dan kurikulum 5 bidang elektronika, perhotelan, tenun, alas kaki, teknik sepeda motor
- Telah dilakukan finalisasi SKL kursus dan pelatihan **5 bidang** elektronika, perhotelan, tenun, alas kaki, teknik sepeda motor
- Telah dilakukan finalisasi kurikulum operasional kursus dan pelatihan. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis pabrik/teaching factory **5 bidang** elektronika, perhotelan, tenun, alas kaki, teknik sepeda motor

2. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja Project Based Learning (PJBL)

- telah dilakukan kegiatan orientasi teknis penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek/PjBL sebanyak **30 LKP**

3. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran daring



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

memahami alur bahan ajar dan membuat konten lebih menarik

- Visual narator terkait pergantian topik narasi di setiap scene nya lebih diperhalus, serta penghilangan penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami.

4. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis pabrik/teaching factory: Sudah selesai dilaksanakan di triwulan 3

5. LKP yang dinilai kinerja Lembaga

- Karena adanya pengajuan keberatan hasil penetapan penilaian kinerja kegiatan tindak lanjut penilaian kinerja lembaga membutuhkan waktu lebih lama dari rencana kegiatan yang telah ditetapkan

6. Instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: Sudah selesai dilaksanakan di triwulan 2.

7. Penguji uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya

- Terdapat sedikit perbedaan persepsi oleh para tim pleno terkait proses perhitungan penilaian di bagian teori

8. Pengelola uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya : Sudah selesai dilaksanakan di triwulan 3.

9. LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi (PT)

- Realisasi kerja sama belum optimal disebabkan keterbatasan program studi RPL dengan bidang keterampilan yang diselenggarakan LKP dalam satu wilayah dan biaya kuliah program RPL relatif lebih tinggi dari penerimaan regular

10. LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir : Sudah selesai dilaksanakan di triwulan 3.

11. LKP yang siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas

- Belum semua lembaga memiliki kesiapan dalam memenuhi persyaratan pendirian akademi komunitas yang diperlukan

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk mengatasi kendala pada pencapaian target IKK ini adalah sebagai berikut,

1. SKL, kurikulum dan bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja

- Nomor-nomor yang sudah tidak dapat dihubungi, dicarikan di aplikasi PKK dan PKW, jika tidak ada diganti LKP lain
- Penyusun menganalisis hasil uji publik, terutama yang terkait konten
- Penyesuaian hasil masukan uji publik oleh penyusun

2. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja Project Based Learning (PJBL)

- Membuka ruang pembimbingan secara online kepada instruktur yang membutuhkan setelah pelaksananya kegiatan

3. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran daring

- Pendampingan dari narasumber terkait penyempurnaan hasil video bahan ajar kursus daring

4. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis pabrik/teaching factory: Sudah selesai



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

dilaksanakan di triwulan 3

5. LKP yang dinilai kinerja Lembaga

- Melakukan pertemuan lanjutan antar tim verifikator, tim validator, unsur pimpinan internal Ditsuslat untuk menelaah ulang atas keberatan hasil penetapan penilaian kinerja yang diajukan dan dibuat SK terbaru hasil perbaikan

6. Instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: Sudah selesai dilaksanakan di triwulan 2.

7. Penguji uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya

- Dilakukan rapat lanjutan untuk masukan perbaikan pada pedoman pelatihan penguji terkait penilaian

8. Pengelola uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya : Sudah selesai dilaksanakan di triwulan 3.

9. LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi (PT)

- Mendorong LKP bekerja sama dengan Perguruan Tinggi lintas wilayah
- Penjajakan kemungkinan program beasiswa peserta didik jalur RPL

10. LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir : Sudah selesai dilaksanakan di triwulan 3.

11. LKP yang siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas

- Menyediakan wadah/sarana konsultasi dengan Widyaprada Ahli Utama dan narasumber dari LLDIKTI

[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan

[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan

Progress/Kegiatan

Sebagai upaya mencapai target pada penilaian SAKIP, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah melakukan beberapa kegiatan di triwulan IV meliputi:

1. Pengumpulan dokumen kelengkapan SAKIP
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program triwulan IV
3. Penyusunan Laporan kinerja 2024
4. Penginputan pengukuran kinerja Triwulan IV

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan dalam pencapaian IKK ini di triwulan IV ini adalah keterbatasan waktu untuk melakukan monitoring, penyusunan laporan kinerja, dan pengumpulan dokumen SAKIP

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan dalam mencapai target IKK ini adalah dengan menyusun timeline penyelesaian pekerjaan

[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan

[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Progress/Kegiatan

Sebagai upaya mencapai target pada NKA, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah melakukan beberapa kegiatan di triwulan IV meliputi:

- 1. Melakukan rapat koordinasi internal terkait dengan perencanaan penarikan dana dan persiapan pelaksanaan program maupun kegiatan triwulan IV
- 2. Pelaksanaan program kegiatan sesuai rencana penarikan dana triwulan IV
- 3. Melakukan penginputan capaian output sesuai waktu yang telah ditentukan

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan dalam pencapaian IKK ini di triwulan IV ini adalah adanya efisiensi biaya perjalanan dinas sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan perlu penyesuaian kembali

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan Direktorat Kursus dan Pelatihan dalam berupaya mengatasi kendala yang ada pada pencapaian IKK ini adalah dengan mengajukan dispensasi penggunaan penghematan perjalanan dinas kepada Kanwil DjPb

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DL.4278.QDB.001] Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri	Lembaga	1000	1076	0	Rp13.247.114.000	Rp12.459.361.581	Rp787.752.419
[DL.4278.QDC.U01] Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	Orang	51939	57604	0	Rp227.489.230.000	Rp226.852.795.750	Rp636.434.250
[DL.4278.QDC.U02] Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	Orang	23637	24732	0	Rp147.635.963.000	Rp136.134.717.558	Rp11.501.245.442
[WA.4261.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	0	1	Rp10.000.000	Rp8.064.310	Rp1.935.690
[WA.4261.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp7.732.032.000	Rp7.591.377.691	Rp140.654.309
[WA.4261.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp20.004.472.000	Rp19.503.545.644	Rp500.926.356
Total Anggaran					Rp416.118.811.000	Rp402.549.862.534	Rp13.568.948.466

D. Rekomendasi Pimpinan



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	☒
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	☒
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	☒
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	☒
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	☒
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	☒
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	☒
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	☒
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	☒
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	☒
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	☒
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	☒
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	☒
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	☒
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun- tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	☒
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	☒
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	☒
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	☒
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	☒

**Pernyataan Telah Direviu
Direktorat Kursus dan Pelatihan
Tahun Anggaran 2024**

Kami telah mereviu laporan kinerja Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Kursus dan Pelatihan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 31 Januari 2025

Ketua Tim Reviu,



Siswanto



2024

Direktorat Kursus dan Pelatihan



KursusKita



kursuskita



kursuskita



KursusKita

